



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023





GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023 adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 – 2023.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.

(3) TPB/*SDGs* berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh; dan
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RAD TPB/*SDGs* Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/*SDGs*

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/*SDGs*

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

(2) Dokumen RAD TPB/*SDGs* Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB/*SDGs* sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB/*SDGs*, dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB.
- (2) Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/*SDGs* Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 62



DRAFT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023 adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019 – 2023.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/*SDGs* Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) TPB/*SDGs* berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi :
 1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 4. Pendidikan Berkualitas;
 5. Kesenjangan Gender;
 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 10. Berkurangnya Kesenjangan;
 11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
 13. Penanganan Perubahan Iklim;
 14. Ekosistem Lautan;
 15. Ekosistem Daratan;
 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh; dan
 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/*SDGs* Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/*SDGs*

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN
TPB/*SDGs*
BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/*SDGs* Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB/*SDGs* sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB/*SDGs*, dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB.
- (2) Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* dilakukan oleh Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/*SDGs* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/*SDGs* Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah	7
1.3. Keselarasan TPB terhadap RPJMD Tahun 2019-2023	8
1.4. Pembiayaan TPB di Daerah.....	12
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB	13
1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB.....	15
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB	18
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun.....	18
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan .	25
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	31
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	42
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	49
2.6. Menjamin ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	67
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	90
2.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	105
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.....	108

2.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	109
2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan .	117
2.13. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	132
2.14. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	140
2.15. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	146
2.16. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	157
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB.....	161
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	161
3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	174
3.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	183
3.4. Pendidikan Berkualitas	197
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	234
3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	241
3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	246
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	249
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	256
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan	265
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	269
3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	294
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	303
4.1. Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB 2019-2023	303

4.2. Pemantauan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Organisasi Non Pemerintah	307
4.3. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB 2019-2023.....	309
4.4. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	309
BAB V PENUTUP	310
5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB	310
5.2. Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB	310
5.3. Pemutakhiran Dokumen	313

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	2
Tabel 1.2 Transformasi MDGs ke SDGs	5
Tabel 1.3 Sinergi Prioritas Daerah RPJMD 2019-2023 dan TPB	9
Tabel 2.2 Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	22
Tabel 2.3 Jumlah Poliklinik dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	23
Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018	25
Tabel. 2.5 Persentase Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018	38
Tabel 2.6 Data Peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat per Jenis Kepesertaan per Desember 2018	39
Tabel 2.7 Kondisi Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan	43
Tabel 2.8 Angka Melek Huruf Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Melek Huruf.....	44
Tabel 2.9 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017.....	46
Tabel 2.10 Perkembangan Angka Kelulusansiswa SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/ Paket C di Provinsi Kalimantan.....	47
Tabel 2.11 Data Keadaan Guru Semua Jenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	48
Tabel 2.12 Kualifikasi dan Kompetensi Guru Bersertifikasi di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2019.....	49
Tabel 2.13 Persentase Anggota DPRD Perempuan Kalimantan Barat.....	57
Tabel 2.14 Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2023.....	57

Tabel 2.14 PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2018	60
Tabel 2.15 Kondisi Jaksa di Kejaksaan Tinggi/Negeri Kalimantan Barat Tahun 2017	62
Tabel 2.16 Persentase Keterwakilan Perempuan di Kepolisian Provinsi Kalbar	65
Tabel 2.17 Polisi di Kalbar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 - Tahun 2017	65
Tabel 2.19 Persentase Tingkat Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Provinsi Kalimantan Barat Bersih Tahun 2014 – 2018	70
Tabel. 2.20 Kondisi Listrik Terjual dan Jumlah Pelanggan Provinsi Kalimantan Barat	
Tahun 2014 -2018.....	77
Tabel 2.21 Potensi Bioenergi di Kalimantan Barat	78
Tabel 2.22 Potensi Energi Nuklir di Kalimantan Barat	78
Tabel 2.23 Potensi Energi Surya di Kalimantan Barat	79
Tabel 2.24 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Prov. Kalbar	81
Tabel 2.25 Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi.....	83
Tabel 2.26 Distribusi Bahan Bakar Minyak (Bensin dan Solar) dan Gas Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	84
Tabel 2.27 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten-Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2018.....	93
Tabel 2.28 Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (Harga Berlaku) Tahun 2015-2018 (Juta Rp)	93
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2015-2018	96
Tabel 2.30 Jumlah Koperasi dan UKM.....	101
Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2018.....	104
Tabel 2.32 Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	104
Tabel 2.33 Pencapaian Indikator Sasaran dan Indikator Program Perumahan hingga tahun 2018.....	111
Tabel 2.34 Jenis Pelayanan Publik, Permasalahan Pelaksanaannya, serta Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan	113

Tabel 2.35 Sasaran/Program Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2018	116
Tabel 2.36 Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019.....	117
Tabel 2.37 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat.....	121
Tabel 2.38 TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat	122
Tabel 2.39 Data Timbulan Sampah dan Data Sampah Terkelola Kab/Kota di Kalimantan Barat	126
Tabel 2.40 Tabel Data Bank Sampah di Provinsi Kalimantan Barat.....	127
Tabel 2.41 Neraca Limbah B3 Skala Provinsi	129
Tabel 2.42 Proyeksi dan Target Penurunan Emisi dengan Mitigasi RAD GRK	130
Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2020	130
Tabel 2.43 Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2013 – 2018 Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Kawasan Konservasi Perairan Laut Provinsi Kalimantan Barat.....	136
Tabel 2.44 Realisasi Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat.....	137
Tabel 2.45 Data Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat	141
Tabel. 2.46 Daftar Rincian Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Barat	145
Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	163
Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	199
Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender.....	210
Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	217
Tabel3.7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	221
Tabel 3.8 target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	232
Tabel 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	237

Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	243
Tabel 3.13 target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim	254
Tabel 3.14 target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan....	258
Tabel 3.15 target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan..	267
Tabel 3.16 target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian. Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	277
Tabel 3.17 target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	296

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.....	14
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Barat (Ribuan Jiwa) 2018	19
Gambar 2.2 Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Barat..... Berdasarkan Kasus tercatat Tahun 2018	32
Gambar 2.3 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	
Gambar 2.4 Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	33
Gambar 2.5 Persentase Imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HIB, Polio, Campak, dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	
Gambar 2.6 Distribusi Kasus HIV AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018	36
Gambar 2.7 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	41
Gambar 2.8 Jumlah tenaga Kesehatan menurut Jenisnya	41
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	41
Gambar 2.9 Data Kekerasan yang ditangani P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat.....	52
Gambar 2.10 Persentase Anggota DPRD Perempuan Provinsi Kalimantan Barat.....	57
Gambar 2.11 Persentase Perempuan Partisipasi di Lembaga Eksekutif	59
Gambar 2.12 Jabatan Struktural/Fungsional PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	61
Gambar 2.13 Persentase Jaksa Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2017.....	63
Gambar 2.14 Persentase Jaksa Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2017.....	64

Gambar 2.15 Persentase Keterwakilan Perempuan di Kepolisian Provinsi Kalbar	65
Gambar 2.16 Persentase Polisi Perempuan di Kalbar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017	66
Gambar 2.17 Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (RT) Tahun 2013 - 2018	80
Gambar 2.18 Produksi Listrik PLN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2018 (Kwh)	85
Gambar 2.19 Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Berlistrik (ribu)	86
Gambar 2.20 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	86
Gambar 2.22 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	86
Gambar 2.21 Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Berlistrik (ribu)	86
Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2015-2018	92
Gambar. 2.24 TPT Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2015-2018 Tingkat Pengangguran Terbuka	98
Gambar 2.26 Kondisi KUR di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2018	102
Gambar 2.27 Laju Pertumbuhan Industri Kalimantan Barat	107
Gambar 2.28 Gini Rasio Provinsi Kalimantan Barat	108
Gambar 2.29 Potensi Penurunan Emisi dengan Mitigasi RAD GRK Kalimantan Barat Hingga Tahun 2018	131
Gambar 2.33 Peta Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat	139
Gambar 3.1 Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya	224
Gambar 4.1 Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan TPB	305
Gambar 4.2. Alur Pelaporan melalui mekanisme “ <i>Voluntary Self Assesment</i> ”	307

Lampiran
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor Tahun 2019
Tanggal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 ini merupakan Rencana Aksi Daerah periode kedua, yang mana untuk periode sebelumnya adalah RAD TPB Tahun 2016-2018. Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu dari provinsi yang penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-nya dilaksanakan dalam 2 periode, hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan 2 periode kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus terus berlanjut hingga tahun 2030, maka untuk pelaksanaannya tentu juga menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Sebagaimana pelaksanaan pencapaian Rencana Aksi Daerah *Millenium Development Goals* (RAD MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015, pelaksanaan RAD TPB 2016-2018 juga menyisakan banyak tujuan yang harus dicapai karena belum tuntas sebagaimana diharapkan. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB ini adalah prinsip “*No One Left Behind*”,

artinya kita berharap bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal dalam pelaksanaan pencapaian semua tujuan pembangunan berkelanjutan ini.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global hingga tahun 2030. Sebagaimana kita ketahui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri dari 17 Tujuan yang melingkupi dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Nama Panjang	Nama Pendek
1	2	3
1	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun.	Tanpa Kemiskinan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.	Tanpa Kelaparan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.	Pendidikan Berkualitas
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.	Kesetaraan Gender
6	Menjamin ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan	Air Bersih dan Sanitasi Layak

No	Nama Panjang	Nama Pendek
1	2	3
	Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua.	
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua.	Energi Bersih dan Terjangkau
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara.	Berkurangnya Kesenjangan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13	Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.	Penanganan Perubahan Iklim
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	Ekosistem Lautan

No	Nama Panjang	Nama Pendek
1	2	3
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.	Ekosistem Daratan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sejak awal, SDGs dibuat melalui proses partisipatoris yang sangat inklusif dengan cara konsultasi langsung dengan semua kalangan (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat filantropi) baik dari negara maju maupun berkembang. Hal tersebut berkontribusi pada adanya beberapa perbedaan penting antara MDGs dan SDG, yaitu :

1. Pertama, SDGs dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, inklusivitas, dan antidiskriminasi.
2. Kedua, dalam hal agenda, SDGs tidak tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masa sekarang, tetapi juga

memerhatikan kebutuhan masa yang akan datang atau berkelanjutan.

3. Ketiga, SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi terjadi selaras dengan alam/lingkungan.
4. Keempat, SDGs juga dirancang untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan.
5. Kelima, SDGs mengutamakan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

TPB merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs, sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB semua tujuan diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 tentang Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 tentang Ekosistem Daratan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1a berikut :

Tabel 1.2 Transformasi MDGs ke SDGs

No	MDGs	SDGs
1	2	3
1.	Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan Tujuan 2. Tanpa Kelaparan Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

No	MDGs	SDGs
1	2	3
2.	Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua	Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas
3.	Tujuan 3. Mendorong Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tujuan 5. Kestaraan Gender
4.	Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak	Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
5.	Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu	
6.	Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.	
7.	Tujuan 7. Pelestarian Lingkungan	Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 14. Ekosistem Lautan Tujuan 15. Ekosistem Daratan
8.	Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan	Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai Tujuan

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan Global, TPB jauh lebih ambisius dengan bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan Global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau dengan istilah sebagai “Zero

Goal". Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). TPB juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 tentang Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB telah bertransformasi menjadi 241 Indikator yang dibagi dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yakni:

1. Pilar Pembangunan Sosial.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Di antara 17 tujuan pada SDGs, ada 4 yang benar-benar tidak ada pada MDGs, yaitu tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), tujuan 11 (masyarakat dan kota yang berkelanjutan), dan tujuan 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat).

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 292/BAPPEDA/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diubah lampirannya kedalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

593/BAPPEDA/2018. Susunan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 Pilar Pembangunan.

Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kalimantan Barat adalah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Keselarasan TPB terhadap RPJMD Tahun 2019-2023

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 merupakan penjabaran operasional dari Prioritas Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" dilakukan melalui Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur; jalan, jembatan, air bersih, energi, pengairan, dan telekomunikasi;
2. Pembangunan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*; peningkatan kapasitas aparatur, percepatan perizinan, pemekaran wilayah, transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangandanaset, penempatan ASN berdasarkan kompetensi;
3. Pembangunan kualitas hidup masyarakat; pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri, pembangunan SMK unggulan minimal 1 per kabupaten/kota, program afirmasi siswa SMA/SMK swasta,

- pembangunan dan modernisasi RS Soedarso, peningkatan dan pengembangan sistem manajemen rumah sakit;
4. Pembangunan kesejahteraan masyarakat; ekonomi, pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan kelautan, sosial, pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi;
 5. Pembangunan ketertiban masyarakat; penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan HAM, pengembangan sistem penanggulangan bencana, peningkatan perlindungan masyarakat, terbangunnya harmonisasi antar kelompok masyarakat;
 6. Pembangunan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, konservasi laut dan hutan.

Prioritas Pembangunan Daerah ini tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023. Perumusan RPJMD 2019-2023 memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan pasca millenium yakni pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam bidang-bidang pembangunan daerah di dalam RPJMD 2019-2023. Dalam dokumen RPJMD 2019-2023, TPB mulai diarusutamakan. Sinergi antara Prioritas Daerah, RPJMD 2019-2023 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Sinergi Prioritas Daerah RPJMD 2019-2023 dan TPB

Tujuan Pembangunan Daerah	RPJMD	TPB
1) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Bab. 6.1.1 Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas	T1 Tanpa Kemiskinan T7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan Pembangunan Daerah	RPJMD	TPB
	infrastruktur daerah serta Perbatasan	T8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi T9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur T12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab T13 Penanganan Perubahan Iklim T14 Ekosistem Lautan T15 Ekosistem Daratan
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	Bab. 6.1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .	T1 Tanpa Kemiskinan T4 Pendidikan Berkualitas T5 Kesenjangan Gender T8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi T9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur T16 Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
3) Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif	Bab. 6.1.3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.	T1 Tanpa Kemiskinan T2 Tanpa Kelaparan T3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera T4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan Pembangunan Daerah	RPJMD	TPB
		T5 Kesetaraan Gender T6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
4) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Bab. 6.1.4. Mewujudkan masyarakat sejahtera	T1 Tanpa Kemiskinan T10 Berkurangnya Kesenjangan T16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh T17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
5) Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib	Bab. 6.1.5. Mewujudkan masyarakat yang tertib	T1 Tanpa Kemiskinan T4 Pendidikan Berkualitas T7 Energi Bersih dan Terjangkau T9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur T10 Berkurangnya Kesenjangan T11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan T16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh T17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan Pembangunan Daerah	RPJMD	TPB
6) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Bab. 6.1.6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.	T6 Air Bersih dan Sanitasi Layak T7 Energi Bersih dan Terjangkau T11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan T12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab T13 Penanganan Perubahan Iklim T14 Ekosistem Lautan T15 Ekosistem Daratan T16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh T17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

1.4. Pembiayaan TPB di Daerah

Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan TPB/SDGs mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah dari masyarakat.

Pembiayaan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat berdasarkan program kegiatan dari masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Barat.

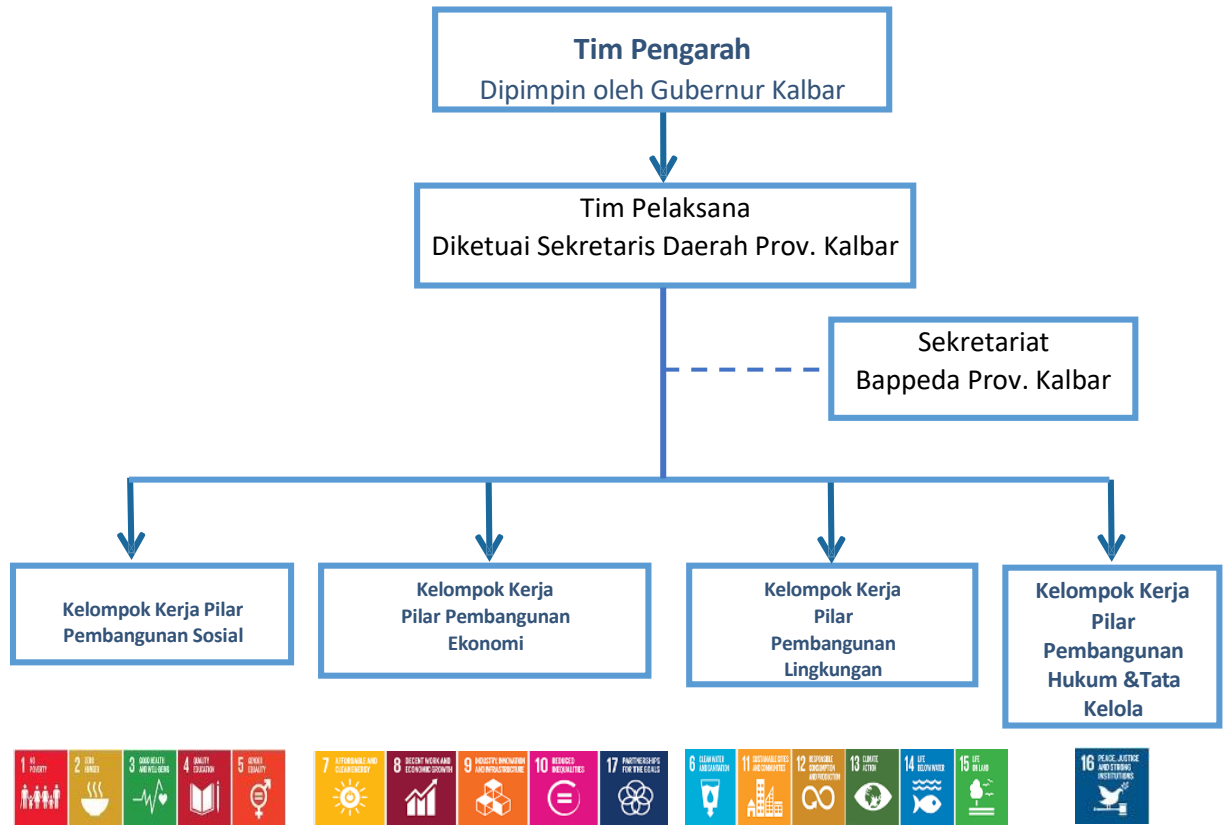
Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah dan masyarakat, kelompok philanthropy, pengusaha, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB

Perpres merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan non-Pemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting. Dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, setiap tahap penyusunan RAD TPB melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan Pilar yang ada di TPB dengan beranggotakan dari empat *platform* pemangku kepentingan, untuk pembuatan RAD TPB tahun 2019-2023 ini, pemerintah provinsi Kalimantan Barat tidak membuat Tim Koordinasi yang baru. Tim Koordinasi Daerah ini sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 593/BAPPEDA/2018; dengan diagram seperti tercantum dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Kalimantan Barat



2. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs yang terbagi dalam dua kali sidang dengan dipimpin oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja. Sidang pertama melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan non-pemerintah yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta filantropi dan pelaku usaha yang terkait dengan isu TPB. Sidang pleno kedua melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
3. Tahap berikutnya adalah beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja setiap Pilar untuk membahas pengisian matriks RAD,

yang terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan non-pemerintah;

4. Selanjutnya, masing-masing kelompok kerja (Pokja) setiap Pilar juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh baseline (basis data) secara series selama lima tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2023;
5. Proses yang sangat penting pula yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui aplikasi antarmuka yaitu Sistem Informasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SITUPEN) yang berisikan informasi TPB di Kalimantan Barat. Lewat aplikasi ini, Tim Pelaksana TPB mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam pelaksanaan RAD dan masyarakat sebagai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan TPB sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik; dan
6. Kemudian dokumen Rancangan Rencana Aksi Daerah TPB dikonsultasikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk mendapatkan umpan balik/masukan dalam dokumen Rancangan Rencana Aksi Daerah TPB untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab Pertama yang berisi pendahuluan menjelaskan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan, bagaimana keselarasan TPB dengan RPJMD serta komitmen Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan TPB. Bab satu ini menjabarkan pula pembiayaan dalam pelaksanaan TPB di Kalimantan Barat. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama serta sistematika dokumen RAD.

Bab Kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat untuk beberapa indikator utama dari setiap tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2023 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB hingga tahun 2023.

Bab Ketiga merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat pada RPJMD 2019-2023 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab Keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB 2019-2023 ini. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagilembagapemerintah dan lembaga non-pemerintah

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang prinsip pelaksanaan TPB, serta penguatan sarana dalam pelaksanaan TPB. Bab

ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB khususnya penyempurnaan RAD serta penyusunan RAD periode selanjutnya sesuai dengan RPJMD 2019-2023 serta keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

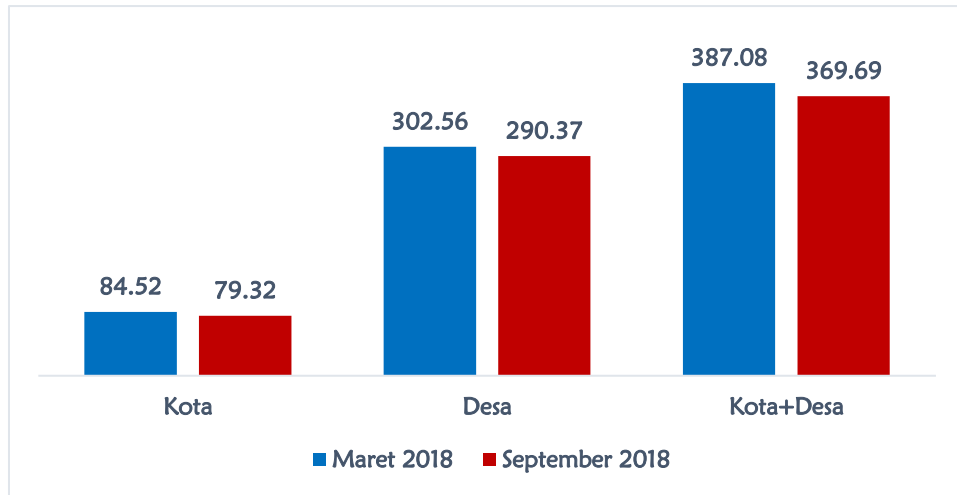
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

2.1.1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi

Provinsi Kalimantan Barat mencatat, Pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Barat sebanyak 369,73 ribu orang (7,37 persen), menurun sebesar 17,35 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 387,08 ribu orang (7,77 persen).

Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat menurut data BPS pada periode Maret 2018 ke September 2018 menunjukkan penurunan, dari 7,77 persen pada Maret 2018 menjadi 7,37 persen pada September 2018 atau turun 0,40 poin. Sejalan dengan hal tersebut, penduduk miskin Kalimantan Barat juga mengalami penurunan dari 387.080 orang pada Maret 2018 menjadi 369.730 orang pada September 2018 (Gambar 1), artinya penduduk miskin di Kalimantan Barat berkurang 17.350 orang.

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Barat (Ribu Jiwa) 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 5,03 persen turun menjadi 4,58 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 9,16 persen turun menjadi 8,84 persen pada September 2018.

Selama periode Maret 2018 – September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 5,16 ribu orang (dari 84,52 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 79,36 ribu orang pada September 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 12,19 ribu orang (dari 302,56 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 290,37 ribu orang pada September 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar 77,97 persen. Berbeda dengan kondisi Maret 2018 yaitu sebesar 78,85 persen.

Tabel 2.1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kalimantan Barat Maret 2018 – September 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (orang)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2018	323.125	100.003	423.128	84.520	5,03
September 2018	331.135	103.335	434.470	79.360	4,58
	Makanan	Non Makanan	Total		
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2018	320.747	81.602	402.349	302.560	9,16
September 2018	326.707	87.099	413.806	290.370	8,84
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2018	321.481	87.805	409.286	387.080	7,77
September 2018	328.115	92.717	420.832	369.730	7,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir terjadi di semua daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh daerah dalam hal mengentaskan kemiskinan. Seperti halnya di Provinsi Kalimantan Barat, permasalahan kemiskinan secara turun temurun menjadi tantangan untuk pengentasannya. Pada RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan 5 Program Prioritas yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat.

Untuk Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Desa sangat tertinggal menjadi Desa Mandiri merupakan program unggulan dimana Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pada tahun 2019 sebanyak 63 Desa mandiri dan Desa Mandiri hingga tahun 2023 ditargetkan 425 Desa Mandiri. Angka kemiskinaan pada akhir tahun 2023 ditargetkan berada pada posisi 5 % dimana pada bulan september tahun 2018 posisi angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat berada pada 7,37%.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Barat untuk menurunkan lagi angka kemiskinan dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun bersama seperti peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan pemenuhan hak-hak dasar, peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha serta meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.2 Sistem Perlindungan Sosial Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 dari Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari dana APBN sebanyak 1.654.898 penerima dan dana APBD sebanyak 154.043 penerima.

Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan program JKN ini adalah masih ada masyarakat miskin yang belum memiliki NIK, sehingga pihak Rumah Sakit yang ditunjuk belum dapat melayani peserta warga yang tidak mampu dan adanya masyarakat yang menunggak pembayaran bulanan serta adanya kekhawatiran masyarakat akan adanya rencana pemerintah akan menaikkan iuran BPJS yang akan diberlakukan pada tahun 2020.

2.1.3 Akses Pelayanan Dasar Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan paling dasar dapat dilihat dari Puskesmas. Jumlah Puskesmas di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 755 buah puskesmas, Poliklinik sebanyak 899 Puskesmas Pembantu dan 277 puskesmas keliling, sehingga buah, Rumah Sakit sebanyak 101 buah, Rumah Sakit Bersalin sebanyak 62 buah.

Tabel 2.2
Jumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Kab/Kota	Rumah Sakit			Rumah Sakit Bersalin		
		2011	2014	2018	2011	2014	2018
1.	Sambas	3	3	3	2	-	-
2.	Bengkayang	2	2	2	1	-	-
3.	Landak	1	1	1	-	-	-
4.	Mempawah	1	1	1	1	-	-
5.	Sanggau	2	3	5	1	2	1
6.	Ketapang	1	2	3	2	2	-
7.	Sintang	1	2	3	3	2	-
8.	Kapuas Hulu	1	3	3	1	-	-
9.	Sekadau	1	2	1	-	1	-
10.	Melawi	2	1	2	1	-	-
11.	Kubu Raya	2	3	2	3	4	2
12.	Kayong Utara	1	-	1	1		-
13.	Kota Pontianak	6	9	9	13	7	6
14.	Kota Singkawang	3	3	3	4	-	-

No	Kab/Kota	Rumah Sakit			Rumah Sakit Bersalin		
		2011	2014	2018	2011	2014	2018
	Kalimantan Barat	27	35	39	33	18	11

Sumber : Kalbar Dalam Angka, 2018

Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani dipuskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa penduduk, rasio tersebut di Provinsi Kalimantan Barat 30.000 jiwa penduduk Provinsi Kalimantan Barat sudah dapat melayani 3 puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk. Dengan demikian di Provinsi Kalimantan Barat saat ini masalah sarana puskesmas belum tercukupi.

Tabel 2.3
Jumlah Poliklinik dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Kab/Kota	Poliklinik			Puskesmas		
		2011	2014	2018	2011	2014	2018
1.	Sambas	2	-	6	27	27	28
2.	Bengkayang	2		2	17	17	17
3.	Landak	2	13	5	16	16	16
4.	Mempawah	3		6	14	14	14
5.	Sanggau	8	10	10	18	19	20
6.	Ketapang	8	11	16	24	29	27
7.	Sintang	3	12	13	21	22	24
8.	Kapuas Hulu	1	6	5	23	24	24
9.	Sekadau	-	4	4	11	14	13
10.	Melawi	1		3	10	14	13
11.	Kubu Raya	5	11	9	19	21	22
12.	Kayong Utara	1	2	1	7	9	10

No	Kab/Kota	Poliklinik			Puskesmas		
		2011	2014	2018	2011	2014	2018
13.	Kota Pontianak	12	11	12	20	21	21
14	Kota Singkawang	3	1	6	6	11	15
Kalimantan Barat		51	81	98	233	258	264

Sumber :Kalbar dalam angka, 2018

Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani di puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa penduduk, rasio tersebut di Provinsi Kalimantan Barat 30.000 jiwa penduduk Provinsi Kalimantan Barat sudah dapat melayani 3 puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk. Dengan demikian di Provinsi Kalimantan Barat saat ini masalah sarana puskesmas belum tercukupi

Untuk Pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah usia sekolah tingkat tertentu dan juga menunjukkan daya serap sekolah mengalami kenaikan dimana pada jenjang sekolah dasar, semakin tinggi akses penduduk suatu sekolah semakin tinggi nilai APM, APM Kalbar menunjukkan tren kemajuan dari tahun 2013 sampai 2018 walau pergerakannya hanya sedikit. Tahun 2017 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 99,60 %, meningkat 0,40 point dari nilai tahun 2016, APM SLTP/MTs/Paket B tahun 2017 mencapai 75,04 % atau meningkat sebesar 3,16 % dari tahun 2016 sebesar 71,88 %, Disamping itu APM SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2017 mencapai 57,88 % meningkat 2,88 point bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 55,60 %.

Tabel 2.4
Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni(%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI/Paket A	99,04	99,13	99,18	99,26	99,60	99,72 *
SLTP/MTs/Paket B	66,59	70,81	71,79	71,88	75,04	75,80 *
SLTA/MA/Paket C	52,67	55,10	55,48	55,60	55,88	56,20 *

Sumber :RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa peningkatan yang cukup signifikan disetiap jenjang pendidikan diharapkan mampu membuat seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah dan menamatkan hingga SLTA, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni disetiap jenjang pendidikan.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2.1. Menghilangkan Kelaparan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan. Namun selama tahun 2011 – 2016 asupan kalori penduduk Kalimantan Barat berkisar 1.557,64 kkal/kapita/hari pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2016 asupan kalori mencapai 1.955,19 kkal/kapita/hari, sehingga dapat dikatakan rata-rata konsumsi energi penduduk total wilayah Kalimantan Barat tahun 2016 telah mendekati angka target anjurannya (sebesar 2000 kkal/kap/hari), yaitu 97,76 % Angka Kecukupan Energi (AKE) (1.955,19 kkal/kap/hari). Sumber Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar

Bila mengacu pada standar Departemen Kesehatan tahun 1996, maka konsumsi energi penduduk kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016, walaupun telah melampaui anjuran kecukupan energi, namun tingkat konsumsi energinya masih tergolong normal (antara 94,6-118,4%). Sumber Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar.

Konsumsi energinya masih tergolong rendah: penduduk sehingga perlu ditingkat konsumsi energinya bahkan perlu diupayakan serta diperbaiki kualitas konsumsinya menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman.

Sedangkan dari sisi keragaman belum memenuhi kaidah beragam, bergizi dan berimbang dan masih didominasi kelompok padi-padian, dengan kontribusi antara 53–60% AKE dan capaian skor mutu pangan berkisar antara 74,4–86,4. Capaian skor mutu pangannya sebesar 82,8, dimana kontribusi padi-padiannya terhadap total konsumsi energi mencapai 60%, sedangkan anjuran konsumsi padi-padian adalah 50% AKE. (Sumber Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kalbar.)

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman adalah : (1) keterbatasan kemampuan ekonomi; (2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi; (3) keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi); (4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan

aman, serta (7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan daerah Kalimantan Barat pada tahun 2016 mencapai Rp. 906.953,- dimana 56,36 persen ternyata dihabiskan untuk pembelanjaan kelompok makanan, sehingga sekitar 43,64 persen saja teralokasi untuk pengeluaran golongan non makanan.

2.2.2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Adapun sasaran pokok untuk meningkatkan status gizi masyarakat adalah menurunnya prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita dari 19,6 persen menjadi 17,0 persen, menurunnya prevalensi anak kurus (wasting) dari 12 persen menjadi 9,5 persen, menurunnya prevalensi anak pendek dan sangat pendek (stunting) dari 32,9 persen menjadi 28,0 persen, menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil dari 37 persen menjadi 26,0 persen dan menurunnya prevalensi Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dari 10,2 persen menjadi 8,0 persen (Kemenkes RI, 2015). Didalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (2015-2019), kegiatan perbaikan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan gizi masyarakat dengan sasaran program pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian PMT pada ibu hamil KEK mencapai 95,0 persen
2. Pemberian ASI Eksklusif mencapai 50,0 persen
3. Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama kehamilan mencapai 98 persen
4. Balita kurus yang mendapat makanan tambahan mencapai 90,0 persen.

5. Bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sekitar 50 persen
6. Remaja Putri mendapat Tablet Tambahan Darah mencapai 30 persen (Kemenkes RI, 2015)

Secara umum berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013, angka prevalensi anak balita stunting di Kalbar adalah 38,6 persen. Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Konsep ketahanan pangan dan gizi yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Sustainable Development Goals (SDGs) bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. United Nation Development Programme (UNDP) sebagai lembaga PBB yang berkompeten memantau pelaksanaan SDGs telah menetapkan dua ukuran kelaparan, yaitu jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga di bawah kebutuhan hidup sehat dan proporsi anak balita yang menderita gizi kurang. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa SDGs lebih menekankan dampak daripada masukan. Oleh karena itu, analisis situasi ketahanan pangan harus dimulai dari evaluasi status gizi masyarakat diikuti dengan tingkat konsumsi, persediaan dan produksi pangan; bukan sebaliknya. Status gizi masyarakat yang baik ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi kurang. Keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan akses pangan dan pelayanan sosial yang merata dan cukup baik. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak.

Pada kondisi sekarang yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan), yang masih terdapat pada usia anak balita mencapai 8,04 persen pada tahun 2018. Demikian juga pada tahun 2013 obesitas untuk anak usia sekolah dan remaja mencapai 21,5 persen, kemudian menurun pada tahun 2018 mencapai 19,17 persen (Sumber RISKESDES 2018). Melihat persentase yang relative masih tinggi, maka masalah gizi, saat ini Kalbar menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH. Adapun skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Pada tahun 2015 kualitas konsumsi pangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 77,8 persen dan Skor PPH mencapai 82,8 persen (Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan). Pengetahuan pangan dan gizi masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang (B2SA) masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh Pola Pangan yang belum seimbangan pola permintaan pangan rumah tangga yang belum berkualitas.

2.2.3. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.

Selama periode 2013-2017 pertumbuhan produksi padi meningkat sebesar 1,29 persen per tahun dengan rata-rata produksi 1.390.270 Ton, Sedangkan produksi tahun 2017 mencapai 1.501.548 Ton. Sementara produksi Jagung pada tahun 2017 mencapai 138.497 Ton dengan rata-rata produksi per tahun selama lima tahun terakhir mencapai 130.261 Ton, namun pertumbuhannya negatif sebesar 1,83 persen, kondisi ini dikarenakan pada tahun 2013

produksi Jagung di Kalbar bisa mencapai 159.982 Ton. Demikian juga untuk komoditi kacang Kedele mengalami pertumbuhan negatif selama lima tahun terakhir sebesar 2,14 persen per tahun.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, produksi pangan sumber Protein hewan asal ternak seperti daging ayam terus meningkat selama lima tahun terakhir sebesar 0,68 persen per tahun dengan rata-rata produksi 46.643 Ton per tahun. Adapun produksi daging sapi rata-rata per tahun sebesar 6.093 ton namun pertumbuhannya negatif sebesar 3,05 persen per tahun. Demikian juga dengan daging kambing, produksinya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 19,99 persen dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata produksi 15.334 ton per tahun. Di lain pihak produksi daging babi mengalami pertumbuhan positif sebesar 31,6 persen pertahun dengan rata-rata produksi sebesar 12.344 ton pertahun.

Untuk sumber protein hewani yang berasal dari perikanan tangkap, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat produksinya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan selama periode tahun 2013-2017 yaitu sebesar 2,77 persen dengan rata-rata produksi 51.302 ton pertahun. Namun untuk produksi Ikan Tangkap pertumbuhan negatif sebesar 0,97 persen dengan rata-rata produksi per tahun sebesar 169.311 ton.

Permasalahan daerah Kalimantan Barat dalam penyediaan pangan diantaranya : (1) Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah akibat konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi pemasaran akibat terhambatnya distribusi dan akses pangan; (3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan sebagian masyarakat karena pola pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. Yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, keterbatasan

pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi.; (4) Usaha pertanian masih didominasi oleh usaha pertanian skala kecil, sedangkan usaha pertanian skala besar masih sangat terbatas. (Sumber Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar)

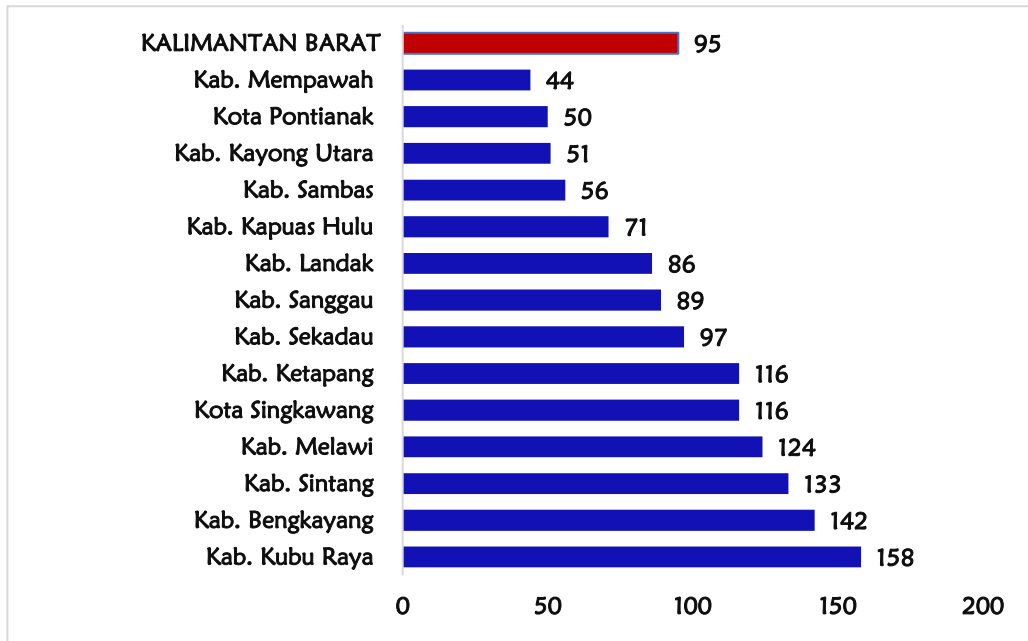
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.3.1 Mengurangi Angka kematian Ibu (AKI)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dengan penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran serta peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan sebesar 2,3% dari 82,5% (2017) menjadi 84,8% (2018).

Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yaitu sebesar 95 Kasus kematian ibu per 100.000 KH, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 yang sebesar 98 per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu Maternal terbesar ada di Kabupaten Kubu Raya, yaitu sebesar 158 per 100.000 KH dan yang terkecil ada di Kabupaten Mempawah, yaitu sebesar 44 Per 100.000 Kelahiran Hidup.

Gambar 2.2
Angka Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Kasus tercatat Tahun 2018



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

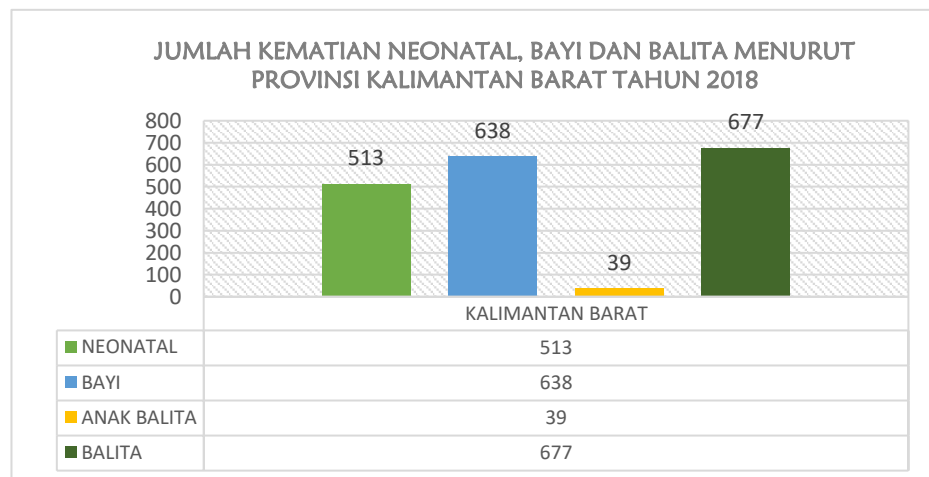
Dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas sarana prasarana kesehatan diharapkan mampu untuk menekan Angka Kematian Ibu. Peningkatan kesadaran pada ibu hamil dan pelatihan-pelatihan mengenai pentingnya menjaga kesehatan merupakan upaya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam RPJMD 2018-2023 juga ikut andil dalam mengurangi Angka Kematian Ibu ini dengan menargetkan pada Tahun 2023 angka kematian ibu dapat ditekan ke angka 91/100.000 kelahiran hidup.

Namun yang menjadi tantangan Kalimantan Barat dalam hal ini adalah pada (1). peningkatan kesadaran Ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan pada saat hamil; (2) peningkatan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil. Dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas sarana prasarana kesehatan diharapkan mampu untuk menekan Angka Kematian Ibu.

2.3.2 Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita

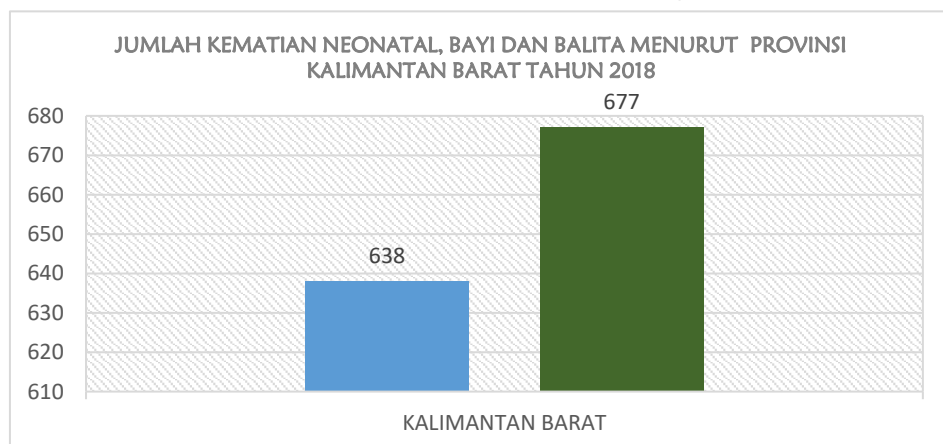
Dalam dokumen Profil Kesehatan Kalimantan Barat Tahun 2018, Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 tercatat sebesar 638 kasus dengan 90.913 KH di tahun 2018. Sehingga jika dihitung angka kematian bayinya adalah 7 per 1000 KH.

Gambar 2.3
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Gambar 2.4
Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

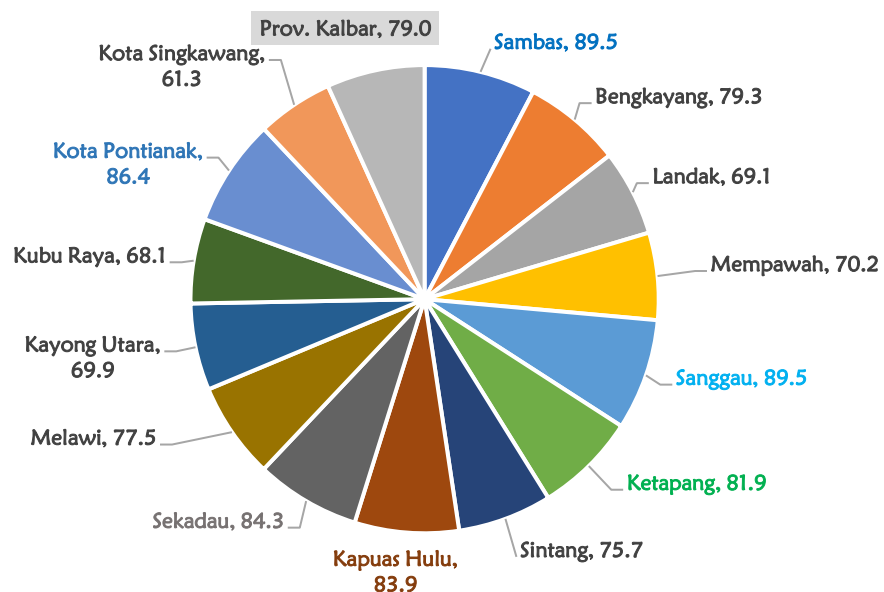


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Sementara itu, untuk Angka Kematian Balita (AKABa) jika dilihat kasus kematian Balita yang terjadi tahun 2018 berdasarkan laporan seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 pada gambar diatas, tercatat sebanyak 677 Kasus. Sehingga jika dihitung berdasarkan kasus yang terjadi dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 90.913, maka Angka Kematian Balita(AKABa) di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 adalah sebesar 7,4 per 1.000 KH.

Sedangkan Angka Kematian Neonatal (AKN) pada tahun 2018 sebesar 513 kasus mengalami penurunan sebesar 0,88% di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 580 kasus pada tahun 2017, dan dari data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa baru sebanyak 42,9% Kabupaten/Kota yang cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 80%.

Gambar 2.5
Persentase Imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HIB, Polio, Campak, dan
Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018



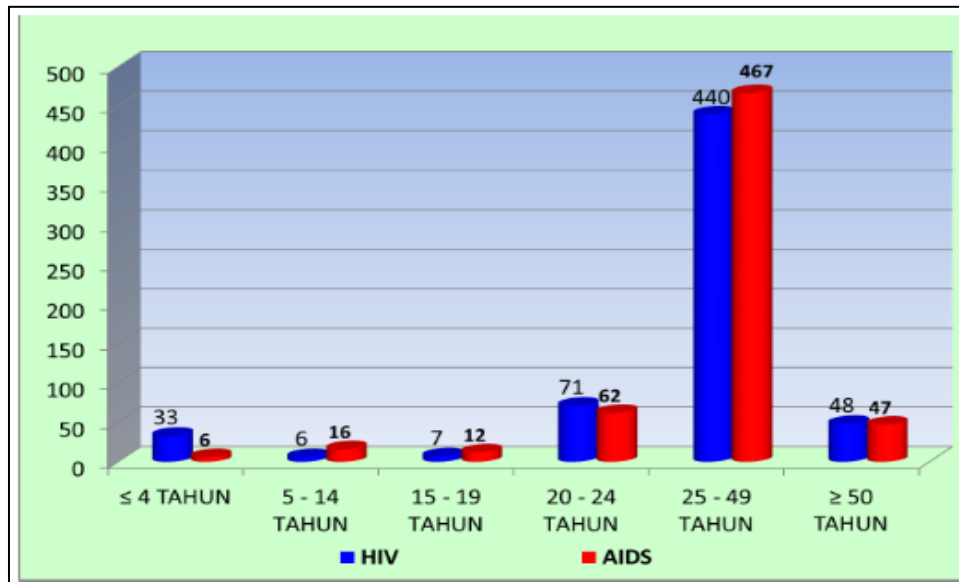
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (diolah)

Hal sama juga yang menjadi tantangan terhadap penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kalimantan Barat dalam hal ini adalah pada (1) peningkatan kesadaran Ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan pada masa kehamilan; (2) Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; (3) Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama berkaitan dengan imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum; serta (4) Meningkatkan Peran Posyandu.

2.3.3. Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular

Dari data yang diperoleh dari profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, tercatat jumlah kasus baru kejadian Tuberkulosis (TB) BTA+di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2018 sebanyak 4.444 kasus. Sedangkan persentase kesembuhan penderita TB Paru dengan BTA Positif (BTA+) di Kalimantan Barat sebesar 89,3%, dengan rincian dari 3.709 penderita yang diobati terdapat 3.312 penderita yang sembuh. Angka Kesakitan Malaria dalam bentuk Anual Parasite Incidence (API) di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2016 sebesar 0,02 per 1000 penduduk atau 2 per 100.000 penduduk. Untuk jumlah Kasus HIV yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dari data yang diambil pada profil kesehatan provinsi kalimantan barat tahun 2018 sebesar 605 kasus, sedangkan kasus AIDS sebesar 610 kasus, dengan kematian akibat AIDS sebanyak 7 orang.

Gambar 2.6
Distribusi Kasus HIV AIDS Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2018

Tantangan dalam penanggulangan atau mengakhiri epidemi penyakit menular di Kalimantan Barat yaitu (1) perluasan pemeriksaan TB dan HIV AIDS ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru; (2) bagaimana meningkatkan pengetahuan setiap lapisan masyarakat terhadap pencegahan berbagai penyakit menular serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani pola hidup sehat.

2.3.4 Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Jumlah penderita Obesitas di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 menurut data Profil Kesehatan 2018 sebanyak 20,22% dari penduduk yang melakukan pemeriksaan atau sebanyak 66.055orang. Jumlah penderita Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 21,29% dari penduduk yang melakukan pemeriksaanatau sebanyak 141.651 orang. Adapaun

jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) sebesar 4,3% penduduk yang melakukan pemeriksaan atau sebanyak 5.388 orang. Sedangkan untuk mengetahui penderita IVA Positif dan tumor payudara tahun 2018, dilakukan pemeriksaan leher rahim dan payudara pada 9.033 orang atau sekitar 1,35% dari jumlah perempuan usia 20-50 Tahun di Provinsi Kalimantan Barat. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 295 (3,27%) orang diantaranya IVA Positif dan 95 orang terdapat tumor/benjolan atau sebanyak 1,05% orang yang melakukan pemeriksaan.

Upaya menurunkan jumlah kejadian penyakit-penyakit di Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melakukan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi masih menghadapi tantangan, antara lain(1) Peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular; (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitasi layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah Penyakit tidak menular.

2.3.5 Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, terdapat 912.530 Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Kalimantan Barat dengandengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 654.425 (71,7%) pasangan. Adapun jumlah persentase peserta KB Baru sebesar 90.046 (9.9%) pasangan. Untuk melihat lebih rinci jumlah maupun persentase peserta KB aktif dengan penggunaan alat kontrasepsi pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.5
Persentase Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2018

Metode Kontrasepsi	Jumlah	Persentase
IUD	41.931	6,4 %.
MOW	13.845	2,1 %
MOP	3.731	0,6 %
Implan	51.970	7,9 %
Suntik	302.544	46,2 %
Kondom	14.171	2,2 %
Pil	226.233	34,4%
Persentase Peserta PUS Metode Konsepsi Jangka Panjang	111.477	17,0 %

Sumber: Profil Kesehatan Kalimantan Barat, Tahun 2018 (diolah)

Tantangan Kalimantan Barat dalam mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi kedepan yaitu pada peningkatan layanan reproduksi bagi ibu dan remaja.

2.3.6 Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Dalam upaya meningkatkan cakupan kesehatan yang merata kepada seluruh masyarakat, Jumlah penduduk di Kalimantan Barat yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus bertambah. Berdasarkan data dari dokumen Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari dana APBN sebanyak 1.430.363 penerima dan dari dana APBD sebanyak 221.457 penerima. Untuk Jumlah Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) dibagi menjadi Pekerja Penerima Upah sebanyak 764.071, Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak 660.984 dan Bukan Pekerja sebanyak 70.794 sehingga total penerima sebanyak

3.286.256 atau 65,70 % dari Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5.001.664 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Data Peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat
per Jenis Kepesertaan per Desember 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta PBI		Jumlah Peserta Bukan PBI			
	APBN	Apbd	Pekerja Penerima Upah (PPU)	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	Bukan Pekerja (BP)	Jumlah Peserta
	Jamkesmas	Jamkesda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Sambas	139.639	23.421	52.649	112.621	4.602	332.932
Kabupaten Bengkayang	74.179	16.906	29.854	37.038	1.876	159.853
Kabupaten Landak	195.116	8.903	29.875	32.068	2.309	268.271
Kabupaten Mempawah	88.404	23.206	31.029	24.176	4.826	171.641
Kabupaten Sanggau	65.896	13.500	61.432	44.708	4.263	189.799
Kabupaten ketapang	139.144	17.512	126.953	70.505	4.807	358.921
Kabupaten Sintang	139.908	10.951	68.964	51.346	3.617	274.786
Kabupaten Kapuas Hulu	81.250	9.395	42.225	26.630	2.572	162.072
Kabupaten Sekadau	56.780	2.955	30.669	19.536	1.046	110.986
Kabupaten Melawi	64.961	10.000	23.052	18.256	1.267	117.536

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta PBI		Jumlah Peserta Bukan PBI			
	APBN	Apbd	Pekerja Penerima Upah (PPU)	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	Bukan Pekerja (BP)	Jumlah Peserta
	Jamkesmas	Jamkesda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Kayong Utara	45.365	39.318	10.228	6.224	393	101.528
Kabupaten Kubu Raya	195.096	10.770	92.582	52.628	3.957	355.033
Kota Pontianak	91.514	16.189	264.753	120.244	28.415	521.115
Kota Singkawang	53.111	18.431	38.393	45.004	6.844	161.783
Kalimantan Barat	1.430.363	221.457	902.658	660.984	70.794	3.286.256

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019

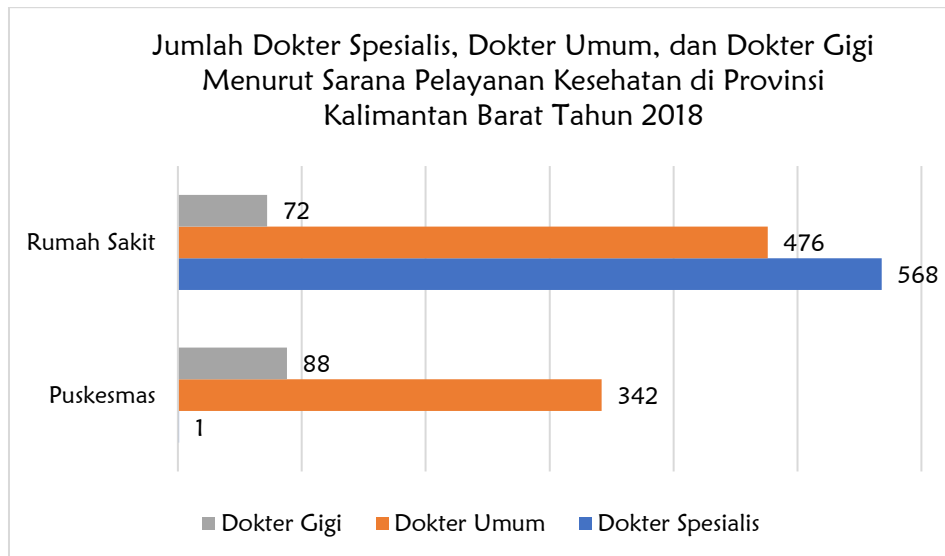
Dengan demikian, tantangan Kalimantan Barat terhadap cakupan kesehatan universal kedepan yaitu pada peningkatan cakupan kepesertaan layanan Jaminan Kesehatan atau BPJS.

2.3.7 Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin

Dalam pembangunan kesehatan, faktor penggerak utamanya adalah sumber daya manusia. SDM kesehatan yang berkualitas menentukan keberhasilan dari seluruh proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan data dari Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2019 terkait SDM Kesehatan, untuk persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja sebagian besar dokter umum tersebar di Rumah Sakit sebanyak 476 orang dan berada di Puskesmas yaitu sebanyak 342 orang dokter umum, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

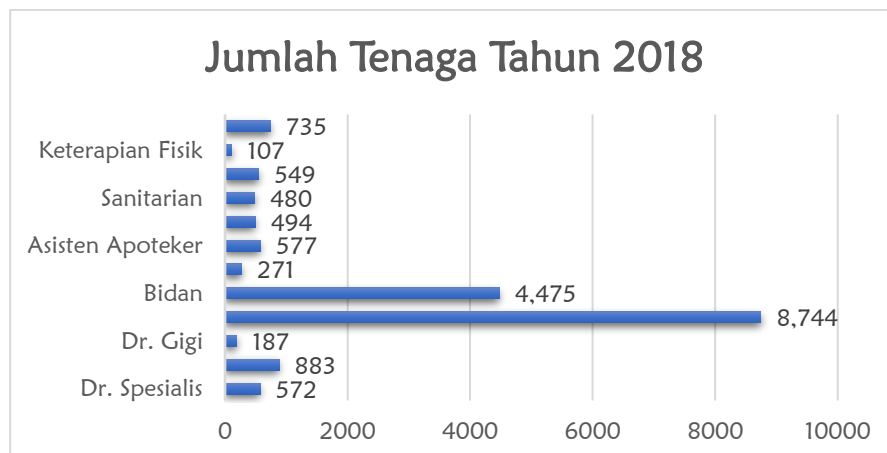
Gambar 2.7
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



Sumber : Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2019

Selanjutnya dapat dilihat jumlah tenaga kesehatan menurut jenisnya di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 antara lain:

Gambar 2.8
Jumlah tenaga Kesehatan menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



Σ Penduduk Tahun 2018: 5.001.664

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Dari gambar diatas, berdasarkan jumlah tenaga kesehatan menurut jenisnya, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 di Kalimantan Barat terdapat 572 dokter spesialis. Ini artinya satu orang tenaga dokter spesialis menangani 8.744 penduduk.

Namun untuk dokter umum, standar pemenuhan rasio dokter dan penduduk belum terpenuhi. Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas, di tahun 2018 terdapat sebanyak 833 dokter umum di Provinsi Kalimantan Barat. Ini berarti 1 orang dokter umum menangani 6.004 penduduk. Sedangkan menurut standar berdasarkan Permenkes 33 Tahun 2015, 1 orang dokter umum melayani sekitar 2.222 penduduk. Untuk mencapai target rasio tersebut Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan sekitar 1.418 dokter umum.

Demikian pula untuk dokter gigi, dari data diatas terlihat bahwa satu orang dokter gigi menangani 26.747 penduduk, sedangkan menurut standar satu orang dokter gigi seharusnya menangani sekitar 7.692 penduduk. Untuk memenuhi standar tersebut, Provinsi Kalimantan Barat masih memerlukan sekitar 463 dokter gigi lagi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, yang menjadi tantangan Kalimantan Barat terhadap pemerataan distribusi tenaga kesehatan, yaitu pemenuhan standar ketersediaan tenaga kesehatan dokter umum maupun dokter gigi dan pendistribusiannya.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

2.4.1. Partisipasi Pendidikan Penduduk Kalimantan Barat

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) per jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi pada semua jenjang

Pendidikan dasar maupun menengah pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Dari data menunjukkan untuk jenjang SD/MI/Paket C pada tahun 2015 sebesar 114,82%, dan terjadi penurunan untuk tahun 2016 menjadi 113,75 dan kembali naik pada tahun 2017 sebesar 115,05. Demikian juga halnya untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, untuk tahun 2015 sebesar 82,3% dan mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 79,79 dan kembali naik pada tahun 2017 sebesar 81,20.

Sedangkan untuk jenjang Pendidikan menengah juga mengalami hal yang sama dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Berikut data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2015 sebesar 81,88%, mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 87,00 dan kembali turun pada tahun 2017 sebesar 81,20.

Tabel 2.7
Kondisi Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan Kalimantan Barat Tahun 2015-2017

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI/Paket A	110.61	113.75	114.82	113.75	115.05
APK SMP/Mts/Paket B	75.68	80.15	82.3	79.79	81.20
APK SM/SMK/MA/Paket C	59.02	65.72	81.88	87.00	82.48

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Data Angka melek Huruf di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang melek huruf sebesar 93,25%. Sementara untuk Angka melek huruf per Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.1.b di bawah ini. Dari table tersebut menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki tingkat angka melek huruf tertinggi sebesar 96,94 sementara Kabupaten dan Kota

yang masih memiliki angka terendah adalah Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah sebesar 90,58.

Tabel 2.8 Angka Melek Huruf
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Melek Huruf

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf (Persen)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Barat	89.84	85.83	91.69	92.22	92.75	93.15	91.81	93.28	93.25
Sambas	89.72	86.99	90.15	91.9	92.55	92.04	92.1	94.44	93.09
Bengkayang	88.71	84.06	91.68	91.06	92.62	92.76	89.14	91.1	92.26
Landak	90.63	86.05	91.01	94.81	94.84	95.95	92.75	91.84	92.87
Mempawah	88.15	85.64	90.97	90.94	93.45	93.45	90.12	91.53	90.9
Sanggau	89.35	84.68	91.28	91.41	92.81	93.83	92.44	93.61	93.12
Ketapang	88.46	85.75	89.67	91.83	91.72	92.89	91.38	94.21	94.66
Sintang	89.39	85.94	91.84	90.5	91.41	92.27	88.58	91.74	91.23
Kapuas Hulu	92.78	87.18	90.47	93.76	92.9	92.55	93.84	92.33	93.65
Sekadau	88.27	84.68	88.46	92.54	93.35	92.83	92.48	94.03	95.14
Melawi	91.49	81.03	87.59	90.91	87.8	90.09	88.14	90.06	91.06
Kayong Utara	-	-	91.24	87.95	90.45	91.27	88.93	88.16	90.58
Kubu Raya	85.48	83.74	95.49	90.5	89.91	90.22	93.67	92.84	92.56
Kota Pontianak	93.51	91.21	90.79	96.13	96.35	95.71	95.99	97.13	96.43
Kota Singkawang	89.52	84.35	91.43	91.62	93.9	94.85	90.38	93.18	92.56

Sumber data : BPS Februari 2019

2.4.2. Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-Laki

Menurut data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Barat 2018, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat untuk Laki-laki sebesar 12,53 tahun dan Perempuan sebesar 12,69 tahun. Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota bervariasi. Dari data 12 kabupaten dan 2 kota. Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang Harapan Lama Sekolahnya sudah cukup tinggi, yaitu untuk laki-laki 15,25 sedangkan untuk yang perempuannya 14,56. Sedangkan untuk Kabupaten yang masih cukup rendah Harapan Lama Sekolahnya

berada di kabupaten Melawi, yaitu untuk laki-laki sebesar 10,94 sedangkan untuk perempuannya masih sebesar 11,40. Selanjutnya Rata-rata Lama Sekolah untuk Laki-laki sebesar 7,61 dan Perempuan sebesar 6,62. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/ kota dari 12 kabupaten dan 2 kota juga masih cukup rendah. Rata-rata Lama Sekolah terendah ada di Kabupaten Kayong Utara, yaitu untuk laki-laki 6,47 dan untuk perempuannya berada pada angka 5,15.

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi kualitas dan kemampuan akademisnya. Salah satu data statistik pendidikan yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan penduduk adalah pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berumur 10 tahun ke atas. Pada Tabel 2.1.1 dapat dilihat persentase penduduk menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Secara keseluruhan gambaran tentang tingkat Pendidikan penduduk di Kalimantan Barat sebagian besar masih belum menamatkan pendidikan SD/ sederajat ke bawah yaitu sebesar 32,16 persen, sebanyak 23,98 yang telah tamat pendidikan SD/ sederajat dan sebanyak 19,35 persen adalah mereka yang telah tamat SLTP/ sederajat, serta selebihnya sebesar 19,08 persen telah tamat pendidikan SMA/SMK sederajat dan sebanyak 5,43 persen yang tamat Akademi/Perguruan Tinggi sederajat.

Dari data tersebut jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk yang telah mengenyam Pendidikan jenjang pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun) masih di dominasi oleh kaum perempuan sebanyak 44,09 persen sedang untuk kaum laki-lakinya 42,63 persen. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017

Nomor	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
1	Tidak tamat SD/Mi	30,96	33,48	32,16
2	SD/MI	23,82	24,15	23,98
3	SMP/Mts	18,81	19,94	19,35
4	SMA/MA/SMK	20,88	17,11	19,08
5	Akademi/Perguruan Tinggi	5,53	5,32	5,43

Sumberdata :Susenas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat 2018

2.4.3. Kemampuan Siswa Kalimantan Barat

Salah satu indikator pembelajaran yang bermutu adalah pencapaian Angka Lulusan (AL) sebesar 100% dari seluruh pesertadidik yang mengikuti ujian akhir pada setiap jenjang Pendidikan masing-masing di tahun bersangkutan. Pada kenyataannya di Kalimantan Barat pada tahun 2017/2018 persentase Angka Lulusan (AL) dan siswa yang memperoleh ijazah/STTB pada jenjang Pendidikan SD baru mencapai 98,89% ,untuk jenjang SMP 89,28% dan untuk Sekolah Menengah baik untuk SMA maupun SMK baru mencapai angka 84,86%. Berdasarkan data dari buku profil Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 diperoleh belum lulus dan tidak memiliki ijazah untuk Jenjang SD masih ada 1,11% dan SMP : 10,72% serta Sekolah Menengah (SMA/SMK) 15,14%.

Tabel 2.10
**Perkembangan Angka Kelulusansiswa SD/MI/Paket A,
 SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/ Paket C di Provinsi Kalimantan**

Jenjang	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	99,78	98,89
SMP/MTs/Paket B	99.87	100,00	99	99,73	89,28
SMA/MA/SMK/Paket C	99.48	99.66	100	98,96	84,86

Sumber data : Renstra Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023

2.4.4. Kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan

Gambaran terkait jumlah guru di setiap jenjang pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Data Keadaan Guru Semua Jenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Wilayah	Total			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kab. Ketapang	6.682	2.431	4.251	4.179	1.4	2.779	1.479	570	909	577	251	326	421	206	215	26	4	22
2	Kab. Sambas	6.453	2.6	3.853	3.775	1.408	2.367	1.582	671	911	651	293	358	438	224	214	7	4	3
3	Kota Pontianak	6.433	2.09	4.343	2.894	658	2.236	1.485	515	970	1.105	465	640	875	430	445	74	22	52
4	Kab. Kuburaya	5.868	2.256	3.612	3.193	1.074	2.119	1.402	606	796	863	371	492	401	200	201	9	5	4
5	Kab. Sintang	5.225	2.095	3.13	3.08	1.181	1.899	1.207	499	708	571	234	337	360	179	181	7	2	5
6	Kab. Sanggau	5.189	2.028	3.161	3.174	1.129	2.045	1.24	524	716	481	224	257	284	149	135	10	2	8
7	Kab. Landak	4.867	2.144	2.723	2.77	1.153	1.617	1.207	576	631	664	310	354	217	102	115	9	3	6
8	Kab. Kapuas Hulu	3.916	1.572	2.344	2.325	930	1.395	1.013	393	620	476	205	271	91	42	49	11	2	9
9	Kab. Bengkayang	3.828	1.494	2.334	2.259	848	1.411	896	379	517	468	184	284	194	81	113	11	2	9
10	Kab. Melawi	3.349	1.51	1.839	1.973	866	1.107	877	412	465	323	154	169	166	78	88	10	0	10
11	Kab. Mempawah	2.892	999	1.893	1.747	580	1.167	637	223	414	308	119	189	189	72	117	11	5	6
12	Kab. Sekadau	2.461	1.163	1.298	1.412	652	760	603	295	308	296	136	160	145	80	65	5	0	5
13	Kota Singkawang	2.367	780	1.587	1.128	284	844	565	186	379	338	138	200	304	164	140	32	8	24
14	Kab. Kayong Utara	1.749	753	996	1.009	443	566	438	170	268	213	105	108	82	33	49	7	2	5
Total	Total	61.279	23.915	37.364	34.918	12.606	22.312	14.631	6.019	8.612	7.334	3.189	4.145	4.167	2.040	2.127	229	61	168

Sumber data :Dapodikdasmen Provinsi Kalimantan Barat 2019

Sedangkan untuk gambaran dan kondisi serta jumlah tenaga guru berkualifikasi serta kompetensi sesuai jenjangnya, di Provinsi Kalimantan Barat juga dapat di lihat berdasarkan table berikut :

Tabel 2.12
Kualifikasi dan Kompetensi Guru Bersertifikasi
Di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2019

Nomor	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Guru		Guru bersertifikasi	
		≥ D4/S-1	< D4/S-1	BELUM	SUDAH
1	PAUD	45,1 %	59,9%	76,2%	23,8%
2	SD	79,2%	20,8%	58,9%	41,1%
3	SMP	89,8%	10,2%	66,2%	33,8%
4	SMA	96,4%	3,6%	69,8%	30,2%
5	SMK	91,9%	8,1%	72,2%	27,8%
6	SLB	84,7%	15,3%	71,4%	28,6%

Sumber Data : Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemdikbud 2020

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

2.5.1. Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan di manapun

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Demi meningkatkan kualitas hidup penduduk dan juga pemerataan penerima manfaat pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan. Tantangannya kendati ini telah menjadi kebijakan dan telah tertuang dalam Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat, tetapi *pengimplementasiannya masih dirasa lambat*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat, Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta Sekretariat Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kalimantan sudah tentu tidak dapat berperan secara optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya jika hanya bekerja ketiga lembaga itu saja. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat lah dibutuhkan. Hal ini belum berjalan secara optimal. Dukungan sepenuhnya pihak lain belum terjadi karena pandangan yang berkembang bahwa PUG hanya menjadi tanggung jawab dari DPPPA. Tantangannya adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa PUG penting dan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi di Provinsi Kalimantan Barat, tentunya harus didukung dengan kebijakan yang responsif gender serta mendukung pemberdayaan perempuan. Di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2018 terdapat 59 regulasi yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdiri atas : 12 Peraturan Daerah, 7 Peraturan Gubernur, 20 Keputusan Gubernur, 2 Surat Edaran Gubernur, 3 Surat Edaran Wakil Gubernur, 12 Kesepakatan Bersama (MoU), 2 Instruksi Gubernur, dan 1 Keputusan Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Barat.

Peluang untuk penerapan PUG sebenarnya terbuka luas dengan adanya payung hukum nasional yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah. Di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, dan aturan-aturan lainnya, dapat memberi payung hukum bagi upaya-upaya pengarusutamaan gender di daerah. Maka dengan adanya payung hukum akan lebih mudah bagi Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

2.5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Perwujudan perlindungan perempuan senantiasa diupayakan, baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan sampai pada tingkat masyarakat. Namun demikian pada kenyataannya, masih saja ditemui berbagai hal yang melanggar hak-hak asasi perempuan. Hak asasi terdiri itu dari hak pribadi, hak reproduksi, hak jaminan perlindungan hukum, hak peradilan, hak politik, serta hak ekonomi.

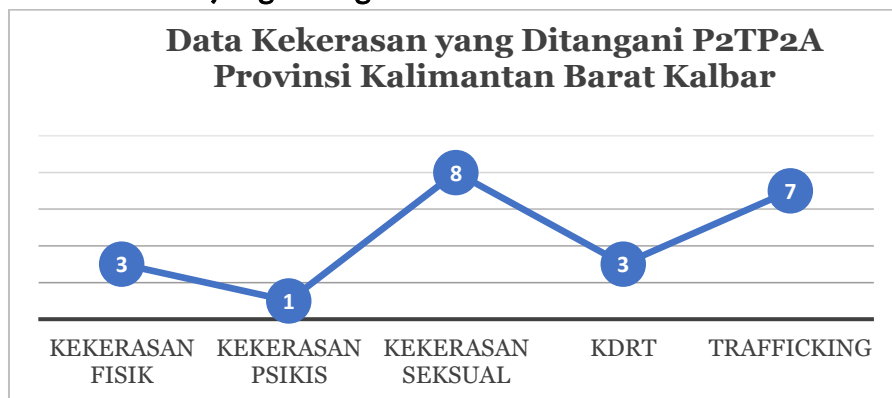
Walaupun sudah ada undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan

seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, serta belum optimalnya layanan yang diberikan terhadap perempuan korban kekerasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah korban dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data P2TP2A-DPPPA Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 dibagi dalam jenis kekerasan yang dilakukan antara lain : kekerasan fisik sebanyak 3 korban, kekerasan psikis sebanyak 1 korban, kekerasan seksual sebanyak 8 korban, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 3 korban, trafficking sebanyak 7 korban.

Gambar 2.9

Data Kekerasan yang ditangani P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menerbitkan berbagai kebijakan yang pada intinya memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan utamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara kejahatan dan kekerasan terhadap

anak atau yang dilakukan oleh anak-anak. (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak).

2.5.3. Menghapuskan Semua Praktik Berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

Keberhasilan pembangunan suatu Negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan juga merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan yang lebih baik.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama. Pembangunan pendidikan harus melihat hal-hal yang menghambat ataupun faktor terjadinya kesenjangan didalam mendapatkan pendidikan seperti faktor budaya/kultur, faktor geografis dan faktor psikologis.

Pendidikan juga merupakan satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan belum terpenuhi sepenuhnya.

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu contoh upaya untuk mendorong terwujudnya perempuan yang berprestasi dan berkualitas yang pada gilirannya diharapkan menjadi mitra sejajar laki-laki dalam setiap sektor pembangunan bangsa. Disadari bahwa kualitas sumberdaya perempuan saat ini pada umumnya masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sebagai salah satu dampak dari sistim pembangunan yang masih belum sepenuhnya memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki.

Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menurut “*The UN guidelines Indicators for Monitoring the Millenium Development Goals*”, angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah absolut murid laki-laki dan perempuan.

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapa usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK sederajat di Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah 79,00 (Kalbar Dalam Angka 2019). Artinya dari 100 anak usia 16-18 tahun yang seharusnya bersekolah di tingkat SMA atau sederajat, baru 79 orang yang mengenyam pendidikan.

2.5.4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat

Salah satu misi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara adalah memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses berpolitik dan jabatan politik. Kesetaraan peran dan partisipasi di sector public terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan akan membantu terwujudnya pembangunan yang berwawasan gender. Yang harus diperhatikan bahwa memahami konsep gender bukan semata-mata persamaan dalam jumlah ataupun kuantitas dalam banyaknya perempuan yang harus sama dengan jumlah laki-laki, tetapi lebih mengarah pada kesetaraan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak pandangan, persepsi dan sikap masyarakat yang apriori dan sinistis apabila melihat perempuan aktif disektor publik, baik pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun swasta secara tidak langsung menyebabkan kaum perempuan menjadi tertinggal dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya peran dan partisipasi perempuan di sector publik.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang masih paternalistik, dimana tokoh-tokoh panutan masih didominasi oleh laki-laki, keadaan ini membuat kaum perempuan harus bekerja keras untuk memasuki ranah publik. Fenomena ini dianggap oleh sebagian orang yang menganut aliran maskulin sebagai hal yang tabu dan tidak layak. Namun tuntutan akan peran yang lebih dari sekedar peran domestik atau pekerja rumahan menjadi hal yang sangat mendasar bagi kaum perempuan. Selain itu, kondisi perekonomian juga memaksa perempuan untuk menjadi pencari nafkah diluar rumah serta merambah ke ranah pekerjaan yang tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Kemajuan pemikiran perempuan dikaitkan dengan paradigma pengarusutamaan gender menjadi salah satu pembangkit motivasi perempuan untuk mengetahui dunia lebih luas. Keberadaan perempuan diranah domestik sudah bergeser. Partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik dapat dilihat pada bidang-

bidang yang memberikan pengaruh yang luas pada kehidupan publik yang meliputi eksekutif, legislatif, yuridis, maupun bidang public lainnya. Keterlibatan perempuan di dalam berbagai aspek sekarang mulai digalakkan dimana dengan adanya keterlibatan perempuan diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam pengambilan kebijakan atau menuntaskan suatu permasalahan.

Mencermati perkembangan politik yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini khususnya di Kalimantan Barat, dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan menunjukkan kearah positif terutama dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif sejak pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 hingga pemilu tahun 2019 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan. Pada periode 2014-2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebesar 10,18 persen atau 57 orang perempuan dari total anggota legislatif sejumlah 560 orang. Hal ini menjadi suatu fenomena yang positif untuk suatu kepercayaan yang lebih besar bagi perempuan di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk periode 2019-2023, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebesar 12,98 persen atau 74 orang perempuan dari total anggota legislatif sejumlah 570 orang.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Tabel 2.13

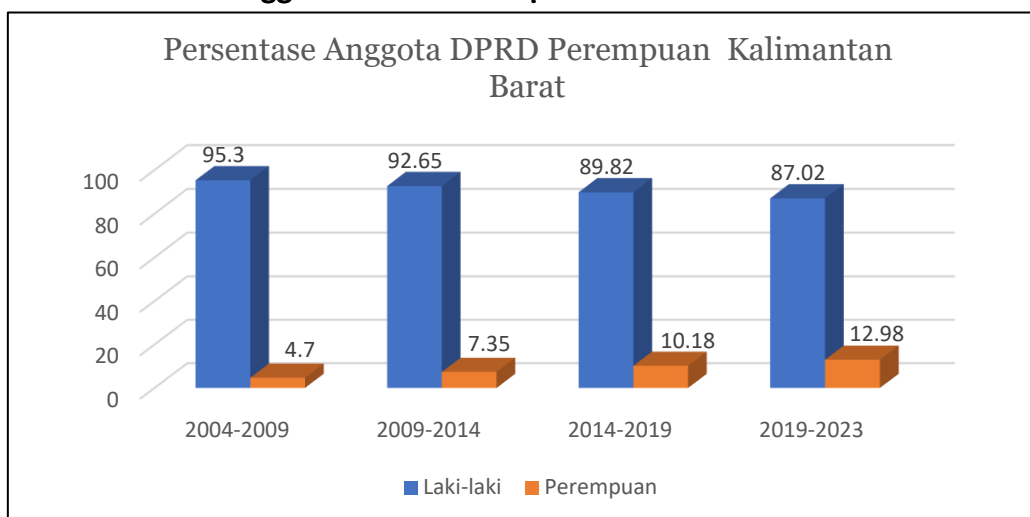
Persentase Anggota DPRD Perempuan Kalimantan Barat

Anggota Legislatif	Periode 2004-2009	Periode 2009-2014	Periode 2014-2019	Periode 2019-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	95,30	92,65	89,82	87,02
Perempuan	4,70	7,35	10,18	12,98

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.10

Persentase Anggota DPRD Perempuan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.14

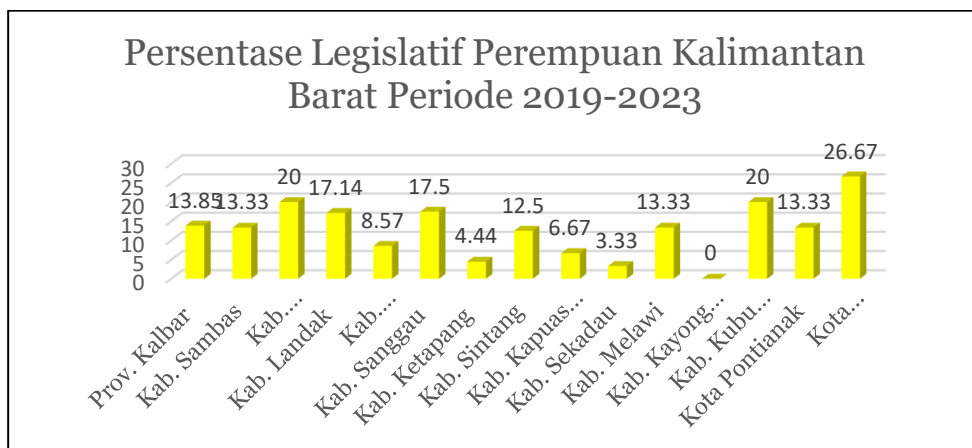
Jumlah Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Periode 2019-2023

DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Terpilih				
	Lk	Pr	Jumlah	(%) Lk	(%) Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prov. Kalbar	56	9	65	86,15	13,85
Kab. Sambas	39	6	45	86,67	13,33
Kab. Bengkayang	24	6	30	80,00	20,00
Kab. Landak	29	6	35	82,86	17,14
Kab. Mempawah	32	3	35	91,43	8,57
Kab. Sanggau	33	7	40	82,50	17,50
Kab. Ketapang	43	2	45	95,56	4,44
Kab. Sintang	35	5	40	87,50	12,50

DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Terpilih				
	Lk	Pr	Jumlah	(%) Lk	(%) Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Kapuas Hulu	28	2	30	93,33	6,67
Kab. Sekadau	29	1	30	96,67	3,33
Kab. Melawi	26	4	30	86,67	13,33
Kab. Kayong Utara	25	0	25	100,00	0,00
Kab. Kubu Raya	36	9	45	80,00	20,00
Kota Pontianak	39	6	45	86,67	13,33
Kota Singkawang	22	8	30	73,33	26,67
Jumlah	496	74	570	87,02	12,98

Sumber : KPU Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.11
Persentase Legislatif Perempuan



Dari data yang tersaji tampak bahwa keterwakilan perempuan di bidang legislatif masih jauh dari harapan. Terutama di Kabupaten Kayong Utara tidak terdapat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Padahal jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-64 tahun) hampir sama dengan penduduk produktif laki-laki dan jumlahnya separuh lebih dari total penduduk. Bila posisi perempuan di legislatif tidak dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang, dimungkinkan kebijakan, program-program pembangunan daerah dan aspirasi perempuan kemungkinan sangat kecil. Sehingga upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender akan semakin berat.

Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif antara lain melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai kuota 30% dengan benar yang diikuti dengan mempersiapkan kader-kader politik perempuan sehingga kemampuannya setara dengan laki-laki, upaya lintas sektor terkait untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi politik perempuan ini dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif untuk periode berikutnya.

Partisipasi di Lembaga Eksekutif

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, kualitas SDM harus terus ditingkatkan, tidak terkecuali kaum perempuan yang secara data jumlahnya hampir sama dengan laki-laki. Data Jumlah Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Prov. Kalbar pada semester II Tahun 2019 adalah 2.639.841 jiwa perempuan dan 2.800.189 jiwa laki-laki yang total keseluruhan penduduk Kalimantan Barat sejumlah 5.440.030 jiwa. Dengan jumlah yang besar, kaum perempuan jelas merupakan potensi yang besar dan strategis untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.

Adapun di Kalimantan Barat pada tahun 2020, dari 14 Kabupaten/Kota terdapat 3 (dua) orang Walikota/Bupati perempuan yaitu Walikota Singkawang, Bupati Mempawah dan Bupati Landak serta 1(satu) orang Wakil Bupati Sambas. Sedangkan untuk jabatan struktural tertinggi di daerah terdapat 2 (dua) orang Sekretaris

Daerah/ Sekda perempuan yakni Sekda Kabupaten Sintang dan Sekda Kabupaten Kayong Utara.

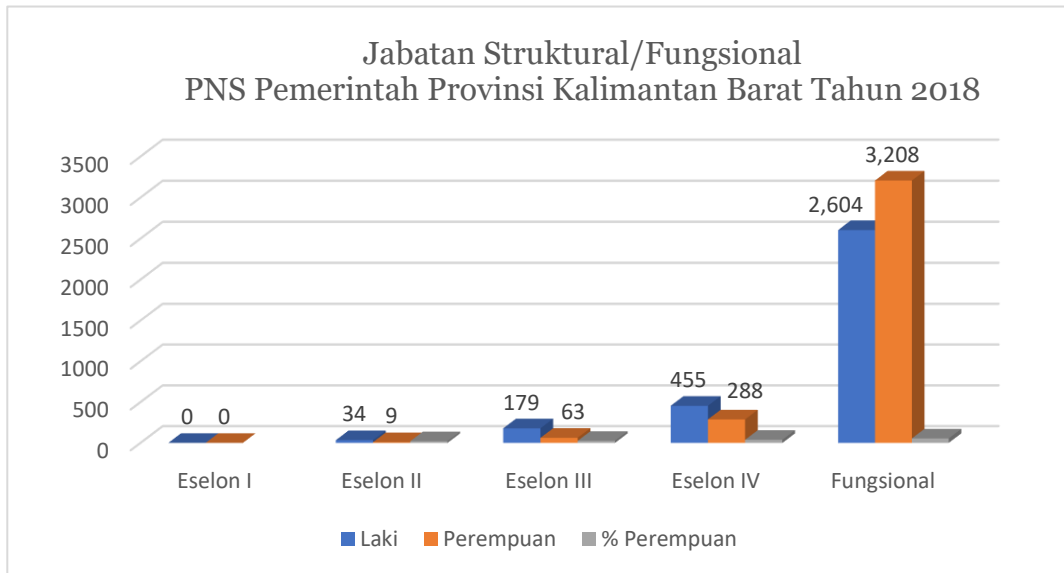
Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam lembaga eksekutif (pemerintahan) ditunjukkan melalui eselonering atau jabatan struktural yang dijabat.

Tabel 2.14
PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2018

Jabatan Struktural/ Fungsional	2017				2018			
	Jenis Kelamin		Jlh	% P	Jenis Kelamin		Jlh	% P
	L	P			L	P		
Eselon I	1	-	1	-	-	-	-	-
Eselon II	43	6	49	12,24	34	9	43	20,93
Eselon III	196	68	264	25,76	179	63	242	26,03
Eselon IV	476	298	774	38,50	455	288	743	38,76
Fungsional	5.215	4.960	10.175	48,75	2.604	3.208	5.812	55,20
Jumlah	5.931	5.332	11.263	47,34	3.272	3.568	6.840	52,16

Sumber : BKD Prov. Kalbar

Gambar 2.12
Jabatan Struktural/Fungsional
PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018



Dari keseluruhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang berjumlah 6.840 orang, terdapat laki-laki sebanyak 3.272 orang (47,84%) dan perempuan sejumlah 3.568 orang (52,16%). Jabatan struktural tersebut dimulai dari eselon yang paling rendah yaitu eselon IV sampai dengan tingkat eselon yang paling tinggi yaitu eselon I. Dalam menduduki posisi strategis sebagai pimpinan atau pengambil keputusan, presentasi perempuan memang masih lebih rendah dari pada laki-laki, namun terus meningkat bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tersebut sesungguhnya sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan persentase keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif sebesar 12,98%.

Sistem pembinaan PNS tentunya tidak bisa disamakan dengan keanggotaan dalam lembaga legislatif, karena memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterwakilan kaum laki-laki ataupun perempuan dalam

birokrasi tidak berdasarkan persentase, tetapi sesuai kompetensi yang mereka miliki. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”.

Perempuan di Kejaksaan

Di Kalimantan Barat terdapat 58 orang jaksa perempuan dan 168 orang jaksa laki-laki, dimana persentase tertinggi jaksa perempuan berada di Kejaksaan Negeri Sambas yaitu 57,14% diikuti Kejaksaan Tinggi Kalbar 37,29 % dan 34,78% di Kejaksaan Negeri Pontianak. Sementara itu tidak terdapat Jaksa Perempuan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong. Perbandingan jaksa perempuan dan jaksa laki-laki di Kejaksaan Tinggi/Negeri menurut daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Kondisi Jaksa di Kejaksaan Tinggi/Negeri Kalimantan Barat Tahun 2017

Unit Kerja	JumlahJaksa		Jumlah	% JaksaPerempuan
	L	P		
Kejaksaan Negeri Kalbar	37	22	59	37,29
Kejaksaan Negeri Pontianak	15	8	23	34,78
Kejaksaan Negeri Singkawang	10	1	11	9,09
Kejaksaan Negeri Mempawah	14	6	20	30,00
Kejaksaan Negeri Sanggau	12	2	14	14,29
Kejaksaan Negeri Sintang	13	1	14	7,14

Unit Kerja	Jumlah Jaksa		Jumlah	% Jaksa Perempuan
	L	P		
Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	11	1	12	8,33
Kejaksaan Negeri Ketapang	11	3	14	21,43
Kejaksaan Negeri Sambas	6	8	14	57,14
Kejaksaan Negeri Bengkayang	10	2	12	16,67
Kejaksaan Negeri Landak	10	2	12	16,67
Kejaksaan Negeri Sekadau	11	1	12	8,33
Cab. Kejari Sambas di Pemangkat	3	1	4	25,00
Cab. Kejari Sanggau di Entikong	5	0	5	0,00
TOTAL	168	58	226	25,66

Sumber :Buku Profil Gender DPPPA Prov. Kalbar Tahun 2018

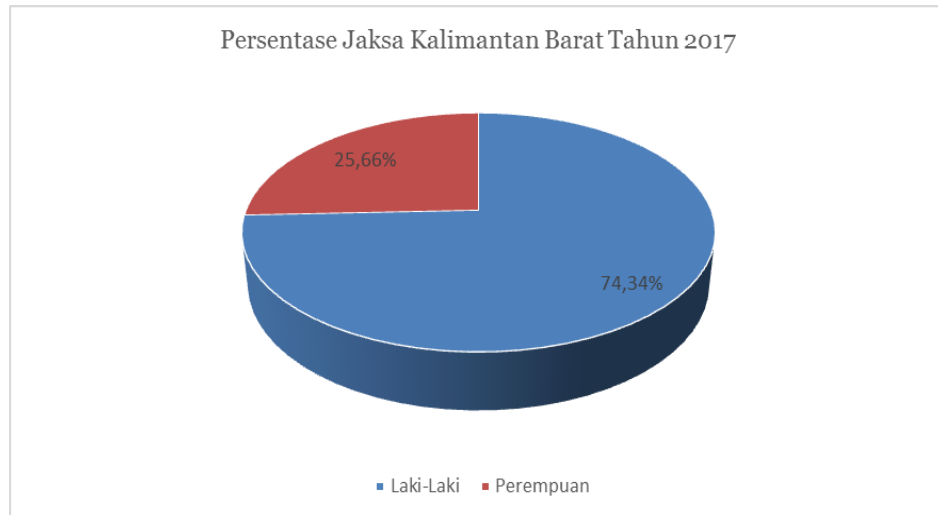
Gambar 2.13

Persentase Jaksa Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota Kalbar Tahun 2017



Sumber :Buku Profil Gender DPPPA Prov. Kalbar Tahun 2018

Gambar 2.14
Persentase Jaksa Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota Kalbar Tahun 2017



Sumber :BukuProfil Gender DPPPAA Prov. KalbarTahun 2018

Kesenjangan persentase jaksa perempuan dan laki-laki merupakan sebuah indikasi dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender. Perlu diperhatikan terkait peranan perempuan sebagai jaksa yang juga berperan dalam pengambilan keputusan. Profesi jaksa ternyata masih didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 74,34 persen sedangkan jaksa perempuan hanya sebanyak 25,66 persen.

Perempuan di Kepolisian

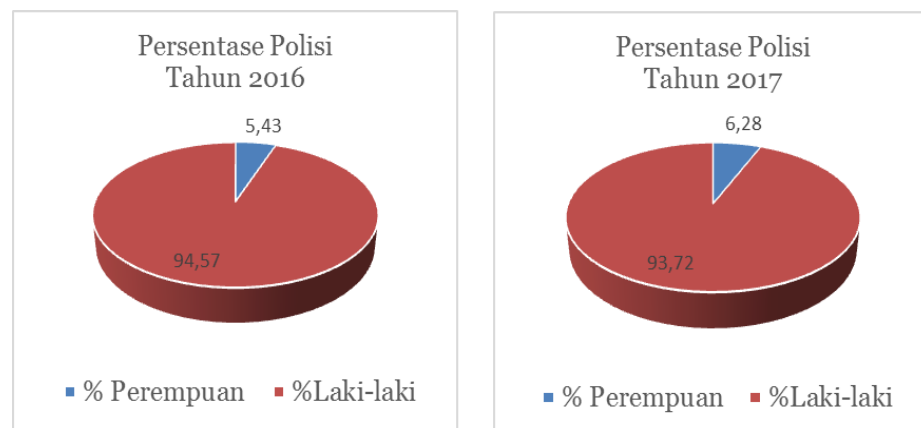
Polisi di Kalimantan Barat tahun 2017 berjumlah 9.853 orang dengan komposisi polisi perempuan 619 orang dan polisi laki-laki 9.234 orang, dimana persentase polisi perempuan hanya sebesar 6,28%. Persentase tertinggi polisi perempuan berada di POLDA Pontianak sebesar 10,30 persen, selanjutnya Polres Singkawang sebesar 7,64 persen dan Polresta Pontianak sebesar 7,64 persen. Sementara itu di Polres Kayong Utara hanya sebesar 1,79 persen.

Tabel 2.16
Persentase Keterwakilan Perempuan di Kepolisian Provinsi Kalbar

Polisi Kalimantan Barat	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tahun 2016	9.333	94,57	536	5,43
Tahun 2017	9.234	93,72	619	6,28

Sumber :BukuProfil Gender DPPPAA Prov. KalbarTahun 2018

Gambar 2.15
Persentase Keterwakilan Perempuan di Kepolisian Provinsi Kalbar



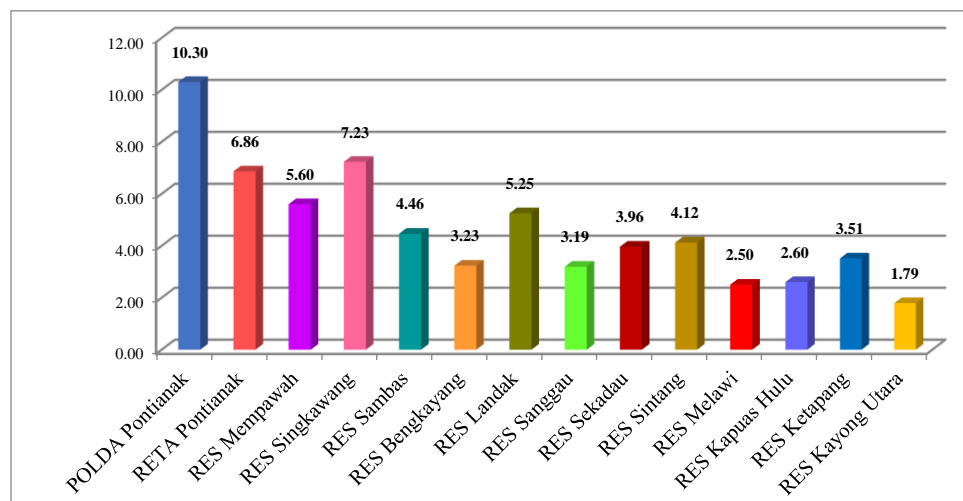
Tabel 2.17
Polisi di Kalbar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 - Tahun 2017

Kepolisian	2016			2017		
	Jenis Kelamin		% Perempuan	Jenis Kelamin		% Perempuan
	P	L		P	L	
1	2	3	4	5	6	7
POLDA Pontianak	218	2.594	7,75	297	2.586	10,30
RETA Pontianak	83	1.254	6,21	86	1.168	6,86
RES Mempawah	26	511	4,84	30	505	5,61
RES Singkawang	38	447	7,84	37	447	7,64
RES Sambas	29	621	4,46	30	603	4,74
RES Bengkayang	16	457	3,38	16	479	3,23
RES Landak	22	409	5,10	22	397	5,25
RES Sanggau	21	620	3,28	20	606	3,19
RES Sekadau	13	306	4,08	13	315	3,96

Kepolisian	2016			2017		
	Jenis Kelamin		% Perempuan	Jenis Kelamin		% Perempuan
	P	L		P	L	
1	2	3	4	5	6	7
RES Sintang	23	527	4,18	22	512	4,12
RES Melawi	8	291	2,68	8	312	2,50
RES Kapuas Hulu	17	573	2,88	15	562	2,60
RES Ketapang	19	537	3,42	19	522	3,51
RES Kayong Utara	3	186	1,59	4	220	1,79

Sumber :BukuProfil Gender DPPPA Prov. KalbarTahun 2018

Gambar 2.16
Persentase Polisi Perempuan di Kalbar Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017



Sumber :BukuProfil Gender DPPPA Prov. KalbarTahun 2018

Perempuan hanya kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi (Parawansa, 2003). Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pada bidang kepolisian masih relative kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai polisi.

2.6. Menjamin ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua

2.6.1. Memuat tentang Menjamin penyediaan akses air minum layak dan terjangkau

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, mengingat air bersih dan sanitasi tidak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa, realitas kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih belum optimal pelayanannya. Pemerintah dalam menyediakan sistem penyediaan air bersih hanya untuk keperluan sehari-hari baik itu untuk mencuci dan mandi, sedang untuk memasak, kebanyakan masyarakat di Kalimantan Barat masih memakai air hujan atau air gallon/kemasan. Air bersih dan sanitasi merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia dalam rangka untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya, mengingat apabila sistem penyediaan air bersih dan sanitasi tidak baik maka akan merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan.

Cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 baru mencapai 55,20 %, kondisi capaian tingkat pelayanan tertinggi di Kota Pontianak yaitu sebesar 75,33% dan untuk tingkat pelayanan terendah pada kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar 28,95%. Tingkat pelayanan air bersih di Kalimantan Barat masih dibawah rata-rata cakupan pelayan nasional yaitu sebesar 73,6%. sehingga ada gap sebesar 18,91%, dan ini menandakan bahwa penyediaan air bersih bukan perkara yang mudah tetapi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.18
Persentase Tingkat Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Provinsi Kalimantan Barat Bersih Tahun 2014 – 2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	54,55	54,57	54,61	54,67	55,20
Kabupaten Sambas	66,86	61,45	62,00	61,50	61,59
Kabupaten Bengkayang	92,65	74,15	74,59	74,34	53,47
Kabupaten Landak	33,54	22,14	22,53	22,34	38,99
Kabupaten Mempawah	34,97	58,90	59,03	59,09	56,89
Kabupaten Sanggau	71,12	71,47	70,99	71,53	61,78
Kabupaten Ketapang	26,93	27,11	27,43	27,18	57,10
Kabupaten Sintang	45,41	46,16	46,33	46,23	37,44
Kabupaten Kapuas Hulu	62,81	42,32	42,33	42,44	28,95
Kabupaten Sekadau	65,01	49,93	50,91	50,26	50,99
Kabupaten Melawi	94,66	71,19	72,45	71,45	45,14
Kabupaten Kayong Utara	93,96	49,04	44,30	49,40	61,07
Kabupaten Kubu Raya	46,55	59,52	59,52	59,56	51,71
Kota Pontianak	63,90	64,04	63,54	64,07	75,55
Kota Singkawang	31,92	62,19	62,20	62,28	73,68

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih di Kalimantan Barat adalah masih terbatasnya kapasitas air baku, dimana penyediaan air baku di Kalimantan Barat masih tergantung pada air Sungai Kapuas, dan apabila tiba musim kemarau panjang (2

bulan tidak hujan) maka sungai kapuas akan menyusut karena debit Sungai Kapuas akan menurun, dan apabila debit Sungai Kapuas menurun maka tekanan air Kapuas juga berkurang sehingga akan mengakibatkan terjadi interupsi air laut dan mengakibatkan air baku sungai Kapuas menjadi asin, karena meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas. Dan bilamana kadar garam tinggi, maka Instalasi Pengolah Air PDAM tidak bisa mengolah, sehingga suplay atau pendistribusian air bersih ke pelanggan/masyarakat akan mengalami gangguan. Selain air baku yang terbatas, tantangan lain adalah kondisi geografis di Kalimantan Barat yang cukup luas, dimana lokasi kawasan perumahan dan permukiman yang menjadi daerah pelayanan relative menyebar dan jauh sehingga tidak efisien dan efektif dalam mempercepat proses pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi penyediaan air bersih kepada masyarakat.

2.6.2. Menjamin penyediaan sanitasi layak dan terjangkau

Untuk cakupan pelayanan sanitasi kepada masyarakat pada tahun 2018 sebesar 48,38%, kondisi capaian tingkat pelayanan tertinggi di Kabupaten Sambas yaitu sebesar 64,12% dan untuk tingkat pelayanan terendah pada kabupaten Kota Singkawang yaitu sebesar 25,02%. Tingkat pelayanan sanitasi kepada masyarakat masih dibawah nasional sebesar 69,27%. Dan secara keseluruhan tingkat pelayanan air bersih dan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2018 masih dibawah nasional, untuk itu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, bagaimana tingkat pelayanan tersebut kedepan bisa lebih ditingkatkan mengingat dalam meningkatkan pelayanan tersebut tidak mudah, karena ada beberapa tantangan yang akan dihadapi.

Secara keseluruhan tingkat pelayanan air bersih dan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2018 masih dibawah nasional, hal tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Persentase Tingkat Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi
Provinsi Kalimantan Barat Bersih Tahun 2014 – 2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Rumah Tangga				
	Bersanitasi (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	46,84	48,22	47,29	47,36	48,38
Kabupaten Sambas	44,51	59,01	59,17	59,11	64,12
Kabupaten Bengkayang	42,39	38,39	39,11	38,80	40,98
Kabupaten Landak	44,06	49,50	49,64	49,75	48,10
Kabupaten Mempawah	41,41	37,63	37,97	38,68	44,57
Kabupaten Sanggau	42,36	43,63	43,75	44,48	46,51
Kabupaten Ketapang	42,39	43,90	43,90	44,28	46,06
Kabupaten Sintang	44,85	43,46	44,02	44,48	40,85
Kabupaten Kapuas Hulu	43,20	42,70	41,85	43,99	39,34
Kabupaten Sekadau	43,95	44,62	45,84	40,39	42,13
Kabupaten Melawi	40,99	53,76	53,91	55,56	63,11
Kabupaten Kayong Utara	42,08	50,12	50,54	52,70	54,31
Kabupaten Kubu Raya	43,93	42,97	43,64	43,42	46,91
Kota Pontianak	41,48	55,07	57,05	55,72	56,89
Kota Singkawang	41,35	34,95	34,96	36,95	25,02

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan sanitasi kepada masyarakat pada provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah sebesar 48,38%, kondisi capaian tingkat pelayanan tertinggi ada di Kabupaten Sambas yaitu sebesar 64,12%, sementara untuk tingkat pelayanan terendah terjadi di Kota Singkawang yaitu sebesar 25,02%. Tingkat pelayanan sanitasi kepada masyarakat sebesar 69,27%, dan secara keseluruhan tingkat pelayanan air bersih dan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2018 masih dibawah nasional, untuk itu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, bagaimana tingkat pelayanan tersebut kedepan bisa lebih ditingkatkan mengingat dalam meningkatkan pelayanan tersebut tidak mudah, karena ada beberapa tantangan yang akan dihadapi.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan dan pengembangan sanitasi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana Instalasi Pengolah Air Limbah baik domestik maupun non domestik, dimana pada umumnya masyarakat dalam membuang air mandi maupun mencuci langsung dibuang pada saluran drainase belum terfasilitasi oleh Instalasi Pengolah Air limbah, masih ada sebagian masyarakat yang buang air besar sembarangan, masih adanya masyarakat yang menggunakan jamban belum sesuai standart (sumur resapan) serta terbatasnya fasilitas Instalasi Pengolah Limbah dan Tinja, sehingga hal ini akan menyebabkan tercemarnya lingkungan yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat maka hendaknya pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi maupun pusat perlu berkolaborasi untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih/minum dan sistem pengelolaan sanitasi yang terintegrasi.

2.6.3. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dengan proses secara bertahap bagaimana mengubah sikap perilaku lama masyarakat untuk menjadi lebih baik, terutama pada membuang air besar sembarangan. Masyarakat di Kalimantan Barat belum semua daerah terbebas dari membuang air besar sembarangan, masih banyak dijumpai pada daerah perdesaan atau daerah pinggir sungai yang masyarakatnya membuang air besar sembarangan, hal ini karena kurang didukung dengan tersedianya fasilitas MCK yang memadai, serta masih belum adanya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat. Kewajiban penyediaan sarana sanitasi menjadi tanggung jawab bersama baik itu masyarakat, pemerintah, swasta maupun pihak terkait lainnya. Masyarakat harus berperan secara aktif dengan bagaimana mengubah perilaku kebiasaan lama yang membuang air besar sembarangan, dengan dengan mengubah membuang air besar pada tempatnya/WC. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk keperluan MCK, sehingga dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah program sanitasi bisa cepat terwujud dan bebas dari BAB sembarangan.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Barat kedepan untuk STBM adalah masih belum adanya data yang sudah terbebas atau belum dari STMB, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perencanaan program dan kegiatan. Selain itu juga masih adanya kebiasaan masyarakat yang masih buang air besar di sembarang tempat, hal ini diakibatkan kerana faktor lingkungan dan kebiasaan serta juga masih belum tersedianya sarana dan prasarana fasilitas untuk BAB. Untuk itu pemerintah perlu melakukan strategi

kebijakan melalui program dan kegiatan yang komprehensif agar BAB sembarangan bisa berkurang atau tidak ada lagi, karena salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan STBM adalah sudah tidak adanya orang atau masyarakat untuk Buang Air Besar sembarangan. Dan salah satu program pemerintah untuk mendukung STBM, adalah program Indeks Desa Membangun.

2.6.4. Peningkatan sistem pengelolaan lumpur tinja

Kondisi sarana dan prasarana sanitasi khususnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Provinsi Kalimantan Barat masih relatif terbatas, karena belum semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki fasilitas atau layanan IPLT. Keberadaan IPLT di Kalimantan Barat dari 14 Kabupaten/Kota, baru 2 kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana IPLT yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak dengan kapasitas layanan untuk 50 KK atau 250 jiwa, sedang kabupaten dan kota lainnya masih dalam tahap proses persiapan dan perencanaan.

Tantangan yang di hadapi pemerintah provinsi Kalimantan Barat pada saat ini adalah walaupun sudah dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja akan tetapi pemanfaatannya masih belum optimal dan bahkan ada yang belum difungsikan hal ini dikarenakan belum adanya sarana pendukung seperti tidak adanya truk Tinja, sehingga masyarakat yang akan memanfaatkan IPLT tersebut tidak bisa, tentunya hal ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat agar pemanfaatan IPLT bisa lebih dioptimalkan dengan pengadaan sarana truk Tinja. Selain itu tantangan lain adalah belum adanya data yang berbasis spasial terkait daerah atau kawasan yang sudah terlayani dan yang belum terlayani IPLT dimasing-masing Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sehingga perlu adanya pendataan yang berbasis spasial, agar penanganan IPLT kedepan bisa

lebih mudah. Untuk itu perlu adanya strategi dan kebijakan dalam pengelolaan IPLT secara komprehensif, agar segala permasalahan atau tantangan bisa segera diatasi, untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

2.6.5. Peningkatan kualitas air sungai dan danau sebagai air baku

Sumber air baku untuk keperluan air bersih di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya masih tergantung pada keberadaan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas dan anak cabangnya merupakan sumber air baku bagi masyarakat maupun Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Sungai Kapuas mengalir dari ujung Provinsi Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu dan berakhir di Kota Pontianak dengan panjang.sekitar 1.143 km.

Kondisi Sungai Kapuas yang merupakan sumber kehidupan, telah mengalami perubahan baik secara kualitas maupun kuantitas, padahal sungai Kapuas merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat baik itu untuk mandi, mencuci maupun untuk minum. Menurunnya kualitas air sungai Kapuas pada umumnya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang air limbah yang berasal dari mandi, mencuci, WC, industri dan illegal minning langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut tentunya menyebabkan kondisi kualitas air sungai akan terus menurun kualitas, padahal air sungai kapuas merupakan sumber air baku bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat.

Dalam rangka untuk peningkatan air sungai Kapuas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan semua stakeholder baik pusat maupun daerah serta para pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi

Kemasyarakatan , tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi maupun masyarakat sendiri. Dalam rangka untuk peningkatan air sungai dan pencegahan pencemaran air sungai, maka dapat dilakukan dengan melalui: Restorasi Kualitas Air Sungai, melalui; identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai; penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; pelarangan pembuangan limbah ke sungai; pemantauan kualitas air pada sungai; dan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Dalam pengelolaannya Sungai Kapuas ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut disebabkan oleh adanya pencemaran yang diakibatkan oleh adanya limbah domestic, industri , penambangan illegal, maupun adanya kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, serta adanya alih fungsi lahan oleh perusahaan perkebunan karena factor ekonomi, serta semakin luasnya lahan dan hutan yang dalam kondisi kritis. Tentunya untuk menghadapi tantangan tersebut pemerintah provinsi Kalimantan Barat tidak bisa tinggal diam, tetapi harus melakukan langkah konkrit bagaimana kondisi Sungai Kapuas tersebut tetap terjaga agar bisa digunakan sepanjang tahun dalam kondisi baik secara kualitas maupun kuantitas.

2.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Pemenuhan kebutuhan energi untuk menunjang perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat sangat perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian daerah diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus

mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Kondisi kelistrikan Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari pertumbuhan penjualan 5 tahun terakhir (2014-2018) di Kalimantan Barat rata-rata 6,25% per tahun. Rasio pelanggan rumah tangga berlistrik PLN di Kalimantan Barat sampai dengan 2018 adalah sebesar 87,21 %. Hingga saat ini, sebagian besar pasokan listrik di Kalimantan Barat masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak. Kecukupan dan keandalan pasokan masih relatif rendah karena umur beberapa mesin diesel sudah tua dan cadangan pembangkitan tidak memadai. Pada akhir Tahun 2015, interkoneksi antara Kalbar dan Serawak melalui transmisi 275 kV beroperasi. Tujuan dari interkoneksi Kalbar-Sarawak adalah untuk menurunkan biaya pokok produksi dengan menggantikan pembangkit BBM, meningkatkan keandalan sistem Kalbar dan mengantisipasi keterlambatan pembangunan proyek PLTU. Suplai daya sebesar 230 MW dari Serawak akan beroperasi 100 MW pada saat beban dasar dan tambahan 130 MW pada saat beban puncak. Selain itu sebagai antisipasi kekurangan daya jangka pendek, dibangun Mobile Power Plant (MPP) 100 MW Pontianak. MPP dapat dimobilisasi jika daya dari pembangkit pada sistem tenaga listrik sudah mencukupi.

Penjualan sejak Tahun 2014 - 2018 tumbuh rata-rata sebesar 6,25 %. Komposisi penjualan energi serta jumlah pelanggan tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel. 2.20
Kondisi Listrik Terjual dan Jumlah Pelanggan
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 -2018

Katagori	2014	2015	2016	2017	2018
Listrik Terjual (000) KWH	1.862.439	1.989.641	2.160.605	2.252.055	2.372.672
Pelanggan	870.687	918.006	976.464	1.040.948	1.117.470

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah V Kalimantan Barat

Provinsi Kalbar memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam baru dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik antara lain tenaga surya, angin, air dan uranium. Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

Potensi Biomassa di Provinsi Kalimantan Barat paling banyak adalah dari limbah perkebunan sawit yang tersebar yang dapat digunakan sebagai bahan energi primer untuk PLTU Biomassa. Pemanfaatan potensi ini sangat didukung oleh banyaknya pabrik

pengolahan sawit yang ada di Kalimantan Barat. Potensi batubara sebesar 160,6 juta ton tersebar di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, berupa batubara dengan kandungan kalori yang tinggi (4.795-7.880 kcal/kg). Namun demikian, hingga saat ini belum dilakukan eksploitasi karena terkendala infrastruktur transportasi. Sumber batubara ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk PLTU di Sanggau dan Sintang. Selain batubara, terdapat pula potensi uranium di Kabupaten Melawi yang dapat digunakan sebagai energi primer PLTN. Namun pemanfaatan uranium sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari Pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN. Beberapa potensi EBT lain yang dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik ditampilkan pada Tabel 2.7.2 dan Tabel 2.7.3 berikut.

Tabel 2.21
Potensi Bioenergi di Kalimantan Barat

No	Nama Proyek	Lokasi	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
1	Landak	Kab. Landak	PLTBg	2	Potensi
2	Tersebar	Kalbar	PLTBm	87	Potensi
3	Siantan/ Pontianak	Siantan	PLTSa	10	Potensi
	Jumlah:			99	

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah V Kalimantan Barat

Tabel 2.22
Potensi Energi Nuklir di Kalimantan Barat

No	Nama Proyek	Lokasi	Jenis	Kapasitas (MW)	Status
1	Kalbar	Kalbar	PLTN	100	Potensi
	Jumlah :			100	

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah V Kalimantan Barat

Potensi pembangkitan tersebut di atas dan potensi setempat lainnya diluar daftar potensi di atas dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik EBT tersebar sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7.2 dan Tabel 2.7.3 apabila telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan yang diverifikasi oleh PLN, mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain potensi energi di atas, terdapat potensi pengembangan PLTS komunal untuk daerah perbatasan dan transmigrasi yang telah dikaji oleh DIRJEN EBTKE seperti yang ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Potensi Energi Surya di Kalimantan Barat

No	Nama Proyek	Provinsi	Lokasi	Jenis	Kapasitas (kW)	Status
1.	Nanga Nyabau	Kalbar	Kapuas Hulu	PLTS	50	Potensi
	Jumlah :				50	

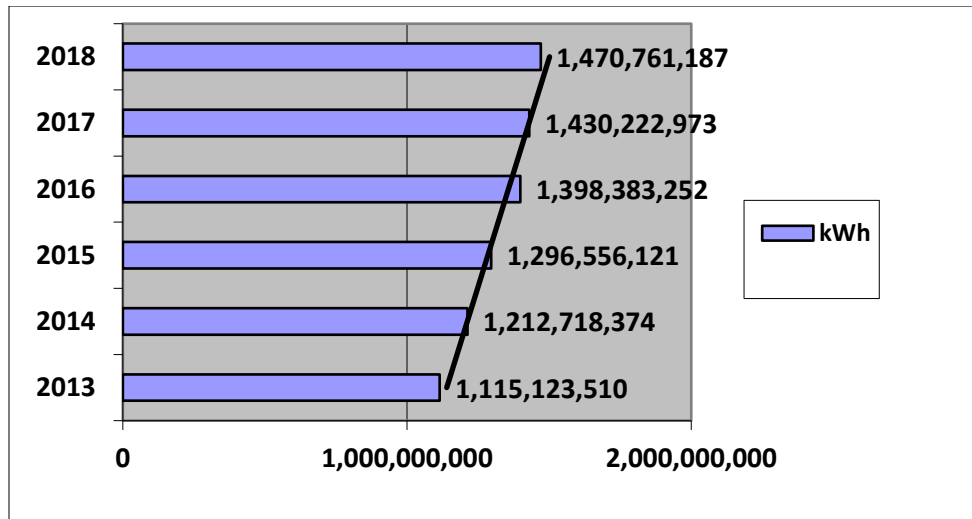
Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah V Kalimantan Barat

2.7.1. Kebutuhan Energi Kalimantan Barat

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan dan atau penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Tingkat konsumsi listrik per kapita dapat menunjukkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan listrik Rumah Tangga (RT) terhadap produksi listrik dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 kebutuhan listrik RT sebesar 1.115.123.510 kWh, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.212.718.374 kWh hingga tahun 2018 meningkat sebesar 1.470.761.187 kWh. Peningkatan kebutuhan listrik RT dari

tahun ketahun seiring dengan peningkatan produksi listrik sebagaimana gambar dibawah ini

Gambar 2.17
Kebutuhan Listrik Rumah Tangga (RT)
Tahun 2013 - 2018



Sumber data : KDA Provinsi Kalimantan Barat 2019

Produksi tenaga listrik dewasa ini terus meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan dan konsumsi. Kebutuhan energi listrik untuk industri dan perkantoran dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Seiring dengan peningkatan produksi listrik, sehingga persentase kebutuhan rumah tangga terhadap produksi listrik dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2013 persentase kebutuhan RT terhadap produksi listrik sebesar 52,95 persen, pada tahun 2014 meningkat menjadi 54,48 persen, pada tahun 2015 menjadi 55,40 persen. Namun pada tahun 2016 turun menjadi 54,79 persen, disebabkan pada tahun bersamaan kebutuhan RT terhadap listrik agak melambat.

Proyeksi kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Barat telah memperhitungkan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri (KI) besar dan kecil, Industri

Pariwisata. Untuk melayani pelanggan sektor – sektor penumbuhan dan pengembangan ekonomi tersebut, PLN menyiapkan infrastruktur sistem tenaga listrik (pembangkit, transmisi dan gardu induk).

Perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk mempertimbangkan realisasi penjualan tenaga listrik, pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk target peningkatan rasio jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik PLN di masa datang dan harga jual listrik. Pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat tiap tahunnya rata-rata tumbuh sebesar 1,7%. Harga jual listrik cukup mempengaruhi kenaikan penjualan, terutama pada pelanggan sektor komersial dan industri. Pada sektor publik, PLN merencanakan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik untuk 27 puskesmas, di 22 kecamatan yang tersebar di 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Proyeksi kebutuhan listrik PLN tahun 2019-2023 digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Prov. Kalbar

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan
2019	5,20	2.955	3.548	627	1.170.321
2020	5,35	3.307	3.973	702	1.230.198
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan
2021	5,62	3.659	4.388	775	1.266.695
2022	5,83	3.949	4.728	834	1.291.906
2023	6,15	4.591	5.094	898	1.316.933

Sumber data : PT. PLN Prov. Kalbar

Menurut laporan PT. PLN (Persero) Wilayah V pada tahun 2018 banyaknya produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada sebelas lokasi pembangkit yaitu sebanyak 2.740 GWh mengalami kenaikan sekitar 2,12% dibanding dengan tahun sebelumnya dengan produksi sebanyak 2.684 GWh, namun tidak diikuti dengan kenaikan beban

puncak yang bernilai 741.032 KWh pada tahun 2017 turun menjadi 665.363 KWh pada tahun 2018 atau turun sekitar 10,21%.

Terjadinya peningkatan permintaan tenaga listrik ternyata tidak terlalu berdampak pada permintaan bahan bakar seperti bensin dari 621 juta liter pada tahun 2017 menjadi 647 juta liter pada tahun 2018 atau naik sebesar 4,18%. Hal serupa juga terjadi dalam permintaan bahan bakar jenis solar yang naik dari 280 juta liter pada tahun 2017 menjadi 302 juta liter pada tahun 2018 atau naik 7,86%. Untuk bahan bakar jenis tabung gas 3 kg mengalami kenaikan pasokan sebesar 2,61%.

Sasaran pembangunan sektor energi pada SDGs mencerminkan beberapa indikator pengukuran yaitu produksi sumber daya energi mencakup BBM, Gas dan Batu Bara, kelistrikan, dan infrastruktur energi. Menyangkut dengan Produksi Sumber Daya Energi, saat ini Provinsi Kalimantan belum memproduksi Minyak Bumi, Gas dan Batu Bara, begitu juga dengan jaringan gas untuk rumah tangga belum ada.

Tabel 2.25
Produksi Sumber Daya Energi

INDIKATOR	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018 (Realisasi)	2019 (Target)
Produksi Sumber Daya energi					
Minyak Bumi (ribu BM/hari) (liter)	-	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-	-
Batu Bara (ton)	-	-	-	-	-
Pengguna Sumber Daya energi					
Minyak Bumi / Bensin (ribu liter)	563.319	604.069	621.000	647.000	
Minyak Bumi/ Solar (ribu liter)	253.548	270.447	280.000	302.000	
Gas (3 kg)	96.590	107.697	115.167	118.285	
Gas (12 kg)	13.717	-	-	-	-
Batu Bara	-	-	-	-	-

INDIKATOR	2015 (Realisasi)	2016 (Realisasi)	2017 (Realisasi)	2018 (Realisasi)	2019 (Target)
Listrik					
Ratio Elektrifikasi (%)	82,38	86,03	89,95	83	85
Konsumsi Listrik Per Kapita (KWH)	488,63	444,41	456,57	474,37	
Penambahan Kapasitas Pembangkit	74,71	78,20	82,21	83,52	
(termasuk yg sedang kontruksi) (MW)					
Infrastruktur Energi					
Gardu Induk (Unit)			334	336	212
Jaringan Transmisi (KMS)			474	650	760
Pembangkit (unit)			87	112,27	307,2
Energi Baru Terbarukan					
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	0,2	38	73,82	142,96	

Sumber : Statistik Ketenagalistrikan Dinas / BPS/ ESDM, KDA 2019

Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi

Selain kebutuhan energi listrik, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas tiap tahun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 kebutuhan bahan bakar minyak jenis bensin sebesar 563.319.000 liter meningkat pada tahun 2016 menjadi 604.069.000 liter, hingga tahun 2018 menjangap 647.575.000 liter. Sedangkan untuk distribusi bahan bakar minyak jenis solar berfluktuasi, pada tahun 2015 sebanyak 253.548.000 liter pada tahun 2016 menjadi 270.447.000 liter, dan pada tahun 2017 turun menjadi 28.536.000 liter, kemudian pada tahun 2018 naik lagi menjadi 302.429.000 liter.

Distribusi bahan bakar minyak jenis premium dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan dan tersebar di 14 Kabupaten Kota, namun untuk bahan bakar minyak jenis solar sesuai fakta dilapangan, masih kelihatan kondisi antrian panjang di SPBU-SPBU. Kondisi ini akan berdampak buruk terhadap perekonomian, dimana truk-truk membawa sembako dan lainnya akan membutuhkan waktu lama sampai kepada tujuan. Distribusi bahan bakar minyak jenis bensin pada tahun 2018 terbanyak adalah Kota Pontianak yaitu sebanyak

144.239.000 liter. Bahan bakar minyak jenis solar yang terbanyak adalah di Kabupaten Mempawah yaitu sebanyak 39.433.000 liter. Distribusi gas juga menunjukkan peningkatan (gas 3 kg) pada tahun 2015 sebanyak 96.590.000 kg, tahun 2016 meningkat menjadi 107.697.000 kg, dan seterusnya hingga tahun 2018 mencapai 118.285.000 kg. Berikut ini disajikan distribusi BBM dan Gas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagaimana tabel 2.26 dibawah ini.

Tabel 2.26
Distribusi Bahan Bakar Minyak (Bensin dan Solar) dan Gas
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	BBM-Bensin (liter)	BBM-Solar (liter)	Gas (Kg)
Kabupaten Sambas	45.168.000	16.708.000	11.503.000
Kabupaten Bengkayang	22.279.000	13.980.000	5.744.000
Kabupaten Landak	26.557.000	16.934.000	5.277.000
Kabupaten Mempawah	42.608.000	27.664.000	8.985.000
Kabupaten Sanggau	55.593.000	33.461.000	9.754.000
Kabupaten Ketapang	77.321.000	33.539.000	9.736.000
Kabupaten/ Kota	BBM-Bensin (liter)	BBM-Solar (liter)	Gas (Kg)
Kabupaten Sintang	48.805.000	38.433.000	8.785.000
Kabupaten Kapuas Hulu	30.625.000	20.360.000	4.764.000
Kabupaten Sekadau	27.057.000	20.848.000	3.622.000
Kabupaten Melawi	15.928.000	12.276.000	4.203.000
Kabupaten Kayong Utara	10.210.000	3.272.000	2.732.000
Kabupaten Kubu Raya	50.270.000	20.307.000	14.663.000
Kota Pontianak	144.239.000	26.607.000	21.175.000
Kota Singkawang	50.915.000	18.040.000	7.343.000

Sumber data : BPS, Kalimantan Dalam Angka Tahun 2019

2.7.2. Produksi dan Penggunaan Energi

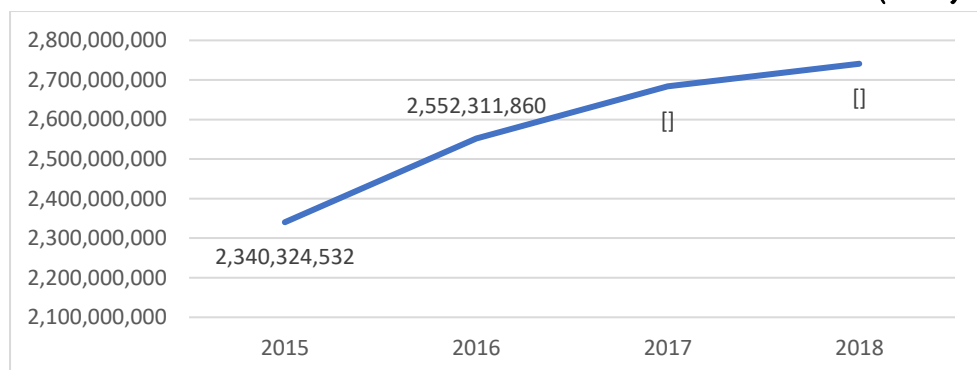
Aksesibilitas Listrik masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingkat ratio elektrifikasi sudah mencapai diatas 60%, pada

tahun 2015 sebesar 82,38%, tahun 2016 sebesar 86,03%, tahun 2017 sebesar 89,95. Walaupun tingkat ratio elektrifikasi meningkat dari tahun ke tahun, namun aksesibilitas listrik ketiap daerah masih belum merata. Keterbatasan infrastruktur kelistrikan hal yang sangat mendasar melihat rentang kendali lokasi dan struktur tanah yang berawa serta memiliki banyak sungai.

Produksi listrik PLN dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 2.340.324.532 Kwh, pada tahun 2016 meningkat sebesar 2.552.311.860 Kwh, pada tahun 2017 sebesar 2.683.548.654 Kwh, dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2.740.840.423 Kwh. Seiring dengan peningkatan produksi listrik kapasitas terpasang mengalami peningkatan.

Gambar 2.18

Produksi Listrik PLN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2018 (Kwh)



Sumber data : KDA 2019

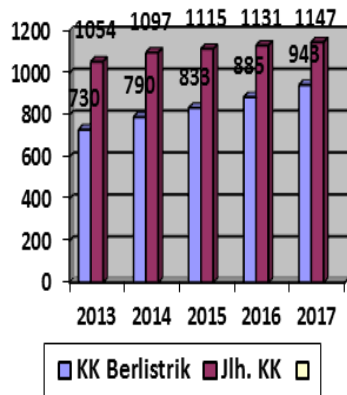
Tingkat layanan ketenagalistrikan yang masih relatif rendah juga ditunjukkan dengan besaran konsumsi tenaga listrik per kapita sebesar 474.378 kwh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 2.740.840.423 Kwh pada tahun 2018 dengan beban puncak sebesar 665.363 Kw. Produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada sebelas lokasi pembangkit mengalami kenaikan sekitar 2,14 persen dibanding dengan tahun 2017, namun beban puncak pada tahun 2017 sebesar

741.032 Kw mengalami penurunan dibanding tahun 2018 atau turun sebesar 10,21 persen.

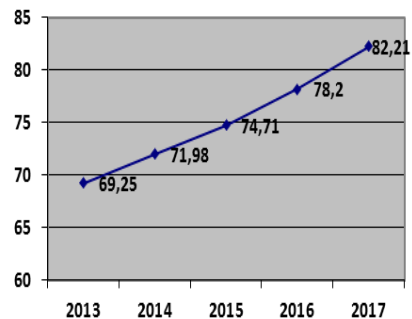
Tingkat penjualan listrik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2016 – 2018 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,80 persen. Pada tahun 2016 dengan penjualan sebesar 2.160.605.312 KWh, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.252.055.432 KWh dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,36 persen atau sebesar 2.372.672.170 KWh.

Bila dilihat dari rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 7,50 %. Pada tahun 2015 sebanyak 832.735 KK, tahun 2016 sebanyak 884,789 KK dan pada tahun 2017 sebanyak 943.007 KK.

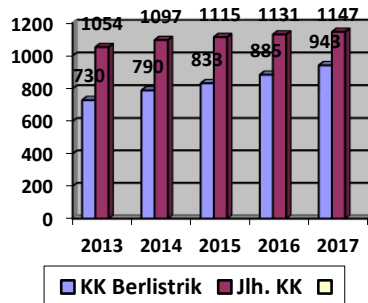
Gambar 2.19 Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Berlistrik (ribu)



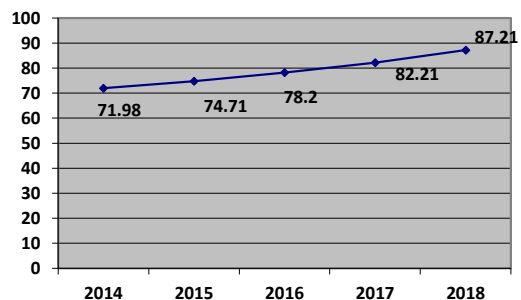
Gambar 2.20 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik



Gambar 2.21 Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Berlistrik (ribu)



Gambar 2.22 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik



Sumber data: BPS, Kalbar Dalam Angka 2019

2.7.3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Pengembangan energi baru terbarukan menjadi salah satu prioritas PLN terutama di regional Kalimantan untuk menggantikan pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak atau diesel. Saat ini di wilayah Kalimantan Barat, presentase pembangkit yang masih menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya masih sebesar 44 persen. Pemerintah melalui PLN terus berkomitmen dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 % di tahun 2025. Selain untuk pemerataan kelistrikan untuk daerah-daerah yang belum mendapatkan akses energi listrik, PLN juga mengupayakan listrik dengan tarif yang terjangkau sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkahnya dengan bekerja sama dengan Independent Power Producer (IPP) pengembang EBT.

Berdasarkan Tabel 2.7.6 kondisi EBT menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 0,2 %, tahun 2016 meningkat sebesar 38 %. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 73,82 %, dan tahun 2028 mencapai sebesar 142,96 %. Kondisi ini dikarenakan adanya penyediaan energi listrik yang dibeli dari Sarawak Electricity Supply Company (SESCO) dengan masa kontrak selama 5 tahun (2016-2021). PT. PLN melakukan pembelian tenaga listrik dari Sarawak melalui transmisi interkoneksi 275 kV dengan daya kontrak pembelian hingga 230 MW. Produksi energi listrik yang dibeli dari SESCO bersumber dari tenaga air/ PLTA pada tahun 2018 sebesar 1.495.886.500 kwh yaitu sebesar 54 % dari produksi listrik Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya penyediaan energi listrik yang dibeli dari SESCO tersebut sehingga produksi listrik PLN melalui tenaga Diesel (PLTD) di turunkan oleh PLN.

2.7.4. Intensitas dan efisiensi energi (listrik)

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt. Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt.

Hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar telah berupaya mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir.

Permasalahan utama jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan adalah akses gas bumi untuk rumah tangga dan akses tenaga listrik. Di Kalimantan Barat akses gas bumi untuk rumah tangga belum tersedia dan akses ketenagalistrikan masih terbatas dan menunjukkan ketimpangan. Demikian pula dalam hal penyediaan infrastruktur gas bumi khususnya untuk rumah tangga, industri dan transportasi masih relatif belum merata dan hanya dinikmati oleh

sebagian kalangan tertentu. Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) masih tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya EBT dalam bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses terhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih terdapat rumah tangga yang belum mendapat listrik; (4) harga energi terbarukan belum kompetitif dan subsidi belum tepat sasaran; (5) cadangan energi nasional terus menurun; dan (6) sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan. Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15%, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah: (1) kurangnya insentif kepada pelaku industri untuk melakukan penghematan energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti project financing dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan efisiensi energi dari lembaga keuangan belum tersedia; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi; dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan pemerintah daerah dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.

2.7.5. Tantangan Pelaksanaan TPB Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

1. Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat masih rendah yaitu berkisar antara 75% - 83 %.

2. Keamanan pasokan energi masih rentan, karena sebagian besar konsumsi listrik bersumber dari Sarawak yang dibeli dari SESCO yaitu sebesar 54 % dari produksi listrik Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahan bakar penggerak listrik yang ada di Kalimantan Barat yang ada menggunakan BBM dan Gas.

Hal tersebut mengakibatkan tingkat layanan ketenagalistrikan Kalimantan Barat masih relatif rendah juga ditunjukkan dengan besaran konsumsi tenaga listrik per kapita sebesar 507,63 Kwh per kapita dengan persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 87,21 persen. Keterbatasan pasokan energi listrik di Kalimantan Barat sehingga kesulitan dalam pengembangan Industri.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

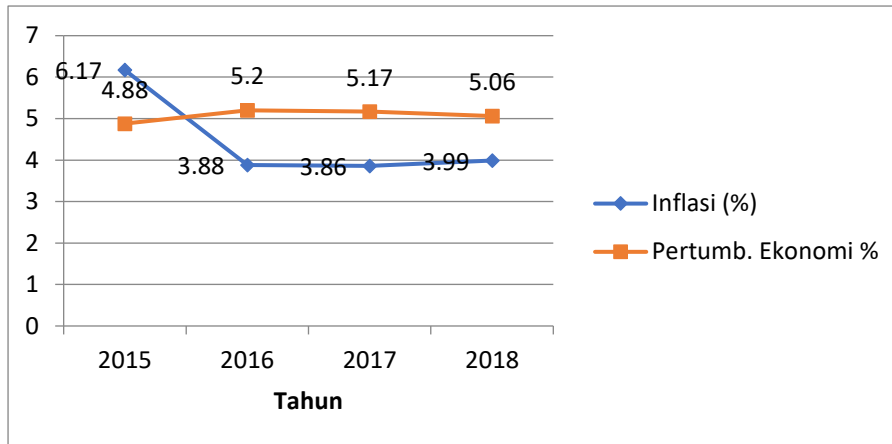
2.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Lambatnya pertumbuhan ekonomi global memberikan pengaruh terhadap perekonomian Nasional demikian juga dengan perekonomian daerah khususnya Kalimantan Barat. Kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sub sektor perkebunan. Adapun tujuan ekspor hasil perkebunan (Sawit dan Karet) diantaranya Negara Cina, Eropa dan Amerika. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina maka menurun pula permintaan dan harga komoditi global yang menyebabkan performa ekspor Kalbar menurun. Kondisi perekonomian di Kalbar selama kurun waktu 2015-2018 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 4,86 persen dan meningkat menjadi 5,22 persen pada tahun

2016, namun pada tahun 2017 sedikit melambat menjadi 5,17 persen dan pada tahun 2018 melambat lagi menjadi 5,06 persen.

Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka 33,19 Juta Rupiah meningkat 8,35 persen dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 30,63 Juta Rupiah, demikian juga pada tahun 2017 mencapai 35,98 Juta Rupiah atau meningkat 8,41 persen dibandingkan dengan pendapatan perkapita pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2018 pendapatan per kapita meningkat menjadi 38,83 Juta rupiah atau meningkat 7,92 persen dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, untuk laju inflasi yang diukur dari laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2018 berhasil terjaga pada kondisi 3,99 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2017 sebesar 3,86, namun untuk tahun 2017 inflasi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 mencapai 3,88 persen, sebaliknya untuk tahun 2015 inflasi relatif paling tinggi selama periode tahun 2015 – 2018 mencapai 6,17 persen. Pada tahun 2016, laju inflasi berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada kurun waktu 2016-2018, laju inflasi berhasil terjaga dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Gambar 2.23
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2015-2018



Sumber : BPS Prov Kalbar 2019

Dari sisi PDRB Produksi berdasarkan harga konstan tahun 2018, struktur perekonomian Kalimantan Barat masih ditopang dari sektor Pertanian sebesar 20,25 Persen, kemudian diurutkan kedua Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 16,09 persen kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan 14,09 persen. Namun untuk tingkat pertumbuhannya sektor pertanian menunjukkan pertumbhan tertinggi 6,68 persen, kemudian sektor perdagangan tumbuh 4,59 persen sedangkan sektor industri tumbuh 2,75 persen.

Kemudian dilihat dari sisi PDRB Penggunaan tahun 2018, kontribusi tertinggi terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 54,00 persen, kemudian diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 33,04 persen, dan komponen konsumsi pemerintah 11,50 persen. Sedangkan komponen lainnya yaitu komponen Impor memberikan kontribusi 10,91 persen, dan ekspor sebesar 9,81 persen.

Pengeluaran per kapita Kalimantan Barat diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Pada tahun 2018 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi Rp. 12.344 ribu atau meningkat 21,61 persen dibandingkan dengan

tahun 2017 sebesar Rp 11.150 ribu. Sedangkan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan untuk Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten-Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2018

No	Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)			
		2015	2016	2017	2018
1	Sambas	9.195,00	9.311,00	9.084,00	10.546,00
2	Bengkayang	8.489,00	8.588,00	9.685,00	10.655,00
3	Landak	6.670,00	6.737,00	9.579,00	9.670,00
4	Mempawah	7.238,00	7.270,00	9.090,00	10.561,00
5	Sanggau	7.622,00	7.729,00	9.897,00	10.777,00
6	Ketapang	8.350,00	8.430,00	10.066,00	12.470,00
7	Sintang	8.224,00	8.302,00	10.000,00	10.992,00
8	Kapuas Hulu	6.640,00	6.691,00	10.059,00	10.702,00
9	Sekadau	6.795,00	6.820,00	10.194,00	10.623,00
10	Melawai	7.841,00	7.858,00	10.287,00	10.434,00
11	Kayong Utara	6.950,00	7.030,00	11.940,00	12.183,00
12	Kubu Raya	7.993,00	8.145,00	10.835,00	11.199,00
13	Kota Pontianak	13.737,00	13.838,00	17.851,00	20.543,00
14	Kota Singkawang	10.982,00	11.006,00	12.911,00	15.432,00
Kalimantan Barat		8.279,00	8.348,00	11.150,00	12.344,00

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2019

Selanjutnya berdasarkan realitas pergerakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018, masih dalam pengertian pertumbuhan sedang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu 5,06 persen.

Tabel 2.28 Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (Harga Berlaku)
Tahun 2015-2018 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.127.034,84	32.615.106,38	36.018.384,12	39.286.171,19

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
B.	Pertambangan dan Penggalian	7.181.002,80	9.046.110,08	9.582.723,22	10.637.399,98
C.	Industri Pengolahan	23.146.190,08	26.008.264,65	28.767.014,24	31.227.570,27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	111.941,50	153.194,75	108.846,86	204.405,21
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	180.085,80	184.152,30	205.104,95	223.493,94
F.	Konstruksi	19.212.255,85	20.067.957,12	22.712.980,68	24.305.662,35
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	21.718.700,04	23.359.067,58	25.084.694,55	27.334.794,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.457.649,57	7.302.284,45	8.105.868,69	9.286.120,08
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.494.556,54	3.822.153,79	4.103.381,07	4.569.757,11
J.	Informasi dan Komunikasi	4.925.396,14	5.538.796,46	6.615.265,48	7.320.877,59
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.217.408,97	5.869.387,16	6.546.737,22	7.341.030,19
L.	Real Estate	4.418.022,25	4.775.286,65	5.107.789,62	5.628.441,45
M,N.	Jasa Perusahaan	690.046,48	744.573,42	782.984,79	854.784,90
O.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	9.775.630,34	11.191.891,67	12.314.097,07	13.545.789,62
P.	Jasa Pendidikan	6.302.092,44	6.775.969,71	7.122.919,23	7.651.788,63
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.209.379,73	2.337.046,63	2.480.086,52	2.708.572,13
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1.486.153,84	1.591.176,65	1.737.715,76	1.737.715,76
Produk Domestik Regional Bruto		146.653.547,21	161.382.419,45	177.468.594,08	194.032.851,45

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Harga Berlaku mencapai Rp. 14.837,4 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 56 Juta atau US\$ 3.927. Asumsi pertumbuhan ini antara lain bersumber dari permintaan konsumen dalam negeri (domestic-demand) yang cukup besar dan pasar minyak mentah luar negeri di tahun 2018 diharapkan bisa menembus 80 dolar AS per barel. Selain faktor eksternal di atas komoditi andalan Kalbar seperti

perkebunan minyak kelapa sawit, minyak mentah dan pertambangan batubara diperkirakan meningkat lantaran pulihnya harga komoditas tersebut. Ini berarti jika terjadi apa yang disebut era *commodity boom* akan menguntungkan kita sebagai salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia. Selain itu di era ekonomi digital, sektor UMKM akan diuntungkan oleh makin luasnya akses pemasaran produk dan efisiensi produksi.

Perkembangan ekonomi nasional secara eskalatif tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2018 mencapai angka 5,06 persen, sementara inflasi Kalbar pada 2018 bergerak pada level yang masih terkendali. Demikian juga ekonomi global negara maju saat ini menuju pada tahap pemulihan ekonomi (*recovery*) termasuk negara berkembang seperti Tiongkok.

Tingginya kinerja ekspor, sektor informasi dan komunikasi di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat serta perekonomian masyarakat yang terus membaik yang ditandai dengan meningkat indeks tendensi konsumen menjadi salah satu faktor utama pendorong bagi peningkatan perekonomian daerah Kalbar pada tahun 2018. Dengan momentum pertumbuhan yang cukup baik ini, diharapkan prospek beberapa sektor usaha seperti makanan dan minuman, perhotelan, restoran, pertambangan dan perkebunan diprediksi lebih cerah di tahun 2019. Oleh karena itu target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,26-5,49 persen pada 2018 angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya dengan dibukanya kran impor secara besar-besaran oleh Tiongkok dimana merupakan negara tujuan ekspor Kalimantan Barat mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan produk turunan atau hilirisasi dari minyak kelapa sawit. Kalimantan Barat harus lebih banyak

menghasilkan produk turunan untuk diekspor langsung ke Tiongkok, karena negeri tirai bambu itu sedang menggeser kebijakan ekonominya dari ekspor ke konsumsi domestik. Saat ini Kalbar harus mengarahkan kebijakan investasi ke produk hilir seperti lebih banyak memproduksi kosmetik dan lainnya, bukan Cuma minyak goreng yang ekspor.

Tabel. 2.29 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2015-2018

No	Indikator	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,86	5,22	5,17	5,06
2.	Kemiskinan (%)	8,44	8,00	7,88	7,77
3.	TPT (%)	5,15	4,23	4,36	4,26
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin) (Angka Revisi Metode Baru)	65,59	65,93	66,26	66,98

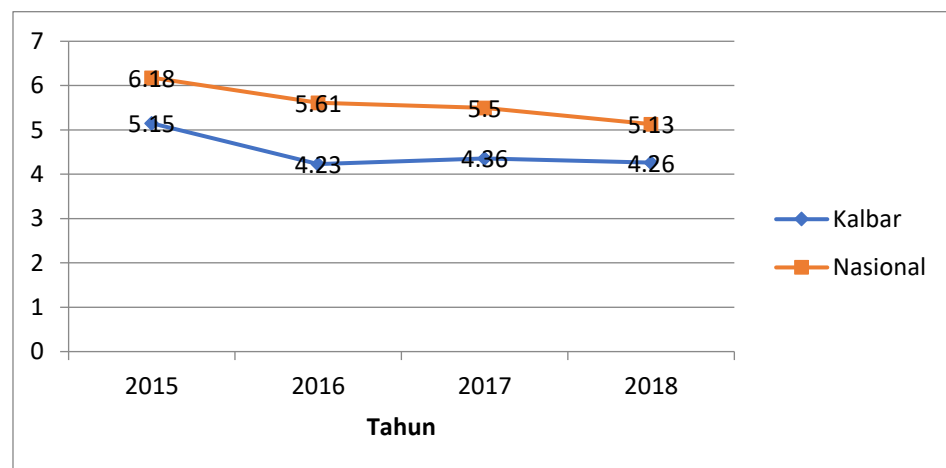
Sumber data: KDA (BPS) Tahun 2019

2.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

Pada tahun 2018 Jumlah Angkatan kerja di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2.451.399 orang, diantaranya 95,74 persen atau 2.346.881 orang diantaranya bekerja. Adapun komposisi tenagakerja masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah yaitu sekitar 67,6 persen adalah tamatan SLTP ke bawah, Sedangkan lapangan usaha yang paling didominasi yaitu disektor pertanian yang menyerap sekitar 50,94 persen. Sehingga angkatan kerja Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2018 adalah 104.518 jiwa. Hal ini menggambarkan adanya pengangguran terbuka sebesar 4,26 persen. Sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja adalah sekitar 1.119.383 jiwa diantaranya sekitar 25,58 persennya bersekolah atau 286.33 jiwa, mengurus rumah tangga 697.165 jiwa (62,28 persen) dan lain sebanyak 135.885 orang (12,14 persen)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar **4,26** persen, mengalami penurunan sebesar 0,1 % terhadap tahun 2017 sebesar 4,36%. Berdasarkan data BPS ini berarti terdapat 2,30 juta penduduk Kalbar yang bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 104.518 orang. Selama periode 2015-2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat selalu berada dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional.

Gambar. 2.24 TPT Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2015-2018

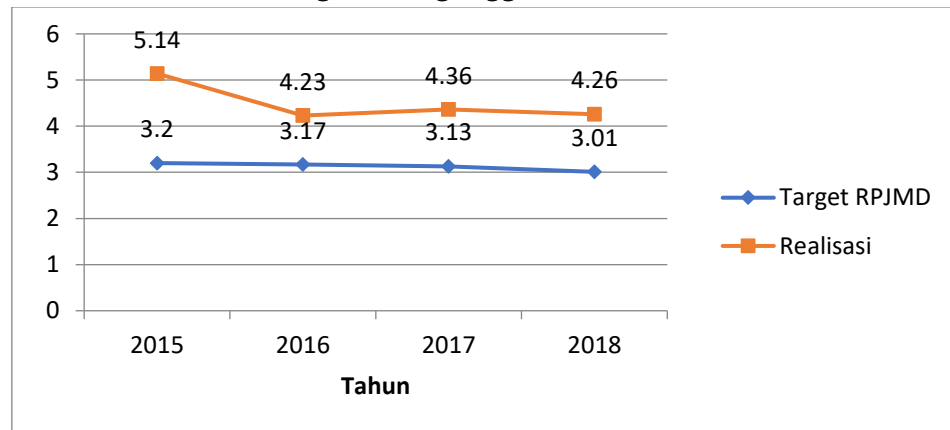


Sumber : BPS, KDA 2019

Kondisi belum menggambarkan capaian target pengguran sesuai RPJMD pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,01%. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan rendahnya penambahan kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2018 terjadi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutan, Perburuan dan Perikanan mencapai 1.195.000 pekerja atau sebesar 50,94 %, kemudian pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebanyak 378.000 pekerja atau sebesar 16,11 %, pada sektor Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebanyak 146.000 pekerja atau 6,23 %. Penambahan kesempatan kerja dalam

jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Gambar 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber data : BPS, KDA Tahun 2019

Kerentanan dan ketidakpastian kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi sampai saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja. Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari 40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja informal juga menurun dari 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada Agustus 2016. Sedangkan pekerja informal mencapai 49% berada pada sektor pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada sektor formal. Meningkatnya persentase tenaga kerja

formal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja. Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET) pada tahun 2016 masih relatif besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar 25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan. Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai serta perlindungan terhadap tenaga kerja, perlu dilakukan penyiapan mental, keterampilan yang berkompetensi, kemampuan berbahasa yang siap bersaing dipasar kerja internasional. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui sistem Antar Kerja Antar Negara (AKAN) guna mempertemukan PMI/TKI sangat berperan dalam penyaluran tenaga kerja yang terjamin sesuai bakat minat dan kemampuannya. Animo masyarakat Kalimantan bekerja ke Luar Negeri sangat tinggi karena ketersediaan lapangan kerja dalam negeri terbatas, sektor industri yang ada belum mampu menampung tenaga kerja yang ada, masih terdapat perusahaan yang tutup sehingga terjadi PHK dan nilai upah buruh masih tergolong rendah.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain: 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*); 2.

Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah; 3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah; 4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global; 5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja; 6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja; 7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda; 8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

2.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja prosentase koperasi aktif sebesar 60,17 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 21,72 persen, masing-masing belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yakni sebesar 90 persen dan 23 persen. Sedangkan capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha (UMKM) tahun 2018 adalah sebesar 80.546 pelaku UMKM.

Berdasarkan dari Tabel 2.30, Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar - 14,75 persen atau 446 unit dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 10,16 persen atau sebanyak 258 unit koperasi aktif, menurunnya jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 disebabkan karna adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait implementasi pelaksanaan program reformasi total koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang salah satunya menghapus koperasi – koperasi yang tidak aktif, sehingga dampak dari pelaksanaan reformasi total koperasi adalah menurunnya jumlah koperasi secara kuantitas, akan tetapi secara kualitas pembinaan

koperasi akan semakin efisien, efektif, fokus kepada koperasi aktif dan koperasi baru serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital

Sementara itu, jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM selama periode 2015-2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 10,17 persen. Namun Pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM turun -32,53 persen dibandingkan tahun 2017 sebanyak 119.396 pelaku usaha sedangkan pada tahun 2018 menjadi 80.546 pelaku usaha. Capaian tersebut, belum mencapai target dikarenakan adanya validasi data UMKM ditingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2.30
Jumlah Koperasi dan UKM

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.944	3.024	2.578	2.836
2	Jumlah Koperasi	4.616	4.390	3.761	4.713
3	Persentase Koperasi Aktif	63,77	68,88	68,54	60,17
4	Persentase Koperasi Berkualitas	12,97	13,44	17,46	21,72
5	Jumlah Pelaku Usaha (UMKM)	108.010	108.374	119.396	80.546
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha	0,46	0,33	10,17	-32,53

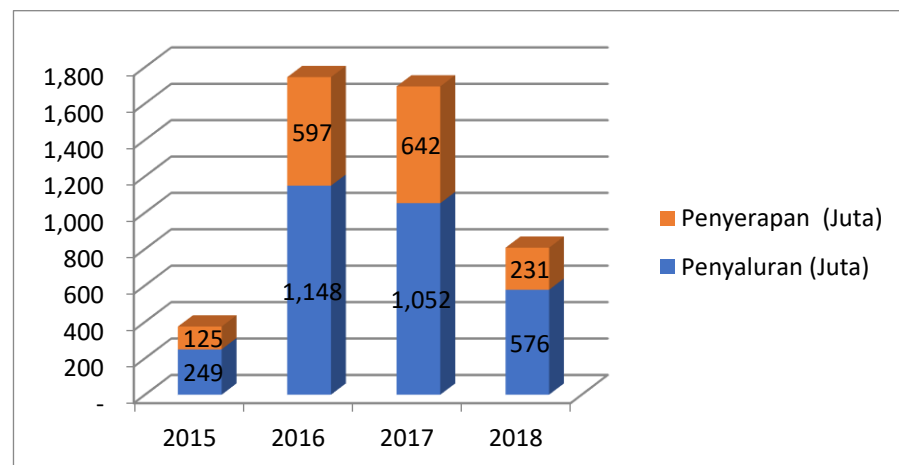
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, 2018

Kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi sangat besar, khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat mendorong keberlanjutan UMKM. Salah satu upaya dalam mendorong UMKM adalah memastikan terwujudnya kemudahan dalam mengakses pembiayaan atau permodalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan, Pemerintah telah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Kalimantan

Barat pada tahun 2018 dengan total penyaluran sebesar Rp. 578.663.034.361 dengan debitur sebesar 15.530, tahun 2017 telah disalurkan KUR sebesar Rp. 1.051.565.745.888,-, hanya terserap sebesar 61,05 % yaitu sebesar Rp. 641.949.332.335,- dengan sebaran tertinggi di Kota Pontianak sebesar 17,21 % untuk 3.989 Debitur, lebih kecil dibanding tahun 2018.

Penyaluran kredit UMKM pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015. Posisi kredit UMKM pada tahun 2016 mencapai Rp 1.147.709.271.000,- sedangkan pada tahun 2015 dengan penyaluran sebesar Rp.249.376.477.803,-. Pinjaman modal yang diterima sebanyak 39.121 Debitur pada tahun 2016 tersebar di 14 Kabupaten /Kota termasuk Provinsi dengan rata-rata pinjaman tertinggi per Debitur sebesar Rp.40.010.279,- berada di Kabupaten Kubu Raya.

Gambar 2.26
Kondisi KUR di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2018



Secara umum, pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, serta keterbatasan permasalahan yang dihadapi oleh

UMKM adalah keterbatasan pada akses kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya : 1. Regulasi dan kebijakan yang belum efektif memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM; 2. Rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

2.8.4. Peningkatan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan kontribusinya dalam perekonomian dan mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjungan meningkat menjadi 31,274 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan 44,283 kunjungan dan meningkat di tahun 2016 menjadi 35,894 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara sementara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat per bulan November tahun 2017 sejumlah 35,473 kunjungan.

Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal Kalbar. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2013 sejumlah 2.459.995 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.471.403 kunjungan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.509.323 kunjungan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 2.935.588 kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara

2.979.621 kunjungan. Demikian juga pada tahun 2018 berjumlah 3.024.315 kunjungan.

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus
Tahun 2013-2018

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2013	30.678	2.459.995	2.490.682
2014	31.274	2.471.403	2.502.677
2015	44.283	2.509.323	2.553.606
2016	35.894	2.935.588	2.971.482
2017	35.473	2.979.621	3.015.094
2018	40.578	3.024.315	3.064.893

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2017 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2016 jumlah objek daya tarik wisata sebanyak 462 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 556 dengan penambahan 94 obyek wisata.

Tabel 2.32 Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata

No	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak	17	17	18	18
2	Mempawah	29	29	23	23
3	Singkawang	26	26	53	53
4	Bengkayang	62	62	32	32
5	Sambas	28	28	25	25
6	Kubu Raya	14	14	59	59

No	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
7	Landak	36	36	67	67
8	Sanggau	36	36	62	62
9	Melawi	12	12	31	31
10	Sekadau	29	29	30	30
11	Sintang	35	35	26	26
12	Kapuas Hulu	48	48	48	48
13	Ketapang	59	59	55	55
14	Kayong Utara	31	31	27	27
Total		405	462	556	556

Sumber data: Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

2.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

2.9.1. Pembangunan Infrastruktur

2.9.2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 83.54%, akan tetapi pada tahun 2018 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 49,71%. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan status yang semula jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi.

Transportasi udara di Kalimantan Barat sampai Tahun 2018 berjumlah 8 Bandara, ada dua bandara yang dimanfaatkan untuk kegiatan militer yaitu Bandara Liku Paloh Kabupaten Sambas dan Bandara Sanggau Ledo di Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Bandara Soesilo yang berada di Kabupaten Sintang sudah tidak berfungsi karena kendala lahan terbatas sulit dalam dalam pengembangan/perluasan dan dipindahkan ke Bandara Tabelian

Sintang yang sudah selesai pembangunannya. Dan direncanakan akan dibangun Bandara di Kota Singkawang dan Kabupaten Kayong Utara dan diharapkan selesai pada Tahun 2023.

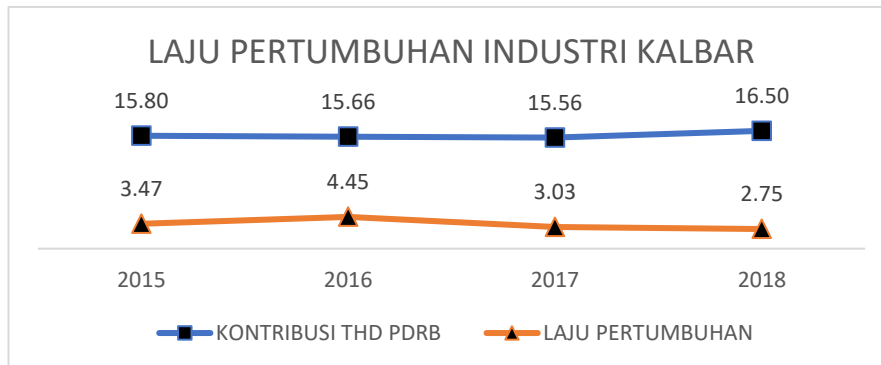
Transportasi Sungai melalui dermaga penyeberangan di Kalimantan Barat memiliki dermaga penyeberangan sebanyak 14, namun yang beroperasi pada saat ini berjumlah 9 dermaga penyeberangan.

Pelabuhan strategis saat ini masih mengandalkan Pelabuhan Dwikora Pontianak sedangkan Pelabuhan Laut Dalam Kijing yang memiliki kapasitas 20 kali lipat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak sedang dalam proses pembangunan dan direncanakan akan *soft launching* pada September 2020.

2.9.3. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Sektor Industri sampai dengan Tahun 2018 tetap memberikan peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat dan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 15,56 persen, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 16,50 persen. Akan tetapi pertumbuhan Industri Kalimantan Barat mengalami penurunan di Tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,75 persen disbanding dengan Tahun 2017 yang laju pertumbuhannya sebesar 3,03 persen.

Gambar 2.27 Laju Pertumbuhan Industri Kalimantan Barat



Selain akibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor Pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil.

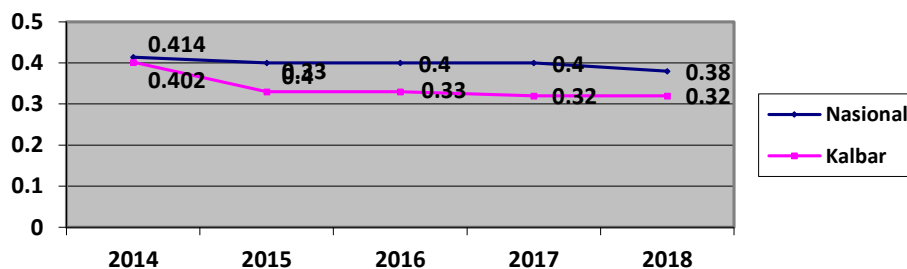
Kondisi tersebut mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Diharapkan kedepan Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien.

Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara

Kesenjangan di Kalimantan Barat cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Nilai indeks gini Kalbar masih di bawah indek gini nasional. Koefisien Gini Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 meningkat tahun sebelumnya sebesar 0,330 menjadi 0,325. Pada tahun 2018 koefisien gini Kalimantan Barat sebesar 0,325 masih sama dengan tahun sebelumnya (Sumber Profil Pembangunan Kalimantan Barat 2019). Namun kondisi koefisien gini Kalimantan Barat masih rendah dibanding Nasional dan sesuai dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menurunkan kesenjangan pembangunan pada tahun 2014-2017.

Gambar 2.28 Gini Rasio Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Profil Pembangunan Kalimantan Barat 2019

Untuk mencapai target (RPJMD) Koefisien Gini sebesar 0,28 pada tahun 2023 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya pengukuran indikator jumlah desa mandiri menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) indek ini merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil pemutahiran Indeks Desa Membangun tahun 2018, dari 2.031 desa di Kalimantan Barat baru 1 desa berstatus desa mandiri, namun sesuai Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDT dan Transmigrasi Nomor : 201 IDM 2019 Perubahan Kedua Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kalimantan Barat tertanggal 31 Juli Tahun 2019 bertambah menjadi 87 desa mandiri. Hal ini jauh melebihi target yang ada di RPJMD Kalimantan Barat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Kalimantan Barat sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, pada akhir RPJMD akan meningkatkan Desa Mandiri sebesar 425 desa. Di sisi lain jumlah desa tertinggal berkurang dari 925 desa tertinggal pada tahun 2018, menjadi 781 desa tertinggal pada tahun 2019. Skor Indeks Demokrasi Indonesia aspek kebebasan sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 sebesar 79,13 (skala 0 -100). Angka ini naik 3,85 poin dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 75,28. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0.02 poin menjadi 79,15.

2.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

2.11.1. Meningkatkan Akses terhadap Perumahan yang Layak, Aman, Terjangkau, dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh

Dalam mencapai indikator tujuan peningkatan akses terhadap perumahan yang layak, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan aspek pelaksanaan tugas pelayanannya, menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Perilaku buruk masyarakat dan swasta dalam pengelolaan daerah tangkapan air di hulu maupun di badan sungai.

2. Masih kurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan meluasnya kekeringan karena cuaca yang ekstrim.
3. Daerah - daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/ banjir yaitu:
 - a. Daerah dengan struktur asli yang labil;
 - b. Daerah perbukitan yang rawan terjadinya longsor;
 - c. Daerah genangan banjir.
4. Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi diperkotaan maupun perdesaan.
5. Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun perdesaan.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan, sebagaimana pedoman teknis yang berlaku.

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang perumahan melalui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah terbangunnya infrastruktur lingkungan pada kawasan pedesaan potensial dan perkotaan. Pencapaian sasaran dan program-program bidang perumahan pada tahun 2018 dijabarkan dalam Tabel 2.33 sebagai berikut.

Tabel 2.33
Pencapaian Indikator Sasaran dan Indikator Program Perumahan
hingga tahun 2018

Program/Kegiatan	Indikator Pencapaian Program/Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan TA. 2018
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah tangga bersanitasi	48,38
Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Luasan / panjang Drainase Permukiman yang terbangun	12429.07 Ha
Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Luasan / panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun (Ha)	4.239,83
Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar	Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lingkungan Kalbar	14
Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Pendataan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	1
Penyusunan Masterplan dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Air Limbah	Tersedianya Masterplan dan DED Air Limbah	1

Program/Kegiatan	Indikator Pencapaian Program/Kegiatan	Capaian Program/Kegiatan TA. 2018
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	55,20
Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)	7.708,72
Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	14
Inventarisasi dan Penyusunan Dataase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ,Terpencil / Rawan Air, Kawasan IKK, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Sistem Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Permukiman	1

Sumber: Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023

2.11.2 Mengurangi Jumlah Kematian dan Jumlah Orang Terdampak, dan Secara Substansial Mengurangi Kerugian Ekonomi Relatif Terhadap PDB Global yang Disebabkan oleh Bencana, dengan Fokus Melindungi Orang Miskin dan Orang-orang dalam Situasi Rentan

Dalam mencapai indikator tujuan pengurangan dampak bencana, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan aspek pelaksanaan tugas pelayanannya, menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Jenis Pelayanan Publik, Permasalahan Pelaksanaannya, serta Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan

Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Penanggulangan Bencana	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Sinkronisasi program dan Sinergitas Pembiayaan antara Pusat dan Daerah belum optimal	Penyusunan program dilaksanakan bersifat sektoral dan tidak terpadu	Adanya Pedoman dan arahan kebijakan secara Nasional dalam penyelenggaraan kebencanaan
Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan	Usulan anggaran untuk kebencanaan tidak dikonsultasikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu	Adanya ego sektoral pada pihak-pihak yang terkait penanganan kebencanaan	Dukungan dan fasilitasi dari Instansi yang menangani kebencanaan
Pengelolaan administrasi perkantoran dan aparatur	Kurang mematuhi pedoman tata naskah dinas resmi dan kurangnya pemahaman terhadap aturan serta	Terbatasnya jumlah aparatur yang ada	Adanya diklat teknis

Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Penanggulangan Bencana	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	perundang-undangan yang berlaku		
Penyusunan Rencana Penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Terikat dengan paradigma lama dimana bencana ditangani setelah terjadinya bencana	Kurangnya keterlibatan pihak terkait dan masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap resiko bencana	Adanya Bimbingan teknis serta peningkatan frekuensi terjadinya bencana
Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang cenderung diabaikan	Kurangnya pemahaman standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis mutlak dibutuhkan
Kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang mendapat tanggapan.	Masyarakat enggan meninggalkan lokasi bencana.	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
Peringatan dini terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak.	Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam peringatan dini.
Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang	Diperlukan waktu dan kerja keras bagi pengumpulan	Perlunya Satuan Reaksi Cepat yang terlatih dan

Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Penanggulangan Bencana	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	cepat, lengkap dan akurat	data dan informasi	lengkap peralatannya
Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah, terutama yang berdampak social ekonomi.	Memerlukan anggaran besar dan kajian teknis lapangan yang akurat	Dana bantuan dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023

Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang penanggulangan bencana adalah menurunnya resiko bencana di wilayah Kalimantan Barat, dengan indikator Indeks Resiko Bencana. Pencapaian sasaran dan program-program bidang penanggulangan bencana pada tahun 2018 dijabarkan dalam Tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35
Sasaran/Program Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2018
Pencapaian Indikator Sasaran dan Indikator Program Bidang
Penanggulangan Bencana hingga tahun 2018

Sasaran/Program	Indikator Sasaran/Program	Perhitungan	Kondisi pada tahun 2018
Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana		130,83
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)/ Kelompok Masyarakat (POKMAS) Peduli Bencana/Desarawan Karhutla dan ataubanjir	9,80%
	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan	Jumlah orang yang akan dilatih dalam tahun berjalan/TARGET jumlah orang yang harus dilatih dalam 5 tahun	3,01%
Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Waktu respon time ke lokasi bencana di 14 Kab/Kota/jumlah Kab/Kota (14 Kab/Kota)	11 Jam
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi	Jumlah daerah terbakar yang ditangani /jumlah daerah rawan	52%

Sasaran/Program	Indikator Sasaran/Program	Perhitungan	Kondisi pada tahun 2018
		bencana yang terbakar	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi/daerah yang perlu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	100%

Sumber: Cascading Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023

2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

2.12.1. Jumlah peserta pro

2.12.2. per yang mencapai minimal ranking Biru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1049/Menlhk/Setjen/PKL.4/12/2019 Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019, Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori Ranking Hijau sebanyak 3 perusahaan, Ranking Biru sebanyak 38 perusahaan dan Ranking Merah sebanyak 7 perusahaan. Adapun peserta proper tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.36

Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Peringkat
	Peringkat Hijau				
1	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI - Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio	Migas Distribusi	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Hijau
2	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI - Terminal BBM Pontianak	Migas Distribusi	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Hijau
3	PT. Aneka Tambang, Tbk. - Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Tayan	Tambang Mineral	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Hijau
	Peringkat Biru				
4	PT. Hok Tong – Pontianak	Karet	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Biru
5	PT. KlranaPrima	Karet	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
6	PT. New Kalbar Processor	Karet	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Biru
7	PT. Sumber Alam	Karet	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Biru
8	PT. Sumber Djantin	Karet	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Biru
9	PT. Erna Djulawati	Kayu Lapis	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
10	PT. Sari Bumi Kusuma	Kayu Lapis	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Biru
11	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk – Pontianak	Makanan dan Minum	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	Biru
12	PT. Wilmar Cahaya Indonesia	Minyak Goreng	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Biru
13	PT. Kalimantan Steel Pontianak	Pengolahan Logam	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Biru
14	PT. PLN (Persero) Sektor Kapas Unit PLTD Sei Raya	PLTD	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Biru
15	PT. PLN (Persero) Sektor Kapas Unit PLTD Sei Wei	PLTD	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	Biru

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Peringkat
16	PT. PLN (Persero) Sektor Kapuas Unit PLTD Siantan	PLTD	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Biru
17	PT. Aditya Agroindo	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
18	PT. Agro Lestari Mandiri	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
19	PT. AgroPalindo Sakti – Sanggau	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
20	PT. AgronusaInvestama I – Sambas	Sawit	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	Biru
21	PT. AgronusaInvestama II – Pahauman	Sawit	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	Biru
22	PT. AyuSawit Lestari	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
23	PT. Bintang harapanDesa – Sanggau	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
24	PT. BumiPratamaKhatulistiwa	Sawit	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	Biru
25	PT. Cipta Usaha Sejati	Sawit	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	Biru
26	PT. Fajar Saudara Kusuma	Sawit	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	Biru
27	PT. Gunajaya Karya Gemilang	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
28	PT. Harapan Sawit Lestari	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
29	PT. Indo Sawit Kekal	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
30	PT. Mitra Inti Sejati Plantation	Sawit	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	Biru
31	PT. Multi Jaya Perkasa	Sawit	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	Biru
32	PT. Multi Prima Entakai	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
33	PT. Paramita Internusa Pratama	Sawit	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Biru
34	PT. Parna Agromas	Sawit	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	Biru

No.	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Peringkat
35	PT. Patiware	Sawit	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	Biru
36	PT. Peniti Sungai Purun	Sawit	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	Biru
37	PT. Poliplant Sejahtera	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Biru
38	PT. Rana Westu Kencana	Sawit	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	Biru
39	PT. Riau Agrotama Plantation	Sawit	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Biru
40	PT. Saban Sawit subur	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
41	PT. Sime Indo Agro	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Biru
	Peringkat Merah				
42	PT. Perkebunan Nusantara XIII PKS Parindu	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Merah
43	PT. Perkebunan Nusantara XIII PKS Gunung Meliau	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Merah
44	PT. Bonti Permai Jayaraya	Sawit	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	Merah
45	PT. Kalimantan Sanggar Pusaka	Sawit	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	Merah
46	PT. Mitra Austral Sejahtera	Sawit	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Merah
47	PT. Sandika Nata Palma	Sawit	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Merah
48	PT. Sinar Dinamika Kapuas	Sawit	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	Merah

2.12.2. Jumlah limbah B3 yang dikelola dan tertangani sesuai peraturan perundangan

Data timbulan sampah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.37
Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah	
			(Liter/hari)	(m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Sambas	532.609	852.174	852,174
2	Kab. Mempawah	261.299	418.078	418,078
3	Kab. Sanggau	463.995	742.392	742,392
4	Kab. Ketapang	504.008	806.413	806,413
5	Kab. Sintang	413.369	661.390	661,390
6	Kab. Kapuas Hulu	258.984	414.374	414,374
7	Kab. Bengkayang	251.320	402.112	402,112
8	Kab. Landak	372.609	596.174	596,174
9	Kab. Sekadau	199.576	319.322	319,322
10	Kab. Melawi	205.298	328.477	328,477
11	Kab. Kayong Utara	110.899	177.438	177,438
12	Kab. Kubu Raya	570.914	913.462	913,462
13	Kota Pontianak	637.723	1.020.357	1.020,357
14	Kota Singkawang	219.061	350.498	350,498
Jumlah		5.001.664	8.002.662	8.002,662

Sumber : DLHK Prov. Kalbar 2019

Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/ Kota/ Nama TPA	TitikKoordinat	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Pontianak (TPA Batulayang)	LU 0° 1' 28,45", BT 109 ° 19' 20,13"	26,60	1.373,03	<i>Open Dumping</i> (TPA dengan sistem <i>Sanitary Landfill</i> sudah tidak berfungsi)
2	Kab. Kayong Utara (TPA Desa Pampang Harapan - Sukadana)	LS 0° 16' 42", BT 110 ° 0' 52"	-	36,00	<i>Open Dumping</i>
3	Kab. Melawi (TPA Nanga Pinoh)	LS 0° 07' -1° 21', BT 111 ° 07'- 112 ° 27'	6,50	35,00	<i>Open Dumping</i>
4	Kab. Kapuas Hulu (TPA Sibau Hulu)	LS 0° 56' 16,02", BT 112 ° 50' 8,64"	0,00	0,00	<i>Open Dumping</i>
5	Kab. Sekadau (TPA Kab. Sekadau)	LS 0° 01' 04,9", BT 110 ° 51' 09,62"	4,50	34,00	<i>Controlled landfill</i> (lahan urug terkontrol)
6	Kab. Sintang (TPA Nenak)	LU 0° 1' 46,64",	6,00	96,25	<i>Open Dumping</i>

No	Kabupaten/ Kota/ Nama TPA	TitikKoordinat	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BT 111 ° 27' 20,51"			
7	Kab. Bengkayang (TPA Kab. Magmagan)	LU 0° 54' 16,98", BT 109 ° 30' 21,29"	10,00	20,80	<i>Open Dumping</i>
8	Kab. Landak (TPA Tebedak Landak)	LU 0° 20' 20,39", BT 110° 0' 14,45"	6,60	300,00	<i>Open Dumping</i>
9	Kab. Sambas				
	TPA Sorat Kab. Sambas	LU 1° 19' 51,44", BT 109 ° 22' 33,24"	13,00	72,00	<i>Open Dumping</i>
	TPA Salatiga	LU 1° 7' 11,65", BT 108 ° 58' 14,73"	-	-	<i>Open Dumping</i>
	TPA Teluk Keramat	LU 1° 25' 42,50", BT 109 ° 13' 26,09"	-	-	<i>Open Dumping</i>
	TPA Jawai Selatan	LU 1° 14' 13,33",	-	-	<i>Open Dumping</i>

No	Kabupaten/ Kota/ Nama TPA	TitikKoordinat	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BT 109 ° 0' 31,78"			
10	Kab. Mempawah (TPA Bakau Besar)	LU 0° 18' 9,97", BT 109 ° 2' 30,00"	2,20	160,00	<i>Open Dumping</i>
11	Kab. Kubu Raya (TPA Rasau Jaya)	LS 0° 12' 10,39", BT 109 ° 23' 56,73"	4,00		<i>Open Dumping</i>
12	Kab. Sanggau				<i>Open Dumping</i>
	1. TPA Sungai Kosak	LS 0° 9' 19", BT 110 ° 35' 47"			<i>Open Dumping</i>
	2. TPA Sungai Setia	LS 0° 15' 31", BT 110 ° 6' 4"			<i>Open Dumping</i>
	3. TPA Mungguk Simpang Tajor	LS 0° 15' 31", BT 110 ° 6' 4"			<i>Open Dumping</i>
	4. TPA Batang Tarang	LS 0° 7' 21", BT 110 ° 7' 55"			<i>Open Dumping</i>
	5. TPA Bodok	LS 0° 13' 31", BT 110 ° 25' 22"			<i>Open Dumping</i>
	6. TPA Tanjak Mulung	LS 0° 7' 13", BT 110 ° 18' 1"			<i>Open Dumping</i>

No	Kabupaten/ Kota/ Nama TPA	TitikKoordinat	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7. TPA Balai Sebut	LS 0° 27' 30", BT 110 ° 51' 43"			<i>Open Dumping</i>
	8. TPA Sosok	LS 0° 17' 0", BT 110 ° 13' 49"			<i>Open Dumping</i>
	9. TPA Patoka	LS 0° 58' 1", BT 110 ° 21' 44"			<i>Open Dumping</i>
	10. TPA Simpang Bantan	LS 0° 50' 32", BT 110 ° 26' 30"			<i>Open Dumping</i>
	11. TPA Kembayan	LS 0° 33' 51", BT 100 ° 23' 24"			<i>Open Dumping</i>
	12. TPA Bereng Bekawat	LS 0° 40' 50", BT 110 ° 23' 10"			<i>Open Dumping</i>
13	Kab. Ketapang				
	1. TPA Sungai Awan Kiri	LS 1° 43' 22", BT 110 ° 00' 57"	9,00	60,00	<i>Controlled Landfill</i>
	2. TPA Pinang	LS 0° 30' 04",			<i>Open Dumping</i>

No	Kabupaten/ Kota/ Nama TPA	TitikKoordinat	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BT 110 ° 18' 08"			
14	Kota Singkawang (Wonosari)	LU 0° 54' 47,92", BT 109 ° 1' 42,03"	8,57	194,60	<i>Controlled Landfill</i>

Sumber : DLHK Prov. Kalbar 2019

Tabel 2.39
Data Timbulan Sampah dan Data Sampah Terkelola Kab/Kota
di Kalimantan Barat

NO	Kab/Kota	Timbulan	Terkelola/ Terangkut ke TPA
1	Kota Pontianak	1.802,44 m ³ /hari	1.547 m ³ /hari
2	Kubu Raya	913,462 m ³ /hari	N/A
3	Mempawah	722,88 m ³ /hari	162 m ³ /hari
4	Singkawang	167,32 m ³ /hari	167,33 m ³ /hari
5	Sambas	1.520,95 m ³ /hari	170 m ³ /hari
6	Bengkayang	51 m ³ /hari	51m ³ /hari
7	Landak	150.158,4 m ³ /hari	14.147,4 m ³ /hari
8	Sanggau	972,3 m ³ /hari	206,7 m ³ /hari
9	Sekadau	337 m ³ /hari	33 m ³ /hari
10	Sintang	993.022,5 m ³ /hari	264,66 m ³ /hari
11	Melawi	373 m ³ /hari	68 m ³ /hari
12	Kapuas Hulu	601.840 m ³ /hari	72,59 m ³ /hari

NO	Kab/Kota	Timbulan	Terkelola/ Terangkut ke TPA
13	Kayong Utara	98,80 m3/hari	24 m3/hari
14	Ketapang	756,01 m3/hari	120 m3/hari

Keterangan : TDA = Tidak Ada Data

Sumber : DLHK Prov. Kalbar 2019

Tabel 2.40

Tabel Data Bank Sampah di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah
1	Kota Pontianak	13	Bank Sampah Rosela Purnama VII
			Bank Sampah Rosela Siantan Tengah
			Bank Sampah Borneo,
			Bank Sampah Selamat Sejahtera
			Bank Sampah Bina Sejahtera
			Bank Sampah Wahana Bersama
			Bank Sampah Melati
			Bank Sampah Ananda
			Bank Sampah Rumput Hias
			Bank Sampah Palm Asri
			Bank Sampah Berkah Mendawai
			Bank Sampah Beting Permai
			Bank Sampah Sungai Beliung
2	Kubu Raya	1	Bank Sampah Maju Bahagia
3	Mempawah	1	Bank Sampah Aisyah

No	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah
4	Singkawang	2	Bank Sampah Muslimah Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
			Bank Sampah Serumpun Sejati
5	Sambas	4	Bank Sampah Tengguli Permai (BTSP), Bank Sampah Rezeki, Bank Sampah Bela Terigas, Bank Sampah Aisyiyah
6	Bengkayang	3	Bank Sampah Kelurahan Bumi Emas, Bank Sampah Desa Setia Jaya, Bank Sampah Sungai Duri (Bank Sampah tersebut sudah terbentuk namun belum operasional)
7	Landak	-	-
8	Sanggau	1	Bank Sampah Sentana
9	Sekadau	1	Bank Sampah Mekar Lestari
10	Sintang	4	Bank Sampah Kita,
			Bank Sampah Berkah Bersemi
			Bank Sampah Sehat Puskesmas Dara Juanti
			Bank sampah Rezeki
11	Melawi	-	-
12	Kapuas Hulu	-	-
13	Kayong Utara	-	-
14	Ketapang	1	Bank Sampah Ketapang (Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan)

Sumber : DLHK Prov. Kalimantan Barat, 2019

Tabel 2.41
Neraca Limbah B3 Skala Provinsi

No	Jenis Limbah B3	Jumlah (Ton)
1	Minyak Kotor	446.681,2
2	Majun Terkontaminasi	8,59805
3	Filter bekas	16,43835
4	Aki bekas	13,89659
5	Kemasan terkontaminasi	27,03036
6	Oli bekas	244,48745
7	Lampu TL	1,194172
Jumlah		446.992,84

2.12.3. Dokumen Strategi Risiko Bencana (PRB) Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk Provinsi Kalimantan Barat terdapat Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat yang disusun berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB. Kajian Risiko Bencana memaparkan hasil analisis data dan peta yang melingkupi bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana. Hasil dari kajian risiko bencana juga memberikan beberapa rekomendasi dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen yang disusun secara komprehensif ini diharapkan dapat disepakati bersama oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kajian risiko bencana ini. Bentuk dukungan dan legalitas dari pengambil kebijakan di daerah juga diperlukan agar hasil kajian risiko bencana ini dapat dijadikan acuan dalam upaya penanggulangan bencana khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan kesepakatan dan legalisasi dari pemerintah daerah dapat menjadi perkuatan dan pengembangan hasil kajian risiko untuk pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, kajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan evaluasi minimal dalam 5 (lima)

tahun sekali. evaluasi dilakukan agar keabsahan data dan informasi yang akan dijadikan dasar perencanaan penanggulangan bencana dapat selalu diperbaharui. Proses evaluasi kajian risiko bencana dapat diselaraskan dengan pengembangan kajian risiko lintas batas wilayah administrasi. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya pengembangan kajian risiko bencana bersama antar wilayah administrasi yang berdekatan langsung.

2.12.4. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2020, hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penurunan Emisi Gas Kaca di Provinsi Kalimantan Barat hingga Tahun 2020. Provinsi Kalimantan Barat menargetkan Penurunan Emisi sebesar 58,68 % dengan sumbangan penurunan emisi terbesar di sektor lahan (Kehutanan, Lahan Gambut, dan Pertanian/Perkebunan), sebagaimana tercantum pada table di bawah ini :

Tabel 2.42
Proyeksi dan Target Penurunan Emisi dengan Mitigasi RAD GRK
Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2020

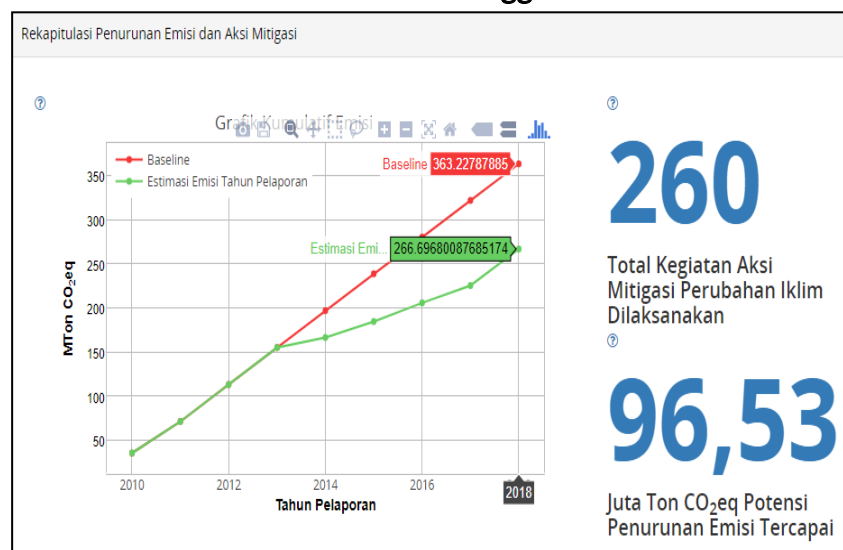
No.	Sektor	Proyeksi Emisi GRK 2020		Target Penurunan Emisi dgn Mitigasi RAD GRK 2020	
		(ton CO ₂ -eq)	(%)	(ton CO ₂ -eq)	(%)
1	Kehutanan dan Lahan Gambut	533.589.632,72	93,82	309.960.000,00	92,8
2	Pertanian	19.317.345,60	3,39	18.930.988,00	5,67
3	Energi	3.750.000,00	0,65	2.446.900,00	0,73
4	Transportasi	2.483.947,20	0,43	2.168.105,96	0,64
5	Industri	8.700.000,00	1,53	0	0

No.	Sektor	Proyeksi Emisi GRK 2020		Target Penurunan Emisi dgn Mitigasi RAD GRK 2020	
		(ton CO ₂ -eq)	(%)	(ton CO ₂ -eq)	(%)
6	Limbah	861.726,00	0,15	232.289,00	0,07
TOTAL		568.702.651,52	100%	333.738.282,96	58,68

Sumber : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penurunan Emisi Gas Kaca di Provinsi Kalimantan Barat

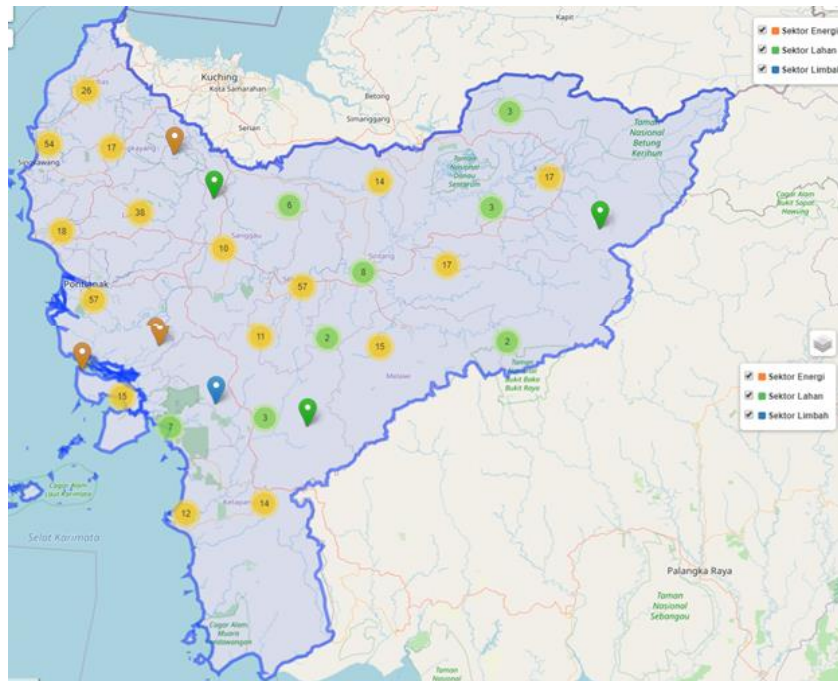
Hingga tahun 2018, Kalimantan Barat telah melaksanakan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui 260 kegiatan aksi dengan total potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 96,53 juta ton CO₂-eq, sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.29
Potensi Penurunan Emisi dengan Mitigasi RAD GRK
Kalimantan Barat Hingga Tahun 2018



Sumber : Laporan PEP on line RAD GRK Kalimantan Barat (2019)

Gambar 2.30
Sebaran Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Barat
hingga Tahun 2018



Sumber : Laporan PEP on line RAD GRK Kalimantan Barat (2019)

2.13. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

2.13.1. Jumlah luas kawasan konservasi perairan di daerah

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Total garis pantai sepanjang 1.398 km. Luas wilayah laut Provinsi Kalimantan Barat sebesar 30.364,59 km² dimana tersebar 245 buah pulau-pulau kecil, dengan 156 pulau berpenghuni dan 89 buah pulau lainnya belum berpenghuni. Provinsi Kalimantan Barat

juga memiliki potensi ekosistem pesisir seperti mangrove 229.396,60 Ha , terumbu karang 269.563,22 ha potensi sumberdaya ikan lestari mencapai 230.000 ton pertahun serta sumberdaya hayati dan non-hayati maupun sumberdaya buatan lainnya. Adanya potensi tersebut dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini. Adapun pemanfaatan tersebut meliputi kegiatan konservasi; kepelabuhan; penangkapan ikan; budidaya laut; wisata pantai dan perairan; serta alur pelayaran, pipa bawah laut, kabel bawah laut dan ruaya biota dilindungi.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, memperluas lapangan kerja, mendukung peningkatan ekspor non migas dan meningkatkan konsumsi hasil perikanan.

2.13.2. Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Kalimantan Barat berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711). Wilayah ini meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Potensi Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat melalui Perikanan Tangkap memiliki jumlah kapal perairan laut sebanyak 10.152 unit, Armada perairan umum 6467 unit, jumlah nelayan 49.792 orang.

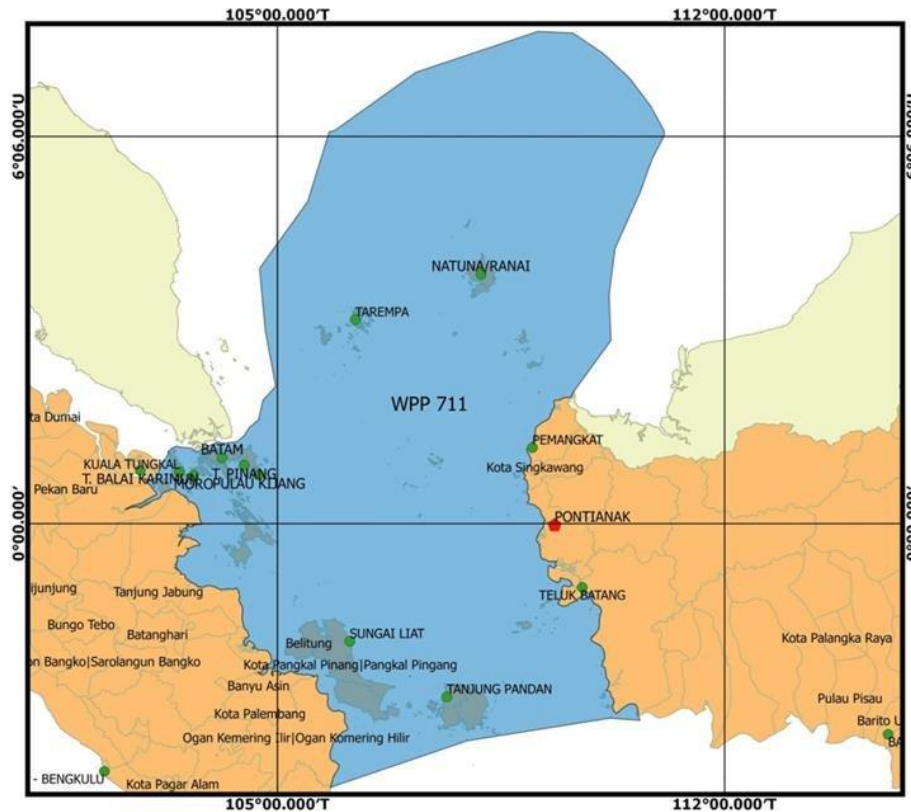
Tabel 2.43
Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2013 – 2018

Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Budidaya	Perikanan Tangkap (Rp Juta)			Budidaya
	Laut	Umum	Jumlah		Laut	Umum	Jumlah	
2013	120.081,00	43.454,00	163.535,00	79.154,00	2.230.780,46	612.093,98	2.842.874,44	3.259.808,00
2014	165.623,00	27.297,00	192.920,00	57.935,05	1.880.285,31	454.821,76	2.335.107,07	2.242.148,76
2015	161.750,50	24.616,03	186.366,53	65.266,84	3.348.595,73	578.530,19	3.927.125,92	1.969.508,89
2016	114.003,00	25.989,00	139.992,00	52.301,18	2.795.657,70	812.446,48	3.608.104,18	2.078.068,65
2017	128.103,17	34.264,05	162.367,22	77.927,15	1.968.884,87	615.643,34	2.584.528,21	2.212.108,71
2018	112.347,44	52.907,53	165.254,97	83.443,26	3.370.423,00	1.058.150,00	4.428.573,00	3.064.908,00

**Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018*

Gambar 2.31

Wilayah Pengelolaan Perikanan 711



(Sumber: Permen. Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014)

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Tujuan 14 terkait Perikanan Tangkap Berkelanjutan adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

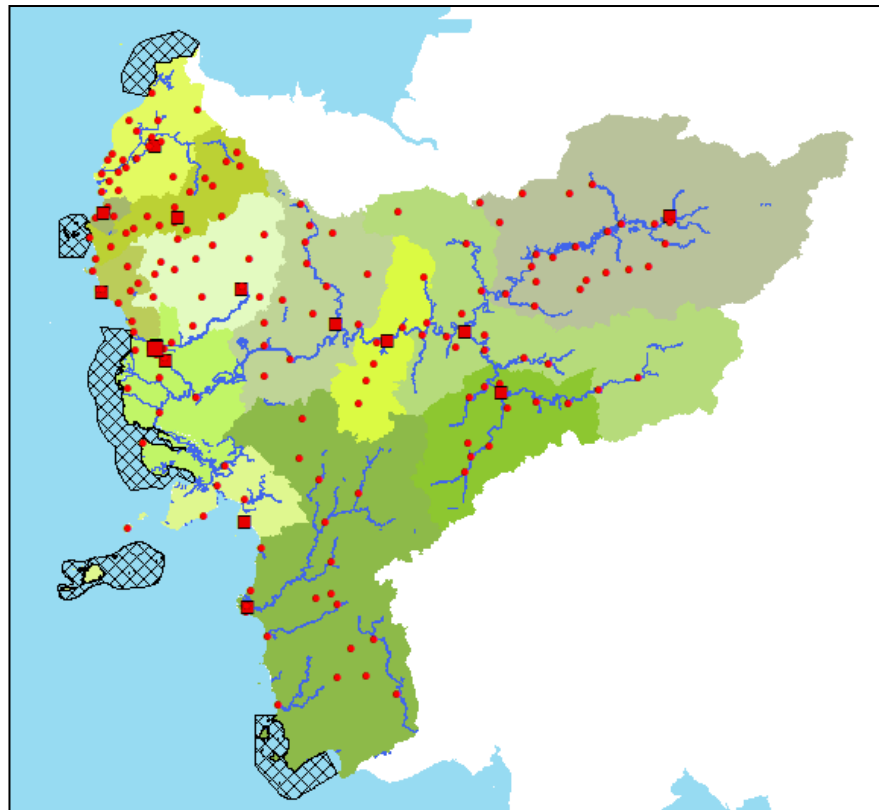
1. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
2. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.

3. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
5. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.

2.13.3. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Gambar 2.32

Kawasan Konservasi Perairan Laut Provinsi Kalimantan Barat



(Sumber: Perda Prov. Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat)

Kalimantan Barat memiliki 4 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan 1 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Air. KKPD

yang telah ditetapkan antara lain KKPD Sambas, KKPD Bengkayang, KKPD Kubu Raya, dan KKPD Ketapang. Adapun, KPA Air berada di Selat Karimata Kab. Kayong Utara.

Pada Tahun 2018, telah dilakukan rehabilitasi pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rehabilitasi ini bertujuan untuk menjaga dan mengembalikan fungsi ekosistem agar kembali seperti sedia kala.

Tabel 2.44
Realisasi Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Kalimantan Barat

Target	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah wilayah pesisir dan Pulau pulau kecil yang direhabilitasi	3	3	3	3	4

Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun 2019-2023

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
2. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.

3. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
4. Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan.
5. Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan intrusi air laut).
6. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya.
7. penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
8. Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll).

2.13.4. Pemberdayaan Nelayan

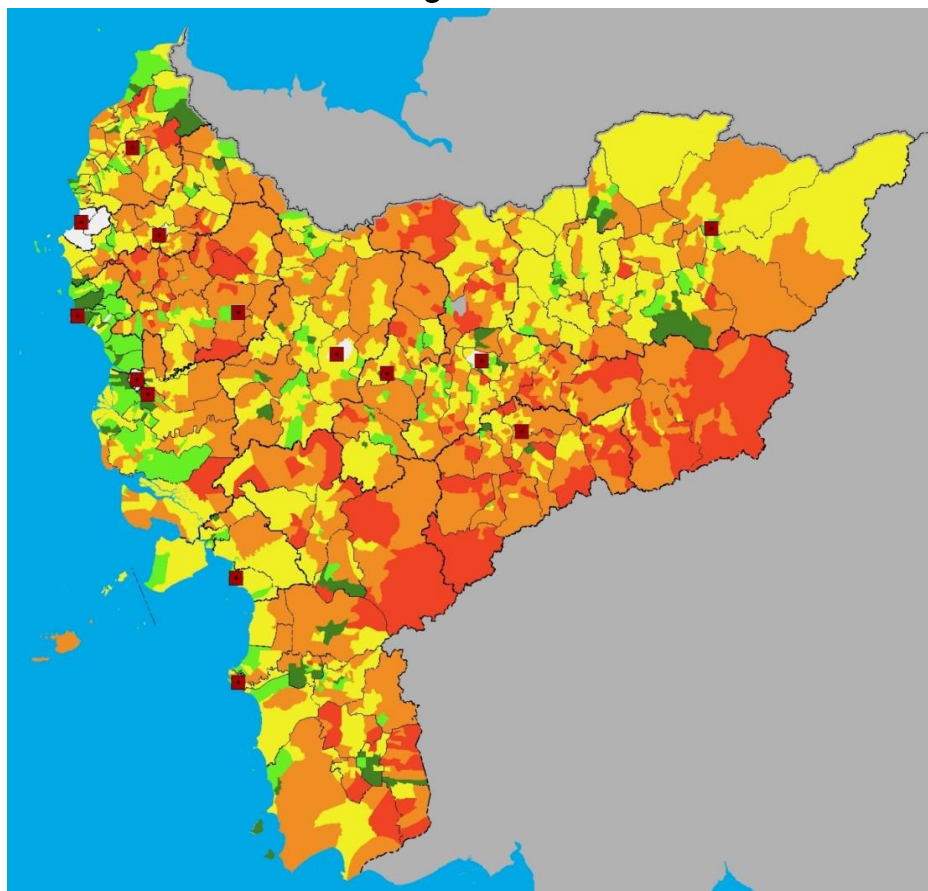
Berdasarkan Kep. Dirjen PPMD, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019 Kalimantan Barat beru terdapat 87 (4,28%) Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian wilayah Pesisir relatif lebih maju dibandingkan wilayah pedalaman. Namun, tidak serta merta wilayah Pesisir terbebas dari Desa Tertinggal.

Masih adanya Desa Tertinggal pada Wilayah Pesisir tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan dalam rangka meningkatkan Indeks Desa Membangun mutlak dan pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk mencapai Tujuan 14.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Tujuan 14 terkait Pemberdayaan Nelayan relatif sama dengan Perikanan Tangkap Berkelanjutan adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan.

Gambar 2.33

Peta Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat



Ket: ■ Tertinggal ■ Sangat Tertinggal

(Sumber: SK Dirjen PPMD, Kemen. Desa, PDT, dan Trans Nomor 201 Tahun 2019)

2.13.5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dengan Ruang laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu melibatkan dan

mendapatkan dukungan dari seluruh Stakeholder terkait dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2018, dari target 94 Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan, baru tercapai 91 Kelompok yang dapat dibina. Adapun, kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan baru sebesar 42,85% (Tahun 2018).

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Tujuan 14 terkait Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fisihing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
2. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan masih terbatas, khususnya yang mendukung kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Rendahnya aksesibilitas dan kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil, sehingga turut membatasi pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Penegakan hukum (Law Enforcement) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
5. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.14. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

2.14.1. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 telah ditunjuk

kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600 hektar (56,65 %) yang berfungsi sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas ± 1.621.046 hektar (19,32 %), hutan lindung seluas ± 2.310.873 hektar (27,54 %), hutan produksi terbatas seluas ± 2.132.398 hektar (25,42 %), hutan produksi biasa seluas ± 2.127.366 hektar (25,36 %) dan hutan produksi konversi seluas ± 197.918 hektar (2,36 %). Dengan tutupan lahan berhutan seluas 5.656.986 Ha meliputi hutan lahan kering primer seluas 2.212.799 Ha, hutan lahan kering sekunder seluas 2.128.532 Ha, Hutan mangrove sekunder seluas 116.732 Ha, Hutan rawa primer seluas 7.337 Ha, hutan rawa sekunder seluas 1.127.463 Ha dan hutan tanaman seluas 64.123 Ha.

2.14.2. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Tabel 2.45

Data Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Unit Kerja	Unit KPH	Nama RPH	Luas Kawasan Hutan (Ha)
1	KPH Sambas	Unit I	Rph Paloh	39.682
			Rph Sambas	47.934
			Rph Pemangkat	40.366
2	KPH Bengkayang	Unit li	Rph Lumar	36.828
			Rph Suti Semarang	44.417
			Rph Siding	66.418
3	KPH Mempawah	Unit Viii	Rph Segedong	41.066
			Rph Sadaninang	53.516

No.	Unit Kerja	Unit KPH	Nama RPH	Luas Kawasan Hutan (Ha)
4	KPH Landak	Unit Vi	Rph Air Besar	55.672
		Unit Vii	Rph Darit	60.176
		Unit Vii	Rph Pahuman	19.718
5	KPH Kubu Raya	Unit Xxxiii	Rph Terentang	109.610
			Rph Kubu	182.110
			Rph Rasau	28.322
6	KPH Melawi	Unit Xxiv	Rph Belimbing	179.465
		Unit Xiii	Rph Tempunak	55.999
		Unit Xxii	Rph Sayan	123.081
		Unit Xxiii	Rph Sokan	188.515
		Unit Xxii	Rph Nanga Ella	154.301
7	KPH Kayong Utara	Unit Xxv	Rph Melano	62.439
			Rph Pulau Maya	96.035
			Rph Labai	159.660
8	KPH Ketapang Utara	Unit Xxviii	Rph Biya Hulu	96.841
		Unit Xxvi	Rph Simpang Dua	258.539
		Unit Xxvii	Rph Hulu Sungai	325.848
9	KPH Ketapang Selatan	Unit Xxxii	Rph Manis Mata	172.693
		Unit Xxx	Rph Tanah Merah	71.634
		Unit Xxix		180.127
		Unit Xxix	Rph Nanga Tayap	265.381
			Rph Tumbang Titi	

No.	Unit Kerja	Unit KPH	Nama RPH	Luas Kawasan Hutan (Ha)
10	KPH Sekadau	Unit Xii	Rph Nanga Taman	27.864
			Rph Kapuas	40.898
			Rph Nanga Mahap	64.905
11	KPH Sanggau Barat	Unit V	Rph Toba	49.912
		Unit V	Rph Batang Tarang	62.847
		Unit lii	Rph Sekayam	76.092
		Unit lii	Rph Entikong	47.704
12	KPH Sanggau Timur	Unit Iv	Rph Jangkang	141.718
		Unit Iv	Rph Kebayan	73.029
		Unit Iv	Rph Bonti	54.123
		Inut Xi	Rph Belitang Hilir	71.620
13	KPH Sintang Timur	Unit Xiv	Rph Kayan Hulu	107.967
		Unit Xv	Rph Kayan Hilir	207.079
		Unit Xvii	Rph Serawai	323.808
		Unit Xvi	Rph Ambalau	324.834
14	KPH Sintang Utara	Unit Xxxiv	Rph Kelam Permai	45.680
		Unit Xxxiv	Rph Merakai I	39.021
		Unit Ix	Rph Ketungau Hulu	135.317
		Unit X	Rph Merakai li	50.469
15	KPH Kapuas Hulu Utara	Unit Xviii	Rph Mataso	72.173

No.	Unit Kerja	Unit KPH	Nama RPH	Luas Kawasan Hutan (Ha)
		Unit Xviii	Rph Lanjak	78.649
		Unit Xix	Rph Embaloh	117.336
		Unit Xix	Rph Benua Tengah	74.586
		Unit Xix	Rph Mendalam	124.003
16	KPH Kapuas Hulu Timur	Unit Xx	Rph Kalis	223.137
			Rph Hulu Kapuas	251.386
17	KPH Kapuas Hulu Selatan	Unit Xxi	Rph Seberuang	65.543
			Rph Bunut Hilir	83.421
			Rph Mentebah	155.965
			Rph Hulu Gurung	74.686
			Rph Silat Hulu	58.283

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 30 Juli 2018

2.14.3. Luas Kawasan Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya

Luas lahan kritis yang telah dilakukan pemulihan selama periode 2013 – 2018 adalah seluas 10.464,04 Ha dari total luas lahan kritis Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas lahan kritis Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah seluas 1.015.631 Ha terdiri dari seluas 9.61.891,93 Ha (di dalam kawasan hutan) dan seluas 53.839,16 Ha (diluar kawasan hutan).

2.14.4. Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem di Kalimantan Barat hingga saat ini baru terdapat satu perizinan

yaitu IUPKKH-RE an. PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari dengan luas sebesar + 14.080 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya.

2.14.5. Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Luas lahan kritis yang telah dilakukan pemulihan selama periode 2013– 2018 adalah seluas 10.464,04 Ha dari total luas lahan kritis Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luas lahan kritis Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah seluas 1.015.631 Ha terdiri dari seluas 9.61.891,93 Ha (di dalam kawasan hutan) dan seluas 53.839,16 Ha (diluar kawasan hutan).

Tabel. 2.46
Daftar Rincian Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten	Dalam Kawasan Hutan		Di Luar Kawasan Hutan		Keterangan
		Sangat Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Kritis	
1	Kab. Bengkayang	650,59	53.736,00	228,81	3.498,95	
2	Kab. Kapuas Hulu	4.955,63	80.678,54	1.047,38	6.471,52	
3	Kab. Kayong Utara	83,37	3.191,40		106,72	
4	Kab. Ketapang	19.057,61	184.041,35	234,71	4.519,20	
5	Kota Pontianak	-	-	-	-	

No.	Kabupaten	Dalam Kawasan Hutan		Di Luar Kawasan Hutan		Keterangan
		Sangat Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Kritis	
6	Kota Singkawang	-	404,06	-	191,22	
7	Kab. Kubu Raya	0,11	2.429,87		39,73	
8	Kab. Landak	1.584,62	102.195,87	73,03	10.294,23	
9	Kab. Melawi	330,39	124.900,14	312,37	2.091,87	
10	Kab. Mempawah	-	9.217,46	1,40	2.717,48	
11	Kab. Sambas	306,39	11.920,31	33,55	1.066,33	
12	Kab. Sanggau	1.308,06	172.318,50	790,06	7.597,34	
13	Kab. Sekadau	150,60	49.000,65	1.082,82	6.027,31	
14	Kab. Sintang	2.046,09	136.993,44	440,35	4.869,45	
	No data		117,89		3,34	
	Total Kritis				1.015.631,09	

Sumber : BPDASHL Kapuas, Agustus 2019

2.15. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk

Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan

2.15.1. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan

Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai menurunnya jumlah kejadian pelanggaran trantibmas di Kalbar dimana pada tahun 2018 sebanyak 150 kejadian dan tahun 2019 diperkirakan sebanyak 130 kejadian berarti diperkirakan penurunan sebanyak 20 kejadian. Jika dilihat kasus kejahatan pembunuhan di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 27 kasus sedangkan tahun 2019 sampai dengan bulan Juli sebanyak 12 kasus mengalami penurunan sebanyak 15 kasus. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat sudah mulai tinggi, bhabinkamtibmas telah berhasil melakukan penyuluhan ditingkat pedesaan dengan program *door to door system* (DDS), kegiatan preventif yang dilaksanakan berjalan maksimal dengan mengacu kepada *anatomy of crime*, dan kegiatan preventif yaitu patroli dilaksanakan tepat sasaran, disamping itu juga aparat keamanan bertekad memerangi peredaran narkoba dan kelompok kejahatan lainnya terutama daerah wilayah yang rawan masuknya narkoba di wilayah Kalimantan Barat dan petugas Kantiban umum telah berhasil menjaga ketentraman masyarakat di Kalbar .

Target pencapaian jumlah kejadian pelanggaran trantibmas di Kalbar dan jumlah kasus kejahatan pembunuhan di Kalimantan Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2023 diperkirakan akan menurun mengingat tingkat preventif aparat keamanan dalam mengatasi kasus ini semakin tinggi.

Untuk jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 452 kasus sedangkan tahun 2019 ditargetkan sebanyak 233 kasus, berarti mengalami penurunan 119 kasus dan target pencapaian sampai dengan tahun

2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 190 kasus, penurunan ini dikarenakan meningkatnya advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan/anak (KIP/KIA) kepada pemangku kepentingan terkait, dan memperkuat mekanisme koordinasi dalam pencegahan penanganan KIP/KIA serta peningkatan efektivitas pelayanan pengaduan terhadap kekerasan dalam rumah tangga perempuan dan anak.

Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, pemerintah melakukan dua strategi yaitu : (1) pembuatan kebijakan dan; (2) program yang relevan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun strategi pembuatan kebijakan, antara lain :

1. Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi oleh Bhabinkamtibmas dimulai dari tingkat pedesaan dengan program *door to door system*.
2. Meningkatkan kegiatan preventif dengan mengacu kepada *antomi of crime*
3. Meningkatkan program kerja yang diberi nama berkibar (bekerja dengan benar) untuk memacu semua fungsi teknis kepolisian di Kalbar .
4. Meningkatkan pemerangan pengedar dan pengguna narkoba dan kelompok kejahatan lainnya ;
5. Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat Kalbar dan pengamanan objek vital.
6. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan/anak (KIP/KIA) kepada pemangku kepentingan terkait memperkuat mekanisme dalam pencegahan dan penanganan KIP/KIA.
7. Meningkatkan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Membuat peraturan daerah untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan perempuan dan anak melalui intervensi yang menyeluruh dan penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan kota layak anak di 14 Kabupaten/Kota ;
9. Menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak ;
10. Penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga ;
11. Penguatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan didukung satgas perlindungan perempuan dan anak (satgas PPA) ;
12. Penyelenggaraan trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar
13. Peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
Strategi program yang relevan, antara lain :
 1. Program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat Kalbar melalui *door to door system* (DDS) ;
 2. Peningkatan patroli oleh aparat kepolisian di wilayah Kalbar ;
 3. Program kerja berkinerja dengan benar (Berkibar) untuk memacu semua fungsi teknis kepolisian di Kalbar dalam bekerja;
 4. Peningkatan Kantibmas kepada masyarakat baik yang dilakukan aparat keamanan dan masyarakat ;
 5. Peningkatan perlindungan hak perempuan ;
 6. Pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak ;
 7. Peningkatan peran forum anak sebagai pelopor pencegahan kekerasan ;

8. Penguatan system perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteraan sosial anak-integratif ;
9. Pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan dan perlindungan anak ;
10. Peningkatan parsipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota layak anak dan forum anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ;
2. Penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi ;
3. Peningkatan koordinasi dari pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan ;
4. Peningkatan Kantibmas baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat keamanan dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas dilingkungan masing-masing.

2.15.2. Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program dalam penegakan hukum. Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara, upaya-upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

diwujudkan melalui program bantuan hukum dan pelayanan bantuan hukum baik di pengadilan maupun di luar gedung pengadilan, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, serta penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Upaya bantuan hukum untuk melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar diwujudkan melalui Program bantuan hukum non litigasi dan litigasi bagi masyarakat Kalbar dan perusahaan untuk meminta keadilan oleh pemerintah dalam memberikan mediasi penyelesaian kasus perkara baik perkara antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan dengan pemerintah di 14 Kabupaten/Kota, dengan tingkat bantuan hukum non litigasi yang dilayani kepada masyarakat serta perusahaan pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus sedangkan litigasi sebanyak 5 kasus yang saat ini kasusnya masih dalam proses penanganannya yaitu :

1. Permohonan mediasi kepada Biro Hukum untuk mempertemukan perusahaan yang berada diareal PT. Natalisa, terkait sengketa lahan perkebunan kepala sawit di Kabupaten Landak, kasus masih proses selesai;
2. Dari Agus Herianto, S.Sos, M.Si (Ahli waris dari Almarhumah N. Urai Zainun), perihal mohon bantuan penyelesaian sewa beli atas tanah dan bangunan di jalan Imam Bonjol no. 386 Pontianak, kasus masih proses selesai;
3. Permohonan dari Kiang Mua Alias Ng.Andry, perihal mohon bantuan penyelesaian masalah tanah serta dugaan sertifikat hak milik siluman alias sertifikat hak milik bodong daerah hukum BPN Kabupaten Kubu Raya, serta hilangnya/belum ditemukan peta induk atas tanah milik no.28213 tahun 1982 atas nama Ng Andry, masih dalam proses;

4. Kuasa Hukum PT.ESRA ARIYASA UTAMA Flavia Flora permohonan memberikan solusi terhadap Bapak Haji Budiman Arpan dan Bapak Haji Nazirin mengenai kasus lahan, Proses penanganan masalah tersebut diserahkan ke Komnas HAM Perwakilan Kalbar pada tanggal 28 Desember 2018.

Pada tahun 2019 bantuan hukum non litigasi sebanyak 6 kasus sedangkan litigasi sebanyak 7 kasus yaitu :

1. Perwakilan penggarap desa kua dua Kec.Kubu Raya mengenai penyelesaian masalah sengketa lahan di Desa Kuala Dua Kab.Kubu Raya antara masyarakat penggarap dengan Developer Perumahan . Permasalahan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ;
2. Ny.Salmah, permohonan untuk penyelesaian masalah pencaplokan tanah adat yang terletak di Desa Kua Dua Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
3. Warga masyarakat dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kec.Sanggau Ledo, permohonan perlindungan hukum lahan dan bangunan yang dihuni sebanyak lebih kurang 105 kepala keluarga yang mana lahan tersebut milik Kodim 1202 Singkawang. Proses penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati Bengkayang ;
4. Suyanto dari Kabupaten Sanggau, perihal memohon kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, untuk dapat membantu persoalan kami di BPN Sanggau. Proses diserahkan ke Kantor ATR/BPN Prov.Kalbar ;
5. Dr.Ismawan Adrianto, perihal Klarifikasi dan informasi, terkait pengaduan yang disampaikan oleh Sdr.dr.Ismawan Adrianto ;
6. Isnamurti,SH, perihal perlindungan hukum, meminta keadilan dan hak-haknya kembali (tanah) .

Akses keadilan kepada semua juga ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada kelompok penduduk rentan dan kurang mampu dapat terlayani dengan baik dan pada umumnya telah memiliki akte kelahiran, hanya pada beberapa desa yang aksesibilitas sulit masih ada yang belum memiliki akte kelahiran. Pencapaian ini dapat dilaksanakan karena adanya dukungan dari instansi terkait yang memfasilitasi kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran serta pengembangan berbagai model pendekatan untuk menakselerasi cakupan pencatatan kelahiran. Disamping itu pemerintah daerah sedang menyusun strategi pencatatan sipil dan percepatan pencatatan kelahiran terutama bagi kelompok marginal.

Salah satu wujud dari upaya menjamin akses keadilan untuk semua adalah penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pengaduan semakin meningkat, sebagaimana diterima oleh Komnas HAM, dimana pada 2018 pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM mencapai angka 53 kasus per tahun, artinya tiap bulan berkisar 4-5 kasus penanganan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Kasus pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat Kalbar di antaranya (1) persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar; (2) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; (3) upaya penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Untuk peningkatan akses keadilan di Kalimantan Barat, maka perlu proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu diperhatikan dan ditingkatkan pelaksanaannya hal ini agar membuktikan kehadiran negara dan pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.

2.15.3. Membangun kelembagaan yang tangguh

Secara umum upaya untuk mengembangkan lembaga efektif, akuntabel, dan transparan disemua tingkat digambarkan capaian-capaian sebagai berikut :

1. Perilaku anti korupsi ;
2. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui ;
3. Laporan rasio Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah Kalbar ;
5. Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik ;
6. Kondisi demokrasi di Kalbar ;

Pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dan Strategi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi cenderung

meningkat yaitu 3,66 (2018) menjadi 3,70 (2019). Hal ini menunjukkan bahwa *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat di Masyarakat Kalbar.

Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 97,27% sedangkan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100 % dikarenakan kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 perlu dilaksanakan untuk kepentingan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Dalam rangka menilai akuntabilitas lembaga pemerintahan maka persentase peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tahun 2018 persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan tingkat pemerintahan. Dari 14 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mendapatkan opini WTP diperkirakan akan meningkat dimana tahun 2018 dengan persentase 71,43 % dan tahun 2019 akan menjadi 85,71%. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD semakin baik dan berkualitas.

Salah satu alat ukur akuntabilitas lainnya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 14 Kabupaten/Kota yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 23,08 % dan diperkirakan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 30,77 %, hal ini menunjukkan kualitas sistematisnya dari Kabupaten/Kota semakin sempurna hal ini dipengaruhi antara lain : (1) Keterlibatan langsung

pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja ; (2) Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan *cascading* ; (3) Penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan mulai optimal.

Untuk mengukur transparansi lembaga pemerintah daerah maka kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik menjadi acuan. Berdasarkan penilaian ombudsman persentasi instansi pemerintah yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar terhadap pelayanan publik meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 67,99 % sedangkan tahun 2019 diperkirakan menjadi 81,00 % mengalami peningkatan sebesar 13,01 %. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya untuk mencegah potensi perilaku korupsi, termasuk konsistensi peraturan yang relevan.

Di bidang politik, kondisi demokrasi Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-hak politik. Indeks dirancang untuk memotret kondisi demokrasi di 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar berdasarkan realitas yang terjadi (*evidence based*). IDI perlu terus dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah. Salah satu upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

Jika dilihat dari persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalbar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota menurut sumber data BPS masih rendah dimana pada tahun 2014 sebesar 12,46 % dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,17 % peningkatannya tidak terlalu besar selama 5 tahun. Hal ini dikarenakan masih kurangnya masyarakat untuk memilih perempuan menjadi anggota legislatif,

masih kurangnya sumber daya manusia untuk layak dijadikan calon legislatif dan masih sedikit perempuan untuk mencalonkan menjadi legeslatif.

Untuk Indeks Lembaga Demokrasi Kalimantan Barat tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Jika dilihat kondisi tahun 2018 Indeks Lembaga Demokrasi sebesar 73,08 %, Indeks kebebasan Sipil sebesar 93,87 % dan Indeks Hak-Hak Politik sebesar 64,01%, mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, untuk itu perlu ditingkatkan agar kondisi demokrasi di Kalimantan Barat semakin membaik, karena memerlukan dukungan dan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat, pemangku adat, agama, perusahaan, buruh, mahasiswa/i dan pemangku kepentingan lainnya.

2.16. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

2.16.1. Mobilisasi Sumberdaya Domestik

Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi daerah dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Pendapatan daerah dari pajak berkisar antara 84-86% dari total penerimaan asli daerah dalam periode 2013-2017 (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah).

Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian Tahun 2019 maka trend pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diprediksi membaik serta berdampak pada potensi sumber penerimaan daerah sehingga

mampu memiliki kontribusi positif dalam pembiayaan pembangunan daerah secara optimal. Pada Tahun 2020, proyeksi pendapatan sebesar Rp. 6.109.756.618.791.33 meningkat dibandingkan proyeksi 2019 yang hanya mencapai Rp. 5.760.665.710.092.00. Rincian proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 2.270.968.408.766.23
2. Dana Perimbangan = Rp. 3.823.626.665.555.60
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah = Rp. 15.161.544.469.50

Pada Belanja Daerah, tahun 2020 ditargetkan sekitar Rp. 6.119.756.618.791.23 atau meningkat dibanding tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam APBD 2019 sebesar Rp. 5.910.665.710.092.00. Peningkatan terjadi pada beberapa item seperti Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota serta Belanja Tidak Terduga.

Dari aspek pembiayaan, proyeksi pembiayaan Tahun 2020 menjadi Rp. 100.000.000.000.- lebih kecil dibanding tahun 2019 mencapai Rp. 150.000.000.000.- sebagaimana tergambar dalam pembiayaan netto. Sedangkan pada penyertaan modal (investasi) daerah di proyeksikan meningkat Rp. 50.000.000.000.- pada tahun 2020 dan menjadi Rp. 82.000.000.000.- pada Tahun 2023 diakhir masa periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pemenuhan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat guna mencapai tujuan dengan target capaian SDGs yaitu mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama, perlu diwujudkan melalui pelaksanaan proyek dengan skema kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini dukungan pemerintah provinsi untuk proyek-proyek dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta ini belum dapat dilaksanakan, dan pada tahun 2019 baru dalam tahap peninjauan dan koordinasi dengan pihak penyelenggara KPBU diantaranya proyek pembangunan Bandara Singkawang dan Jalan Tol Pontianak - Singkawang.

2.16.2. Kemitraan Multipihak

2.16.3. Teknologi Informasi

Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas manusia yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Adapun persentase proporsi individu yang menggunakan internet di Kalimantan Barat menurut data BPS tahun 2017 adalah 24,17%. dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 31%.

2.16.4. Ketersediaan Data

Ketersediaan data dan informasi yang akurat, kontinu dan up to date sangat penting dalam mendukung jalannya proses pembangunan sehingga kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi terarah sesuai dengan kebutuhan yang riil. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke 17 yang penting adalah persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan pada tahun 2018 adalah sebanyak 92,95 %. Selanjutnya tingkat kepuasan kualitas data statistika dalah sebesar 90,86 % (2018). Adapun selain data dari

BPS, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana rangkuman data dari OPD Provinsi yang sesuai dengan indicator dari SIPD bias didapatkan sehingga bias menjadi salah satu basis data Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB



3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Target dan indikator Tujuan 1. Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 5 Target yang diukur melalui 23 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari Pemberantasan Kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Adapun kebijakan tujuan 1 Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dengan:

- (1) Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
- (2) Mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung.
- (3) Menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial.

(4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan pencegahan.

Program dan Kegiatan Tujuan 1 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, mencakup (1) Program Pemberdayaan Sosial, (2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, (4) Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (6) Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (7) Program Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan, (8) Program Pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus, (9) Program penataan administrasi kependudukan, (10) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, (11) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinsos), (12) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Target Indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 1 dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk programkegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.



Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
Target Global: 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	%	7,77%	NA	NA	NA	NA	NA
	Angka Kemiskinan (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	7,37	6,92	6,43	5,99	5,38	5,00
Target Global : 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat	Orang	224.175	225.700	227.700	228.000	228.300	228.500
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah Penyandang disabilitas yang memperoleh akses terhadap pemenuhan hal dasar dan alat bantu penyandang cacat (PMKS yang menerima Bantuan)	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Orang	327.889	327.880	327.900	328.000	328.100	328.200

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	0,0033	16,67	37,5	37,51	37,51	37,51
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah orang yang menerima Perlindungan dan bantuan Jaminan Sosial (orang)	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Orang	4.356	4.356	4.380	4.400	4.427	4475
	Cakupan layanan Pemantauan dan Pengendalian Program PKH dan penyuluhan sosial (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	28,6	57,15	100	100	100	100
<p>Target Global : 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-	Susenas BPS	%	64,93%	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.								
	Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan (*)	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	%	66,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	SDKI BKKBN dan BPS	%	47,60	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella (*)	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	%	57,30	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum. (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	55,20	58,30	61,40	64,40	67,40	70,90
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	RPJMD	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi. (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	48,38	51,02	54,63	58,13	61,61	65,03
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	RPJMD	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	RPJMD	%	99,68	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	RPJMD	%	98,33	98,73	99,03	99,39	99,69	100
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	RPJMD	%	75,52	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	RPJMD	%	80,14	83,84	87,54	91,24	95	100
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	57,7	58,44	60,08	60,2	60,58	62,78
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	RPJMD	%	69,61	74,61	79,61	84,61	90	95
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	82,02	89,21	92,81	96,4	100	100
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio Elektrifikasi (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023		83	85	87	89	91	93
Target Global : 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD		NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD, Dinas Sosial		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	0,098	27,84	45,88	63,92	81,96	100
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD, Dinas Sosial		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	PMKS	1.817	1.579	1.785	1.785	1.715	1.715
	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	100	100	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas sosial		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	PMKS	1.817	1.579	1.785	1.785	1.715	1.715
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	0,98	1,4	9,02	9,11	9,21	9,3
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD, Dinas Pendidikan		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	PMKS	1.817	1.579	1.785	1.785	1.715	1.715
	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	0,0301	0,224	0,418	0,612	0,806	100
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat	BPBD		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	pertumbuhan yang berisiko tinggi.								
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD; Bappeda		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana (*)	RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023	%	0,098	27,84	45,88	63,92	81,96	100
Target Global: : 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program	BPKAD		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	pemberantasan kemiskinan.								
	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Bappeda	Laporan	1	1	1	1	1	1
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKAD		NA	NA	NA	NA	NA	NA



3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui sebelas indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Arah kebijakan RPJMD Kalimantan Barat 2019-2023 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, adalah Meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dan Menjamin kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal yang meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilitas harga, pasokan dan distribusi pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan di daerah yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga

yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang tertuang pada Rencana Strategis OPD terkait, diantaranya: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu (Nasional) untuk Kalbar Gula Aren, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, long storage, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyak benih tanaman Unggul Nasional dan unggul Lokal sesuai minat pengguna/petani dan permintaan pasar; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; (5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8) Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (9) Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi

kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani kecil/kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal; (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2018-2023 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak; (b) penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3) peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4) pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah; (6) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9) perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 3.2. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks bagian 1 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 2 dalam Buku Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.



Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan									
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang , khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan & Kesehatan Hewan	%						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.(a)	Prevelensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%						
2.1.2.*	Prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	BPS	%						
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan & Kesehatan Hewan	Kkal/Kapita/hari	1.854	1.857	1.896	1.917	1.938	1.958

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekeurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%						
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	Dinas Kesehatan	%						
2.2.2.*	Prevalensi malnutrisi/wasting(berat	Dinas Kesehatan	% (Wasting)						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	badan/tinggi badan) nak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		%(Obesitas)						
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	%						
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%						
2.2..2 (c)	(i) Kualitas Konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan harapan (PPH);	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skor	85,5	83,62	85,71	87,81	89,90	92,00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	dan (ii) tingkat konsumsi ikan per kapita		Kg/Kapita / Tahun	38,91	39,05	39,10	39,15	39,20	39,25
<p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.</p>									
2.3.1.*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS dan Dinas Pertanian	Juta Rupiah/tenaga kerja	25,80	27,09	28,44	29,86	31,35	32,92



3.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target dan Tujuan 3 TPB/SDGs yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur dari 38 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengurangi angka kematian ibu; mengakhiri kematian bayi dan balita; mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan; mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat adiktif; menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi; mencapai cakupan kesehatan universal; mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya; mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat; menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau; meningkatkan pembiayaan kesehatan; dan meningkatkan pengadaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk pencapaian target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk mewujudkan dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia pada tujuan 3 TPB/SDGs, maka kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 diarahkan pada: (1) Meningkatkan Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (2) Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat; (3) Penyediaan data dan Informasi Kesehatan; (4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai; (5) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada kepuasan

masyarakat terhadap layanan kesehatan; dan (6) Perluasan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit.

Sama halnya dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Penurunan Angka Kematian Bayi juga menjadi target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, dengan menargetkan angka kematian bayi paling tidak sama dengan kondisi saat ini yaitu 7/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadikan Provinsi Kalimantan Barat harus mempersiapkan mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sarana prasarana kesehatan.

Kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat untuk Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi diarahkan pada: Optimalisasi peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk.

Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs, berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang mencakup:

- 1) Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- 6) Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
- 7) Program Data dan Informasi Kesehatan;
- 8) Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian;
- 9) Program Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan;

Target Indikator Tujuan 3. Dapat dilihat pada tabel berikut. Namun untuk Target Tujuan 3 dapat dilihat pada lampiran matrik 1, untuk tabel program dan kegiatan ada pada lampiran matrik 2 dan untuk program kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada lampiran matrik 3.



Tabel 3.3 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia									
3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan, RPJMD	per 100.000 Kelahiran Hidup	95	95	94	93	92	91
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	BPS RI	%	84,59%	NA	NA	NA	NA	NA
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS RI	%	64,93%	NA	NA	NA	NA	NA
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,4	8	8	8	8	7
3.2.1*	Under-5 mortality rate per 1000 live births	BKKBN SDKI (2017)		23,38					
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1.000 Kelahiran Hidup	513	NA	NA	NA	NA	NA
3.2.2*	Neonatal mortality rate per 1000 live births	BKKBN SDKI (2017)		10,63					
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1.000 Kelahiran Hidup	7	7	7	7	7	6
3.2.2.(a)	Infant mortality rate per 1000 live births	BKKBN SDKI (2017)		15,25					
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	BPS, Dinas Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun(*)	Dinas Kesehatan	%	0,12%	0,45 %	0,40 %	0,35 %	0,30 %	0,25 %
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Prevalensi TB per 100.000(*)	Dinas Kesehatan	%	121	152	172	192	212	232
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000 penduduk	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	kab/kota	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota	6 Kab/Kota	7 Kab/Kota	8 Kab/Kota
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko(*)	Dinas Kesehatan	%	29%	29%	36%	43%	50%	58%
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	BPS, Dinas Kesehatan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1% (*)	Dinas Kesehatan	0%	0%	11%	11%	33%	50%	100%
3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	kab/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	kab/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	RISKESDAS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	RISKESDAS	%	8,16	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	RISKESDAS	%	8,9	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan, Sistem Registrasi Sampel (SRS)	Kematian per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	kab/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan	Dinas Kesehatan	Kab/kota	5 Kab/kota	5 Kab/kota	7 Kab/kota	9 Kab/kota	11 Kab/kota	14 Kab/kota

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	upaya kesehatan jiwa dan NAPZA(*)								
3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Badan Narkotika Nasional	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Badan Narkotika Nasional	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di	RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Badan Narkotika Nasional	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	dalam panti sesuai standar pelayanan.								
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Badan Narkotika Nasional	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Badan Narkotika Nasional	%	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BPS: SUSENAS	liter per kapita	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN SDKI (2017)	%	61	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BPS dan BKKBN, SDKI (2017)	%	66.90	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	BKKBN, BPS: SDKI	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	BPS: SDKI, SP dan SUPAS (2017)	Kelahiran per 1000 perempuan	63	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
			n 15-19 tahun						
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	SDKI 2017	Jumlah anak per WUS(15-49 tahun)	2,70%	NA	NA	NA	NA	NA
3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS Susenas	%	5,72%	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPS	Juta Penduduk	3.286.256 (Jiwa)	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS and Kemenkes: Susenas and Riskesdas (2018)	%	31	NA	NA	NA	NA	NA
3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan(*)	Dinas Kesehatan	%	80%	85%	88%	90%	92%	94%
3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	per 1.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Catatan: Indikator yang ada tanda (*) merupakan Indikator yang ada di daerah



3.4. Pendidikan Berkualitas

Target dan Indikator TPB/SDGs Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur dari 13 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pendidikan dasar dan kualitas guru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan tujuan 4. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Pendidikan Berkualitas,sesuaidengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 diarahkan pada kebijakan, yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses layanan Pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
3. Pemenuhan pendidikan tenaga kependidikan
4. Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
5. Peningkatan profesionalisme,kualitas serta akuntabilitas guru
6. Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
7. Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal
8. Peningkatan pelestarian cagar budaya,adat istiadat dan budaya
9. Pengembangan budaya dan seni daerah
10. Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan

11. Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca

Program Tujuan 4 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (a). Program Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK; (b). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (c). Program Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah; (d). Program Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal; (e). program pelestarian cagar budaya , adat istiadat dan budaya; (f). program pengembangan budaya dan seni daerah; (g). program pembinaan tenaga kebudayaan.

Dalam pencapaian ini, selain melalui Program Organisasi non pemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan 4. Program tersebut sesuaikan matriks (OPD maupun NGO)

Target Indikator Tujuan 4. Dapat dilihat pada tabel berikut. Namun untuk Target Tujuan 4 dapat dilihat pada matrik 1, untuk tabel program dan kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program kegiatan non pemerintah dapat dilihat pada lampiran matrik 3.



Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua									
4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsianak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkataakhir SD/kelas 6, (c) tingkataakhir SMP/kelas 9 yang mencapaistandarkemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah	%	47,2%					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Kementerian Agama							
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	50%					
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	61,30%					
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	110,20%	109,55	108,85	108,25	108,05	107,85

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.1.1.(e)	AngkaPartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	104,80%	104,5	104,2	103,8	103,4	103,1
4.1.1.(f)	AngkaPartisipasiKasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	81,90%	81,92	81,94	81,96	81,98	82
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Badan Pusat Statistik							
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	AngkaPartisipasiKasar (APK) Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	61%	61,05	61,07	61,08	61,09	61,11

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	81,90%	81,92	81,94	81,96	81,98	82
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).								
4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	%						
4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	(1) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	94,79%	95,04	95,23	95,42	95,61	95,8
	(2) SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	104,41%	104,18	103,87	103,56	103,25	102,94
	(3) SMA/SMK/MA/sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%	108,45%	104,15	103,89	103,63	103,37	103,11
	(4) RasioAngkaPartisipasiK asar (APK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,	%						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Kantor Wilayah Kementerian Agama							
4.6. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.6.1.(a)	Persentase angkasa penduduk umur ≥15 tahun.	Badan Pusat Statistik	%						
4.6.1.(B)	Persentase angkasa penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Badan Pusat Statistik	%						
4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
	Proporsi sekolah dengan akses ke:								
4.a.1*	(a) listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	(b) internet untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						
	(d) infrastruktur dan materi media berbasis wadisable	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						
	(e) air minum layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,	%						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Kantor Wilayah Kementerian Agama							
	(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						
	(g) fasilitas cucitangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama	%						
4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Dapat dimintadu Dinas					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	PLB yang bersertifikat pendidik.			Pendidikan.					
	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	25,94%	26,07	26,18	26,29	26,4	26,51
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	43,60%					
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	47,50%					
	Persentase guru SMA, SMK yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	33,90%	34	34,09	34,23	34,37	34,51
	Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	39,40%					



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan ke-5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan. Target dan Indikator tujuan ke-5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan Gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan dan target kesetaraan gender, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 diarahkan pada misi Gubernur Kalimantan Barat ke-3 dan ke-4 :

1. Visi ke-3, Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Visi ke-4, Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Sedangkan program yang akan dilaksanakan mencakup : (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; (2) Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan; (3) Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; (4) Program Data dan Partisipasi Masyarakat.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, juga terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian mencapai tujuan

TPB ke-5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Target Indikator Tujuan ke-5 TPB dapat dilihat pada tabel berikut, untuk target tujuan dapat dilihat pada matrik 1, untuk tabel dan program kegiatan dapat dilihat pada matrik 2 dan untuk program kegiatan non pemerintah dapat dilihat pada matrik 3.



Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas PPPA	Dokumen	39	-	1	-	1	-
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas PPPA	Kasus	22					
5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas PPPA	Kasus	12					
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)	Dinas PPPA	Kasus	32					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir								
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas PPPA	Kasus	22					
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	SDKI 2017	Persen						
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SDKI 2017	Persen	21,8					
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	SDKI 2017	Tahun	36					
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	SDKI 2017	Persen	151					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C menurut kelompok umur.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.									
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	KPU	Persen	10,18	12,98				
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.								
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference n Population and Develepment and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	SDKI 2017	Persen Jlh Prp	28,7 12.751					
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SDKI 2017	Persen	7,7					
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SDKI 2017	Persen L Persen P	98,1 99,6					
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	SDKI 2017							
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hal perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam								
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan									
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator Global yang akan dikembangkan							



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target dan yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan 6 TPB tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan strategi : mengendalikan daya rusak air; meningkatkan kapasitas air baku; meningkatkan kapasitas pelayanan air minum; meningkatkan kapasitas pelayanan sanitasi; Meningkatkan kualitas air.; Peningkatan perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan serta pengelolaan kawasan ekosistem esensial; Peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan produktivitas lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan;

Sedang untuk mewujudkan tujuan 6 TPB tersebut, Arah kebijakan untuk mencapai target menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah pengendalian konservasi sumber daya air; mendukung peningkatan kapasitas air baku; meningkatkan layanan air minum rumah tangga ; meningkatkan layanan sanitasi ke rumah tangga; mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik; Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial;

Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta rehabilitasi hutan dan lahan

Berdasarkan Strategi dan arah kebijakan maka dalam rangka pencapaian tujuan 6 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan mencakup :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ;
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan ;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
5. Program Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim;
6. Program Penataan dan Penegakan Hukum;
7. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
8. Program Pengamanan Dan Pengendalian Kerusakan Hutan
9. Program Rehabilitasi Dan Pengembangan Hutan Tanaman
10. Program Penatagunaan Kawasan Dan Pemanfaatan Hutan Alam
11. Program Penelitian, Pengembangan Geologi Air Tanah



Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN 6. Menjadikan Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.									
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Dinas Kesehatan	%	41	50	55	59	64	69
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum.	PUPR	%	55,20	58,30	61,40	64,40	67,40	70,09
	Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok.	PUPR	ltr/dtk	2	6	10	14	18	22
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi.	PUPR	%	48,38	51,02	54,63	58,13	61,61	65,03
	Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	%	33,8	54,8	60,5	65,5	70,0	75,0
	Persentase Desa/Kelurahan ODF/Stop Buang Air Sembarangan.	Dinas Kesehatan	%	4,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0
	Indeks Kualitas Air	LH dan Perkim	%	55,8	56,2	56,6	57	57,4	57,8

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas	ESDM	%		20	20	20	20	20
	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan	RPJMD (IK)	Ha		47,09	47,15	47,22	47,28	47,34
	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	Kehutanan	Ha	1.017.945	997.945	977.945	957.945	937.945	917.945
	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	Kehutanan	Ha	256 148	254.148	252.148	250.148	248.148	246.148



3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030.

Pada Tujuan 7, Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua meliputi tiga target global yaitu : (1) Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern terdiri dari 3 (tiga) indikator; (2) Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dengan 1 (satu) indikator; (3) Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat dengan 1 (satu) indikator.

Pada tujuan 7 SDGs, Provinsi Kalimantan Barat hanya meliputi 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Provinsi Kalimantan Barat dalam implementasi tujuan 7 SDGs didukung dengan kebijakan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Arah Kebijakan Daerah dalam mendukung Tujuan 7 SDGs dimaksud adalah :

1. Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, dengan strategi pembangunan Penyediaan tenaga listrik Non PLN; peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan; serta pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir;

2. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah 3T, dengan strategi pembangunan diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB)

Untuk meningkatkan Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan yaitu mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 melalui program dan kegiatan meliputi :

1. Program Pengembangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
2. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi



Tabel 3.7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
					Target	Target	Target	Target	Target
Tujuan SDGs 07 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
Target Global 7.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	PLN dan Non PLN		83	85	87	89	91	93
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	PLN dan Non PLN	kwh/pddk	507,63	582,95	643,76	-	-	-
Target Global 7.2 : Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	DRAFT RUED		0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
7.3.1*	Intensitas energi primer.	DRAFT RUED		1,20					



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kurun waktu 5 tahun terakhir ini, PDRB per kapita di Kalimantan Barat naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Selain itu Pariwisata juga tidak kalah penting peranannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dalam menyediakan kesempatan kerja yang meningkat. Sejalan dengan hal tersebut perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi tenaga kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Untuk mencapai tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua perlu memperhitungkan keberadaan kondisi PDRB perkapita. Salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu wilayah yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat, PDRB per kapita menunjukkan kenaikan dalam tiga tahun terakhir. PDRB per kapita masyarakat Kalimantan Barat pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp 38.793 ribu per tahun.

Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat bergerak tumbuh setelah dalam kurun waktu 2015-2018 cenderung mengalami pertumbuhan 8,21 persen. Demian juga t

laju pertumbuhan PDRB per Kapita tahun 2018 sebesar 7,81 persen terhadap tahun 2017.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 18 indikator sebagaimana tertera pada tabel 3.8 Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMD 2018 - 2023.

Didalam RPJMD Kalimantan Barat 2018 – 2023 Pertumbuhan Ekonomi merupakan bagian dari Misi 4 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Tujuan yaitu meningkatkan

perekonomian masyarakat Kalimantan Barat yang merata dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran . Adapun indikator tujuannya adalah (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) NilaiTukar Petani (NTP) ; (3) Anga Kemiskinan dan (4) Tingkat Pengangguran terbuka, dan (5) Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 3.1

Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya



Kaitan antar Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem perekonomian daerah berbasis potensi lokal. ▪ Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk peningkatan penanaman modal, pengembangan industri dan dunia usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan subsistem industri hilir yang terintegrasi berbasis pada industri pengolahan komoditas unggulan lokal.. ○ Revitalisasi pelayanan perizinan penanaman modal dan peningkatan pengembangan penanaman modal.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pemasaran pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengembangkan model promosi pariwisata berbasis E-Tourism
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan usaha pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) ○ Peningkatan pertumbuhan produk dan usaha wisata
	Struktur ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan efisiensi proses produksi industri (meningkatkan nilai tambah) dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menumbuhkembangkan industri kecil menengah dan industri pengolahan berbasis sumberdaya

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	semakin baik	rangka meningkatkan daya saing produk industri.	lokal, kompetensi inti daerah, dan kreatifitas intelektual.
2. Mengurangi Ketimpangan	Jumlah Desa mandiri meningkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembangunan dan kemandirian masyarakat Desa dalam mengelola potensi desa 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menumbuhkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat Desa
	Ketimpangan menurun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. ▪ Pengembangan konsultasi bisnis dan manajemen bagi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menumbuhkan wirausaha baru. ▪ Meningkatkan fasilitasi kemitraan, pengembangan manajemen UMKM, dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Angka kemiskinan dan pengangguran menurun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ▪ Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial ▪ Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ○ Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengembangan dan ▪ penempatan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja ○ Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan perlindungan dan ▪ pengembangan lembaga tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial ○ Meningkatkan jumlah perusahaan yang menjalankannormak etenagakerjaan

1. Pertumbuhan Ekonomi Makro;

Upaya yang ditempuh adalah melalui peningkatan investasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan penanaman investasi dan dunia usaha. Disamping itu, bagaimana mendorong peningkatan masuknya arus investasi yang mengarah kepada upaya kegiatan di bidang pengembangan industri pengolahan yang berbasis sumberdaya alam.

Sedangkan Urusan Perdagangan diarahkan pada meningkatkan ekspor, mengendalikan impor didukung peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan pengamanan perdagangan daerah dengan mengupayakan perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkualitas; ditunjang pengawasan atas barang-barang impor yang beredar dipasar; upaya-upaya menjaga stabilitas stok bahan pokok dan strategis masyarakat; fasilitasi penyediaan sarana. Program yang dilakukan antara lain:

- a. Urusan Penanaman Modal, Program (1)Pengelolaan Investasi (2) Pelayanan Perizinan
 - b. Perdagangan, melalui program (1) Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, (2) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
 - c. Urusan Perindustrian, melalui program (1) Pembangunan dan pemberdayaan Industri,
2. Penciptaan lapangan pekerjaan formal yang seluas-luasnya, yang diarahkan pada industri padat karya, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor;
- a. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dan pembaharuan program-program perluasan kesempatan kerja seperti pengembangan UKM, pengentasan kemiskinan, pekerjaan umum serta kredit mikro (credit union);
 - c. Peningkatan sistem pengawasan terhadap produktivitas di perusahaan.

Program kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Program Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 2) Program Meningkatkan Hubungan Industri yang Harmonis
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Sektor Formal & Informal
 - 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Program ini memiliki tiga kegiatan yaitu: Sosialisasi Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Peningkatan Wawasan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berperan besar dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat, dengan meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha, mengedepankan iptek dan mendorong penyerapan modal usaha KUMKM;
- Arah kebijakan pembangunan melalui :
- a. Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
- Program dan kegiatan yang dilakukan :
- 1) Program Peningkatan Kualitas Koperasi dengan kegiatan : (1) Penguatan kelembagaan koperasi, (2) Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi, (3) Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di Kalimantan Barat, (4) Workshop Peningkatan Koperasi, (5) Workshop Koperasi Sekolah, (6) Rapat Konsolidasi Pemutahiran Data Koperasi, (7) Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi, (8) Rapat konsolidasi

pengawasan koperasi, (9) Rapat teknis pengawasan koperasi, (10) Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi, (11) Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsir, (12) Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi, (13) Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota, (14) Bimtek Penilai kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota, (15) Bimtek Penyusunan Proposal usaha Koperasi, (16) Advokasi kemitraan Koperasi Perkebunan, (17) Pengembangan Koperasi nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim, (18) Workshop Pembiayaan Koperasi,

2) Program Pemberdayaan dan Pengembangan UKM; kegiatan yang dilakukan diantaranya : (1) Bimtek penyusunan proposal pembiayaan UKM, (2) Pemetaan Produk Unggulan Daerah, (3) Bimtek Perlindungan Usaha Produk UKM, (4) Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM Se Kalbar, (5) Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM, (6) Workshop Pengembangan Sentra Usaha UKM, (7) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi, (10) Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi, (11) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Data, (12) Pemetaan Keragaan Koperasi Berbadan Hukum Koperasi, (13) Monitoring Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil, (14) Kajian Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Kalbar, (15) Penyuluhan/ Sosialisasi Koperasi Perkebunan, (16) Workshop Aktifasi Koperasi Tidak Aktif, (17) Diklat Kewirausahaan, (18) Diklat Penunjang Lanjutan.

4. Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan:

Urusan Pariwisata diarahkan pada meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke

Kalimantan Barat, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta memperkuat basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. Program mendukung urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- b) Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata.
- c) Program Ekonomi Kreatif

Tabel 3.8 target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Realisasi			Target
					2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target Global : 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1.*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Bidang NAWAS BPS Kalbar	%	9,11	8,41	8,39	7,81	8,43
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	Bidang NAWAS BPS Kalbar	Rp. (000)	30.619	33.195	35.979	38.790	42.060
Target Global: 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS, Bappeda	%	4,44	2,82	4,47	3,09	3,25
Target Global: 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-							

	pertanian, berdasarkan jenis Kelamin							
	laki-laki	Bidang Sosial BPS	%	59,53	53,99	56,06	56,52	57,08
	Perempuan	Bidang Sosial BPS	%	40,74	46,01	43,94	43,48	42,92
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Bidang Sosial BPS	%	34,44	38,19	38,57	37,56	38,64
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Bidang Sosial BPS	%	74,26	65,96	73,86	72,44	73,08
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi dan UMKM	%	8	36	27	30	30



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 9 sesuai kewenangan provinsi berjumlah 15, namun indikator dimaksud belum dapat terpenuhi semua sebagaimana tertera pada tabel 3.9.

Kebijakan Tujuan 9. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-2023, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian konektivitas daerah, khususnya daerah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan. Disamping itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan; serta menjamin ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana.

Untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua dalam membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut, arah kebijakan pembangunan melalui :

1. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan;
2. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan Jembatan.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil serta kontribusinya terhadap PDRB, arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri sesuai Kebijakan RPIP;
2. Pengembangan Sistem Pengendalian Sistem Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Teknologi Informasi;
3. Menumbuhkan Industri Kecil Menengah dan Industri Pengolahan serta Manufaktur Berbasis Sumber Daya Lokal, Kompetensi Daya Saing Daerah, Kreatifitas Intelektual serta Penguatan Kebijakan Sarana Perekonomian Daerah Yang Andal dan Berdaya Saing.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, efisiensi penggunaan sumberdaya, memperkuat riset ilmiah, mendorong inovasi meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan arah kebijakan RPJMD 2019-2023 untuk mencapai tujuan TPB/SDGs tersebut diantaranya adalah:

1. Pengelolaan Data dan Informasi berbasis teknologi informasi;
2. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.



Tabel 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
Target Global 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Bina Marga, Dinas PUPR	km	986	-	-	-	-	-
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.		km	0	0	0	0	0	0
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.		km	0	0	0	0	0	0
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan	Bandara	7	7	7	7	7	9
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Dermaga	14	14	14	14	14	14
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	1	1	2	2	2	2
Target Global : 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	BPS, Disperindag	%	16,50					
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS, Disperindag	%	2,75	5,25	6,50	7	7,50	8
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS, Disperindag	%	3,89		5,47		5,53	
Target Global : 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Disperindag	-	-	-	-	-	-	-
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Disperindag	-	-	-	-	-	-	-
Target Global 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Lingkungan Hidup							
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
Target Global 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Badan Litbang	%	-	-	-	-	-	-
Target Global 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Kominfo	%	-	-	-	-	-	-
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Kominfo	%	54,73	-	-	-	-	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
9.c.1.b	Proporsi individu yang menggunakan Internet.(=17.8.1*)	Dinas Kominfo	%	24,17	-	-	-	-	-



3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan” untuk daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 4 target dan 13 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 10 berjumlah 13 sebagaimana tertera pada tabel 17. Kebijakan Tujuan 10. Pengurangan kesenjangan menjadi salah satu target dalam dokumen utama perencanaan Pemerintah saat ini, yaitu RPJMD 2018-2023. Target pengurangan ketimpangan, dalam hal ini diukur dengan Koefisien Gini, pada tahun 2018 sebesar 0,34.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, target Koefisien Gini ditetapkan menjadi 0,33, pada tahun 2020 sebesar 0,32 dan hingga akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 dengan target menurun hingga mencapai sebesar 0,27. Kebijakan penurunan ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial dimasyarakat.

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah yaitu kesenjangan antarkelompok pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut perlu dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.



Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target Global 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1	Koefisien Gini.	KDA 2019, RPJMD Kalbar	rasio	0,34	0,33	0,32	0,30	0,28	0,27
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%						
10.1.1(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.								
10.1.1(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	865	781				
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Prov. Kalbar	Desa	1	63	159	239	319	425
10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.								
10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					
					2019	2020	2021	2022	2023	
Target Global 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Dinas Sosial / BPS								
Target Global 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	RPJMD Prov. Kalbar	%	97,15	97,35	97,55	97,75	97,95	98,15	
10.3.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Biro Hukum Setda / Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat	kasus	69	70	67	70	61	70	
10.3.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Biro Hukum Setda / Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat	kasus	6		5		6		
Target Global 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Disnakertrans/							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan		170.063		221.709		245.294	223.453
Target Global 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik									
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Eks	13	18	12	18	12	18
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Nakertrans	Lokasi		5		5	2	3



3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka pencapaian target dan indikator Tujuan 11 TPB/SDGs (menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan), menetapkan dua target pencapaian indikator TPB sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Kedua target tersebut adalah, 1) menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh pada tahun 2030 (indikator: jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP); dan 2) mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan (indikator: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)).



Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Dinas PUPR Provinsi Kalbar (Indikator 3.7 RPJMD)	Kota	2	2	4	6	10	14
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Resiko Bencana	130,83	131,40	130,00	129,00	128,00	127,00



3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, ditetapkan 2 target yang diukur oleh 2 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengolahan limbah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kebijakan tujuan 12. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air dan udara dengan strategi antara lain : (1) meningkatkan pelayanan kasus dan sengketa lingkungan, (2) Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3, dan (3) Meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang akan dicapai melalui arah kebijakan : (1) meningkatkan kepastian hukum lingkungan, (2) mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3, serta (3) mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholders terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Target Indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.									
12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.a.	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK Prov. Kalimantan Barat	Perusahaan	3 Hijau 38 Biru	3 Hijau 38 Biru	4 Hijau 40 Biru	5 Hijau 42 Biru	6 Hijau 44 Biru	8 Hijau 42 Biru
12.4.2.a.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LHK Prov. Kalimantan Barat	Ton	244	244	244	244	244	244
			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.a	Jumlah timbulan sampah yang terkelola	Dinas LHK Prov. Kalimantan Barat	Ton	-	756.326	717.780	716.696	715.306	713.609



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Target dan indikator Tujuan 13. Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Dalam rangka mencapai tujuan Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana, ditetapkan 2 Target yang diukur oleh 2 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari ketahanan menghadapi bahaya dan tindakan antisipasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 13. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018 – 2023 diarahkan pada sasaran antara lain : Sasaran Pengendalian Perubahan Iklim : (1) Meningkatnya Kualitas Air dan Udara dan (2) Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis sedangkan sasaran Penanggulangan Bencana : (1) Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana; (2) Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana; dan (3) Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencanamelalui peningkatan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat.

Program Tujuan 13. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup upaya (1) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Penanggulangan Bencana. Target Indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target

Tujuan 13 dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.



Tabel 3.13 target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1	Prosentase Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Barat	prosentase	30-45	30-45	45-60	60-75	90-100	90-100
13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Barat	Jiwa	0	0	0	0	0	0
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappeda Prov. Kalimantan Barat (Laporan penurunan Emisi GRK)	Dokumen	0	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Prov. Kalimantan Barat (Laporan Inventarisasi GRK)	Dokumen	0	1	1	1	1	1



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Target dan indikator Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 7 Target Utama dan 3 Target Tambahan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 14.1. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab Tujuan 14 dan selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Selanjutnya Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Tujuan 14 antara lain:

1. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana, Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap.

2. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir.
3. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terfokus pada 3 (tiga) Program Utama yakni (1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, (2) Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan (3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersaji pada pada Tabel 14.2.



Tabel 3.14 target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan									
14.1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.									
14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Pokjanas	-	-	-	-	-	-	-
14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kawasan	1	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kawasan	1	1	1	1	1	1
14.3. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.									
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Pokjanas	-	-	-	-	-	-	-
14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	165.445,27	165.614,34	168.926,63	172.305,16	175.751,26	179.266,29
14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.									
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0	1	2	3	4	5
14.6. Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Pokjanas	-	-	-	-	-	-	-
14.6.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	%	42,85	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
14.7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.									
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Pokjanas	-	-	-	-	-	-	-
14.a. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic									
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di	Pokjanas	-	-	-	-	-	-	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	bidang teknologi kelautan.								
14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Zoning Regulation	0	1	1	1	1	1
14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang diberikan ke KUB	0	0	7	7	7	7

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2018	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Nelayan	0	0	30	30	30	30
14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.									
14.c.1	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1	1	1	1	1	1



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 Ekosistem Daratan Target dan indikator Tujuan 15. Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan Ekosistem Daratan, ditetapkan 3 Target yang diukur oleh 3 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari pelestarian ekosistem dan pemulihan lahan kritis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 15. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem Daratan, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 diarahkan pada tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang diarahkan mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran : (1) meningkatkan kualitas air dan udara, (2) menurunnya luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan (3) meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Program Tujuan 15. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (2) Program pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, (3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi

nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya mencapai tujuan 15. Target Indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 15 dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.



Tabel 3.15 target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
15. Melindungi , Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati									
15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional									
15.1.1	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat	%						
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merehabilitasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global									
5.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat	KPH	17	17	17	17	17	17
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat	%						
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan									
5.4.1.	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat	%						



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan kadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 ini memiliki 9 (sembilan) target dengan 20 (dua puluh) indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran.

Pada tujuan lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata, adapun target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Kebijakan tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu : (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan ; (2) menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan international dan

menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua ; dan (3) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Dalam rangka untuk mencapai ke tiga sasaran utama dari tujuan 16, arah kebijakan berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023 yang selaras adalah :

Pertama, arah kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian meliputi : (1) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ; (2) Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, termasuk dalam rumah tangga dengan membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak; (3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (4) Menjaga dan menciptakan kondisi kondusif dan menjamin kebebasan sipil dan menghormati hak-hak politik sipil dan pengembangan demokrasi di daerah; (5) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak ; (6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ; (7) Meningkatkan penciptaan, pemeliharaan serta pengendalian kondusifitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kalbar dan pengamanan objek vital; (8) Meningkatkan perlindungan masyarakat deteksi dini dan pembinaan dan penyelenggaraan trantibumlinmas ; (9) Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial ; (10) Meningkatkan peran pemuda dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan; (11) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalbar ; (12) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan linmas; (13) Meningkatkan

kapasitas Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalbar

Kedua, arah kebijakan terkait jaminan kesamaan akses pada keadilan adalah : (1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; (2) Meningkatkan pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat ; (3) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah ; (4) Optimalisasi peran PPNS daerah dalam penegakkan perda/perkada di Kalbar ; (5) Meningkatkan jumlah orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

Ketiga, arah kebijakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, meliputi (1) Meningkatkan administrasi kelembagaan instansi pemerintah di daerah; (2) Meningkatkan perluasan reformasi birokrasi ; (3) Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik di daerah; (4) Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan publik ; (5) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi efektif melalui kebijakan anti korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi ; (7) Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; (8) Meningkatkan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik; (9) Optimalisasi teknologi informasi pada tiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; (10) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah ; (11) Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan (12) Merumuskan kebijakan mengenai pengendalian administrasi pembangunan terintegrasi; (13) Menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; (14) Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ; (15) Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; (16) Meningkatkan implementasi system akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis aktual ; (17) Mengoptimalkan upaya intensifikasi penerimaan pada objek-objek pendapatan daerah ; (18) Pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi ; (19) Mengoptimalkan sistem pelayanan pendapatan daerah ; (19) Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan ; (20) Optimalisasi system dan layanan administrasi kepegawaian ; (21) Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, media luar ruang dan online ; (22) Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ; (23) Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi; (24) Meningkatkan perangkat daerah yang menerapkan akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Barat.

Program tujuan 16, sesuai arah kebijakan agar selaras dengan pencapaian tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tanggu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian antara lain : (1) Perlindungan hak perempuan dan anak ; (2) Pengembangan kemampuan aparat trantibmas/Linmas ; (4) Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan AGHT ; (5) Lidik sidik tindak pidana umum ; (6) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ; (7) Peningkatan perlindungan masyarakat deteksi dini dan pembinaan dan penyelenggaraan trantibumlinmas : (8) Penciptaan, pemeliharaan serta pengendalian kondusifitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kalbar dan pengamanan objek vital daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian antara lain : (1) Peningkatan

kamtibmas kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat ; (2) Lidik sidik ; (3) Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak ; (4) Penyuluhan mengenai ketertiban umum masyarakat ; (5) kegiatan preventif dengan melaksanakan patroli di wilayah Kalbar ; (6) kegiatan berkibar (bekerja dan kelompok kejahatan lainnya).

Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, ada beberapa program yang akan dilaksanakan yaitu : (1) Peningkatan kualitas pelayanan bantuan Hukum dan Ham ; (2) Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ; (3) Peningkatan kualitas produk hukum ; (4) Penegakan Hukum dan HAM ; (5) Bantuan hukum non litigasi dan litigasi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan : (1) Penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ; (2) Penyusunan Peraturan Daerah dan (3) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kalbar.

Program untuk mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan di semua tingkat, adapun yang akan dilaksanakan adalah : (1) Pendidikan politik masyarakat ; (2) Pemantapan reformasi birokrasi ; (3) Peningkatan integritas ; (4) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (5) Pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ; (6) Peningkatan pembinaan aparatur sipil neegara ; (7) Pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah ; (8) Penyelenggaraan survei indek demokrasi Indonesia (9) Penataan ketatalaksanaan pemerintah ; (10) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah ; (11) percepatan penyelarasan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan eksternal dan internal pemerintah ; (12) Pemantapan

reformasi birokrasi :(13) Pengawasan pelayanan publik ; (14) Pengembangan unit kerja pengadaan barang/jasa ; (15) Penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik ; (16) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah ; dan (16) Fasilitasi pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel, dan transparan di semua tingkat adalah : (1) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah ; (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ; (3) Pengelolaan pengadaan barang secara elektronik ; (3) Peningkatan pembinaan aparatur sipil negara ; (4) Penyusunan Indeks demokrasi Indonesia ; (5) Penegakan integritas ; dan (6) Pencatatan akte kelahiran.

Untuk kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi non pemerintah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan 16, diantaranya : (1) Penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan public di Provinsi Kalimantan Barat ; (2) Pendataan pemilihan legeslatif Provinsi dan Kabupaten/Kota ; (3) Program menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua ; (4) Sosialisasi program-program unggul pemerintah daerah terhadap pelayanan publik ; dan (5) Penanganan pengaduan.

Target pencapaian indikator tujuan 16 yaitu : perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh sebagaimana dalam matrik Rencana Aksi Nasional baik mengenai tujuan dan indikator tidak dapat terakomodir semua, oleh karena itu dalam pengisiannya sebahagian disesuaikan dengan kondisi daerah Kalbar. Untuk matrik target pencapaian tujuan 16 ini Provinsi Kalimantan Barat memuat tiga matrik yaitu :

1. Tabel 1 ; Target pencapaian indikator nasional yang dapat di akomodir daerah Kalbar terdiri dari : 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) target indikator. Dari target pencapaian tahun 2020 sampai dengan 2023 ada beberapa data yang tidak dapat dipenuhi targetnya dikarenakan sulit untuk memprediksinya seperti : jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indeks perilaku anti korupsi dan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II) .

2. Tabel 2 ; Target pencapaian indikator nasional yang dapat di akomodir oleh Instansi non pemerintah Prov.Kalbar terdiri dari : 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) target indikator . Untuk target pencapaian tahun 2020 sampai dengan 2023 ada beberapa data yang tidak dapat dipenuhi target capaiannya dikarenakan tidak diperolehnya data dimaksud seperti : persentase ketaatan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik di Prov.Kalbar dan jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),

3. Tabel 3 ; Target pencapaian indikator nasional yang tidak dapat di akomodir daerah kalbar pada tahun 2019 sampai dengan 2023 ada 1 (satu) tujuan dan 13 (tiga belas) target indikator yaitu :

1. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk ;
2. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan ;
3. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya ;
4. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun;
5. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun ;
6. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos pelayanan hukum ;

7. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh tahanan ;
8. Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil ;
9. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran ;
10. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan ;
11. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ;
12. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi ;
13. Jumlah kebijakan yang dirutinasi dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

Untuk tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tanggu hanya 2 tujuan atau goal yang belum dapat diakomodir yaitu ; menggalakkan undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif untuk pembangunan sedangkan target indikator dalam rencana aksi nasional yang tidak dapat diakomodir pemerintah Provinsi Kalimantan telah disesuaikan targetnya dengan kondisi daerah Kalbar, menggalakkan undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif untuk pembangunan sedangkan target indikator dalam rencana aksi nasional yang tidak dapat diakomodir pemerintah Provinsi Kalimantan telah disesuaikan targetnya dengan kondisi daerah Kalbar.



Tabel 3.16 target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian. Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat.									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
	Rata-rata pelanggaran trantibmas di Kalbar	Satpol PP Prov.Kalbar	Kejadian	150	130	100	100	100	100
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Biro Pengendalian	Kasus	27	19	16	14	12	10

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Operasi Polda Kalbar							
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	SOPS Polri	Kematian/100.000 Penduduk	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, Susesnas	Persentase	0,03	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS, Susesnas Modul Ketahanan Sosial	Persentase	54,17 (Th,2017)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS, Susenas Modul Ketahanan Sosial.	Persentase	54,98	53,59	52,10	51,14	50,09	48,92
	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan	Kasus	452	233	213	203	200	190

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Perempuan dan Anak Prov.Kalbar							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	BPS							
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami	Dinas Pemberdayaan	Persentase	7,26	5,56	4,84	4,54	4,23	4,05

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Perempuan dan Anak							
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS, Susenas.							
	Jumlah orang atau kelompok yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Biro Hukum Setda Prov.Kalbar	Orang	9	13	13	13	13	13

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kanwil Hukum dan HAM	Orang	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.a
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Kanwil Hukum dan HAM							
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan	Kanwil Hukum dan HAM	Persentase						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	terhadap seluruh jumlah tahanan.								
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerang segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.									
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$)	Indikator Global yang akan dikembangkan							
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia							
16.5 Secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau	Indikator Global yang memiliki proksi dan							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	akan dikembangkan							
	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	Inspektorat Provinsi	Kegiatan	5	5	5	5	5	5
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS dan Bappenas : Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Indeks	3,66	3,70	N.A	N.A	N.A	N.A
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas, selama 12 bulan terakhir	Indikator Global yang akan dikembangkan							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Kalbar	Persentase	97,27	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Kalbar.	Persentase	71,43	85,71	92,86	92,86	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar	Persentase	23,08	30,77	38,46	46,15	53,85	61,54

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov.Kalbar	Persentase	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar	Persentase						
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI Perwakilan Kalbar	Persentase	67,99	81,00	N.A	N.A	N.A	N.A
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU	Persentase	13,85 (Tahun dasar 2014)	13,85	15,16	17,12	19,84	24,15

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD Prov.Kalbar	Persentase	18,37	20,4	N.A	N.A	N.A	N.A
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, disabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	73,08	74,1 6	75,8 7	76,7 2	77,1 4	79,4 5
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	93,87	94,1 2	94,8 9	95,4 5	96,2 5	96,9 5
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	Indeks	64,01	65,4 3	66,2 4	67,8 4	68,1 9	70,1 2

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.									
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator Global yang akan dikembangkan							
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	BPS : SUSENAS, Dukcapil							
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	BPS : SUSENAS							
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan	Persentase	82,02	85,62	89,21	92,81	96,40	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
		Sipil Prov.Kalbar							
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM,	Berkas Pengaduan	53	50	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan : data tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (CATAHU)							
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi								
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU	Kominfo							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik								
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Kepaniteraan Komisi Informasi Daeah							
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Daerah (KIP)							
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.									
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM)	Komnas HAM	Lembaga	1	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .								
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas HAM							



3.17. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator. Sedangkan tujuan 17 yang sesuai dengan kewenangan daerah/provinsi sebanyak 7 target dan 15 indikator.

Target tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iii) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makro ekonomi; dan (iv) monitoring akuntabilitas serta ketersediaan data. Data dan informasi terkait indikator yang dibutuhkan untuk pencapaian target SDGs bersumber dari nasional, misalnya proporsi volume remitansi TKI (dalam US dolar) terhadap PDB dan proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa (informasi BI Provinsi Kalimantan Barat).

Kemitraan kerjasama pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kalimantan Barat belum ada yang dilakukan, baru tahapan peninjauan dan koordinasi dengan pihak teknis terkait.

Arah Kebijakan daerah yang sejalan dengan RPJMD Kalimantan Barat 2018-2023 untuk pencapaian tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan antara lain menciptakan iklim usaha

yang kondusif bagi perdagangan luar negeri di daerah hingga kedaerah perbatasan melalui intensitas koordinasi antar stakeholder dan kerjasama regional ekonomi, serta fasilitasi peningkatan daya saing produk ekspor melalui hilirisasi produk.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun organisasi non pemerintah.



Tabel 3.17 target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKPD	Rp.						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD							
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKPD							
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI, BI							
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan- kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	BI	%	9,39		11,12			
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Dinas Kominfo							
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Kominfo							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Dinas Kominfo							
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Kominfo/BPS	%	86,37		92,18		91,61	
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Kominfo							
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.	Pusdatin Kemendag, Puska Daglu Kemendag, BPS, Disperindag Kalbar	%	-14,42	23,67	10,17	-3,57	39,13	3,70
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.									
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	BPS (Inflasi Kalbar)	%	5,79	4 ±1	3,66	4 ±1	4,09	3,5 ±1
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas PUPR		0	0	0	0	0	0
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas PUPR		0	0	0	0	0	0
17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%		87,85		99,15		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%		94,59		94,74		
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS			5		1		
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	81,48		92,59		96,3	
17.9 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Badan Kepegawaian Daerah, BPS	Pegawai/org	(bkd)0 /19, (bps) 81	(bkd) 0/0 (bps) 62		(bkd)0 / 2 (bps) 59		(bkd)1 / (bps) 67
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi	Badan Kepegawaian Daerah, BPS	%	(bkd)0 / 25 (bps) 100	(bkd)0 / 0 (bps) 100		(bkd) 0 / 2,6 (bps) 100		(bkd) 0 / 72,4 (bps) 100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
	dan/atau pranata komputer.								
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Badan Kepegawaian Daerah, BPS	%	(bps) 21,20		(bps) 16,23		(bps) 15,45	
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Org	47,942		71,641		30,077	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Dinas Dukcapil							
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Orang	47.942	71.641		30.077		
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%		92,01		91,54		

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%		14		10,91		

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB 2019-2023

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu kegiatan penentu keberlanjutan program dan kegiatan pencapaian TPB. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga merupakan salah satu penentu keberhasilan seluruh program dan kegiatan pencapaian TPB secara setara, efektif, efisien, dan ekonomis. Proses monitoring ini tentunya harus inklusif, melibatkan semua pihak dan memadukan penjelasan data kuantitatif dan kualitatif.

Disamping itu kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjawab strategi dan arah kebijakan yang telah dilakukan, apakah kita sudah melakukan secara benar?, untuk manajemen dan tata kelola, tentunya untuk menjawab “apakah kita telah menerapkan rencana secara efektif, untuk output, apakah keluaran yang diharapkan sudah sesuai?, untuk serapannya apakah orang mampu mengakses dan berbagi kesejahteraan, untuk outcome, seberapa besar efek/perubahan apa yang terjadi setelah kegiatan dilakukan, serta bagaimana perubahan politik, ekonomi, iklim sosial dan organisasi mempengaruhi rencana dan hasil yang diharapkan.

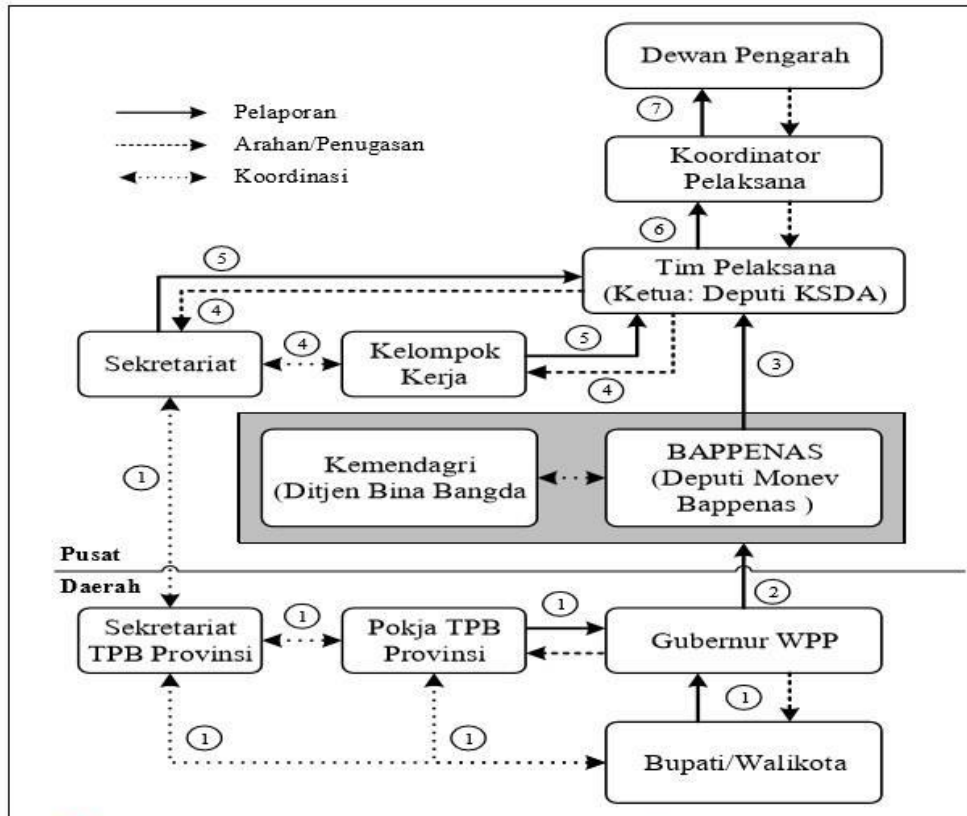
Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah kepada Menteri Dalam Negeri

dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan Evaluasi.

Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 4.1
Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan TPB



Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7/2018

Mekanisme pelaporan hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tergambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat Provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan

kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).

3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan Laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (langkah 5).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).
8. Mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk tingkat provinsi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana Kelompok Kerja (Pokja) yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat Provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran

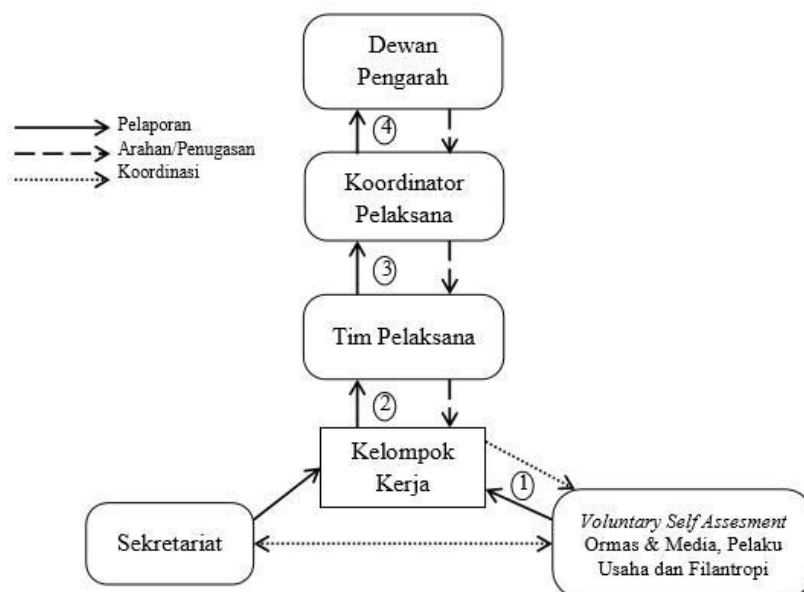
untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat .

4.2. Pemantauan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Organisasi Non Pemerintah

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah.

Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

Gambar 4.2. Alur Pelaporan melalui mekanisme “*Voluntary Self Assesment*”



Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Sebagaimana mekanisme untuk evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan pada tingkat provinsi (lembaga pemerintah), maka untuk organisasi non pemerintah melakukan *voluntary self assessment* terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat TPB/SDGs di tingkat provinsi untuk mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah sesuai dengan format yang ditetapkan.

4.3. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB 2019-2023

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut :

Enam bulan setelah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan satu tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 diundangkan. Mengingat Periode Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini adalah periode Tahun 2019-2023, maka pelaporan dan pemantauan untuk rencana aksi yang telah dilakukan direncanakan akan dilaksanakan pada setiap semester 1(satu) dan 2(dua) tahun berjalan.

4.4.

4.5. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi capaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 akan dimuat dalam website Kalbar.go.id dan bappeda.kalbarprov.go.id.

BAB V

PENUTUP

5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGS disusun meliputi aksi-aksi yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan non pemerintah, yang mana dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip-prinsip TPB/SDGS, yaitu Universal, terintegrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal).

Prinsip universal artinya komprehensif dan berpusat pada manusia, sementara terintegrasi dimaksudkan untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan : sosial, ekonomi dan lingkungan yang mendorong pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan tata kelola yang baik, sedangkan *no one left behind* mengandung arti bahwa diharapkan agar semua pihak ikut berpartisipasi dan dampaknya harus dirasakan oleh semua pihak terutama bagi kelompok rentan yang selama ini terabaikan.

5.2. Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGS menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan antara satu dan lainnya, atau tidak terlepas dari upaya dan pencapaian target-target yang lain. Dengan demikian, pencapaian satu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan atau goal lainnya. Dengan adanya prinsip

integrasi ini atau keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi penentu tercapainya tujuan pelaksanaan RAD TPB/SDGS ini.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi TPB/SDGS ini agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang merupakan target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang inklusif juga hendaknya diterapkan pada setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam pelaksanaan RAD TPB/SDGS juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan, yaitu : (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerjasama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lain. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs ditingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi non pemerintah.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen ditingkat global, juga telah diterapkan Indonesia di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs.

Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline). Pelaksanaan pencapaian

TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs ditingkat nasional dan daerah.

Terkait dengan penguatan sarana pelaksanaan TPB/SDGs, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penguatan koordinasi,

Penguatan koordinasi dilakukan terhadap semua lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

b. Peningkatan kapasitas

Merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Kaitannya dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan terhadap sumber daya manusia, tapi juga terhadap sarana prasarana lainnya, yaitu dengan membuat aplikasi yang diharapkan dapat memudahkan dalam pemantauan dan pelaporan hasil capaian pelaksanaan TPB di provinsi Kalbar, terutama diharapkan dapat memudahkan pelaporan dari tingkat kabupaten kota.

c. Pemberian penghargaan kepada para pihak

Pemberian penghargaan dapat diberikan terhadap semua pihak, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang telah menunjukkan hasil capaian target terbaik dari setiap target yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikator yang ditetapkan oleh lembaga terkait.

d. Penguatan pelaksanaan strategi komunikasi

Untuk penguatan sarana pelaksanaan strategi komunikasi tentunya akan dilaksanakan dengan caratetap menjalin komunikasi yang baik antara anggota Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, melaksanakan pertemuan baik secara daring maupun luring.

5.3. Pemutakhiran Dokumen

Pemutakhirandokumen akan disesuaikan dengan periode kepemimpinan kepala daerah.TPB merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sebagaimana RPJMN yang merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan percepatan pencapaian target TPB di tingkat nasional, maka di tingkat provinsi RPJMD merupakan acuan dalam percepatan pencapaian target TPB di Daerah.

RPJMD 2019-2023 berlaku selama kepemimpinan Gubernur saat ini yaitu Bapak Sutarmidji, SH, M.Hum, yang tentunya merupakan penjabaran visi dan misi beliau. Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini berakhir di tahun 2030, maka untuk tahun berikutnya tentunya juga akan menyesuaikan dengan RPMJD di tahun berjalan, yang artinya demikian pula dengan RAD TPB ini, pemutakhiran dokumen tentunya akan menyesuaikan dengan periode kepemimpinan kepala daerah berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 583. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2019. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023*. Pontianak: Sekretariat Daerah.

MATRIKS TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKAYANG

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari											
1.1.1	Tingkat Kemiskinan ekstrim										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Kab. Bengkayang	%	7.17	6.96						
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	Jiwa	17,940	10,000	< 10.000	< 10.000				
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, penangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	dinas sosial PP dan PA	KPM	6629	6693	23502					
1.3.1. (b)	Proporsi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	jiwa	7725	7908						
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.3.1. (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	KPM	6629	6693	23502					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.4.1. (a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	> 90	> 95	> 95	> 95				
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	66.13	68.55	70.97	73.39				
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	100	100	100	100				
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	40	45	47	50				
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT	%		56,43						
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	SK KUMUH	Ha	BENGGAYANG : 30,24	27,44	25,44	20	15	0		
			Ha	SUNGGAI RAYA : 29,33							
1.4.1. (g)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	90.25	91.25	92	92.5				
1.4.1. (h)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/ sederajat	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	51.5	52.5	53.5	55				
1.4.1. (i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	BPS	%	59.45	58.18						
1.4.1. (j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran										Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	%	76.61	77.41	80.64	88.7			
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	rasio	1.193697278	0	0	0			
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	%	100	100	100	100			
1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapatkan pendidikan layanan khusus									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	dokumen	1						Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD (data diolah)	%	PENDIDIKAN : 2 KESEHATAN :	28.1 49.87					
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.										
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan										
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Dinas Pangan, Nakeswan	ton	42,845	3,371					
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>Underweight</i>) pada anak balita	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	rasio per 1000 balita	< 1	< 1	< 1	< 1			
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Pangan, Nakeswan								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian										
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.3.1(a)	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan dan garam	Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Bengkayang	ton	Produksi per tahun :						
				Padi = 133.078 ton	Padi = 70.835 ton					
				jagung = 118.018 ton	jagung = 130.723 ton					
				kedelai = 5 ton	kedelai = 1 ton					
				ikan = 5.153,97 ton	ikan = ton					
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah.										
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan	Bappeda	jumlah kawasan	1. KPPN LEDO						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
				2. Kawasan Perdesaan Perbatasan Agribisnis di Kecamatan Jagoi Babang						
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan perliharaan dan spesies liar terkait, termauk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses teradap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.										
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan : berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan										
2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.a.2	Total Bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.b. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian										
2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.b.2	Subsidi ekspor pertanian									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1	Indikator anomali harga pangan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia										
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	rasio per 100.000 Kelahiran Hidup	< 50	< 25	< 25	< 25			

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.1.2(a)	Persentase perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan dan KB	rasio	<3	<3	<2				
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan dan KB	rasio	6	<5	<5				
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan dan KB	rasio	<5	<5	<5	<5			
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan dan KB	%	100	100	100	100			
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis.										
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan dan KB	%	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50			
3.3.2	Kejadian TB per 1.000 orang	Dinas Kesehatan dan KB								
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan dan KB	rasio	270	260	250	245			
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan dan KB	rasio	<1	<1	<1	<1			
3.3.3(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.3.4(a)	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur \leq 18 tahun	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	%	6	5.4	5.4	5.4		
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	%	24	24	24	23.4		
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur \geq 18 tahun	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	Dinas Kesehatan (Riskesdas)	%	15.4	15.4	15.4	15.4		
3.4.2*	Angka Kematian (insiden rate) akibat bunuh diri									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		-	-	-	-	-	-		Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol membahayakan										
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	BNN KAB. BENGKAYANG	Orang	20	20	20	30	30	30	
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN KAB. BENGKAYANG	Orang	5	5	5	5	5	5	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cesera dari kecelakaan lalu lintas.										
3.6.1	Angka Kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan keehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.7.2(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (RTF)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan dan KB	%	18	21	20	19			

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	BPJS Kesehatan Cab. Bengkayang	rasio	559.0289115	673.7620026					
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan	BPJS Kesehatan Cab. Bengkayang	jiwa	159,231	191,911					
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.										
3.9.1	Angka Kematian akibat tangga dan polusi udara ambien									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.9.3.(a)	Proporsi Kematian akibat keracunan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.a Memperkuat pelaksanaan the framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan dan KB	%	100	100	100	100			
3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sekr kesehatan dasar.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif,										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, © tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minium dalam : (i) membaca, (ii) matematika									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	dinas pendidikan dan kebudayaan	%		43.82					
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	dinas pendidikan dan kebudayaan	%		73.03					
4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	90.25	91.25	92	92.5			
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	51.5	52.5	53.5	55			
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat.	http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/	%	91.27	97.91					
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur \geq 15 tahun	BERITA RESMI STATISTIK IPM KAB.BENGGAYANG TH.2019	%	6.27	6.53					
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.2.2. (a)	Angka partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/	%	15.45	13.08					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhdap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.3.1. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/	%	91.27	97.91					
4.3.1. (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan rang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di :									
	(1) SD/MI/ sederajat;	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	%	90.25	91.25	92	92.5			
	(2) SMP/MTs/ sederajat;	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	%	51,50	52,50	53,50	55			
	(3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan	BPS	%	59,45	58,18					
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	93	94	95	96			indikator umum tidak dipilah berdasarkan umum
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	RPJMD KAB.BENGGAYANG TAHUN 2016-2021	%	93	94	95	96			indikator umum tidak dipilah berdasarkan umum
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan										
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.b Pada tahun 2020 secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil,										
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan										
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate /ASFR</i>)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/	%	91,27	97,91					
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C menurut kelompok umur.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.										
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference n Population and Develepment and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan dan KB	%	18	21	20	19			Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.										
5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memilik hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hal perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundan-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan										
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua										
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok .										
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	STBM SMART	%		56.44					
6.2.1 (c)	Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	STBM SMART	desa	91	12	21				
6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Besar Sembarangan (SBS)</i> .	STBM SMART	desa	6	3	9				

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi populasi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita.										
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian /perkebunan dan industri.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan , termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
5.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah antara mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dan pengendali, dan penahan skala kecil dan menengah.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.a. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.										
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
6.b. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.										
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7. Menjamin Akses Energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua										
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	pelanggan	34156						
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangan energi terbarukan dalam bauran energi global										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.										
7.3.1*	Intensitas energi primer.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.										
7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US\$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara berkembang.										
7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.										
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.1.1.(a)	PDB per kapita.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019 (data diolah)	%	laki-laki : 98.01							
				perempuan : 1.99							
8.3.1.(a)	Presentase tenaga kerja formal.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019 (data diolah)	%	26.01							
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019 (data diolah)	%	2.84							
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ke layanan keuangan.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.											
8.4.1	Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.4.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>)										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	rasio	laki-laki : 1.96							
				perempuan : 3.04							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya										
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	RPJMD KAB.BENGKAYANG TAHUN 2016-2021	orang	1600	1750	1800	2000			
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPORAPAR								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan.										
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.										
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
8.b. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.										
8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
9.1 Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Dinas Perhubungan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas PUPR									
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas Perhubungan		0	0	0	0				
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan		0	0	0	0				
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Dinas Perhubungan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Dinas Perhubungan		0	0	0	0				
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	unit	2	2	2					
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan		0	0	0	0				
9.2 Mempromosikan Industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi inddustri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	BPS									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS									
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Kaca.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.											
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain											
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Koefisien Gini.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	B.A IDM Kab. Bengkayang Th.2019	desa	61	48					
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.	BPS : Indeks Pembangunan Desa	desa	0	3	5	5	5	5	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS KAB.BENGGKAYANG	jiwa	18,400	17,696					
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	jiwa	7725	7908					
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.										
10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.										
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.										
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization										
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.										
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.										
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.										
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terlah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.2.1.(a).	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.3.1.(a).	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.3.1.(b).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
11.3.2.(a).	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.3.2.(b).	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintah (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	rasio	1.193697278	0	0	0			
11.5.1.(a).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.5.1.(b).	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.5.1.(c).	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.5.2.(a).	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Perumahan,Permukiman dan LH (66m3/hari)	m3	24,090	24,090	24,090	24,090				
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.7.2.(a).	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	11							
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.											
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	1						
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.										
11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Proframmes on Sustainable Consumption and Productin Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quckwins program.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.										
12.2.1	Jejak material (material footprint).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat reitel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.										
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.4.2	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	Dinas Perumahan, Perkim & LH								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Perumahan, Perkim & LH	ton	0	0	0	0			
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
12.8.1	Sejauhmana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
12.b mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	RPJMD KAB.BENKAYANG TAHUN 2016-2021	dokumen	2						
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk										
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.										
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	dokumen	1						
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	rasio	1.193697278	0	0	0			
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Dinas Perkim LH								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappeda								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapastast manusia dan kelembagaan terkat mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.										
13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparan dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalkan secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.										
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.										
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.										
14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat										
14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.2.1. (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.										
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.										
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan <i>the Inergovernmental Oceanographic Commisssin Criteria and Gidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.										
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>smale-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	1,526						
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaat berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercerminkan dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari <i>"The future we want"</i>.										
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	Dinas Kelautan dan Perikanan								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan,										
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.1.2	Proporsi spesies penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan										
15.2.1	Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	UPT Kehutanan	Ha	51,892						
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	UPT Kehutanan	orang	15						
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	UPT Kehutanan	Ha	51,213						
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.										
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.										
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.										
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.										
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.										
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.										
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberkan insentif yang										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.										
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.										
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun										
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	0	0					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	0	0					
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	11						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	11						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	data kasus dari P2TP2A dan UPPA Polres Bengkayang	kasus		3					
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	data kasus dari P2TP2A dan UPPA Polres Bengkayang	kasus		3					
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	data kasus dari P2TP2A dan UPPA Polres Bengkayang	kasus		32					
16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	data kasus dari P2TP2A dan UPPA Polres Bengkayang	kasus		18					
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	data kasus dari P2TP2A dan UPPA Polres Bengkayang	kasus		18					
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	KDA Kab. Bengkayang Tahun 2019	kasus	18						
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerang segala bentuk kejahatan										
16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.5 Secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas, selama 12 bulan terakhir									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	penilaian BPK	WDP	WDP					
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	bobot	perencanaan kinerja : 18,00	18,00					
				pengukuran kinerja : 12,81	12,95					
				pelaporan kinerja : 10,06	10,06					
				evaluasi internal : 5,78	5,96					
				capaian kinerja : 58,34	11,70					
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	LPSE	%	100	100	100	100			
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat DPRD	%	10	20					
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKDPSDM	%	5.56	5.56					
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, disabilitas dan kelompok masyarakat.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.										
16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	orang	13,840	14648					
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	26.03	44.11					
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.										
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/ GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.										
17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.										
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan- kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.										
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.										
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.										
17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional										
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.										
17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.										
17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara- negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.3 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.										
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makro ekonomi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.4 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.										
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.5 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.										
17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.6 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.										
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik- swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik- swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	98.64	100	100	100	100	100	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	83.33	93.33	93.5	94	94.5	95	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	jumlah	5	5	5	5	5	5	
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian /Lembaga.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.									Kabupaten belum memiliki data tersebut.
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	BPS								BPS Kabupaten Bengkayang akan melaksanakan sensus tersebut ditahun 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	Target Pencapaian					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS								BPS Kabupaten Bengkayang akan melaksanakan sensus tersebut ditahun 2020
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	orang	akta kelahiran :	53,979					
				akta kematian :	307					
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS KAB.BENGGKAYANG	orang	5291	8434	9000	9500	10000	10500	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS KAB.BENGGKAYANG	%	94.19	100	100	100	100	100	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS KAB.BENGGKAYANG	%	48.39	75	80	85	90	95	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	Siswa	280	280	320	335	345	350	659,300,500.00	APBD	Dinas Dikbud
Kegiatan 2 : Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Siswa	182	182	200	220	232	350	643,220,000.00	APBD	Dinas Dikbud
Kegiatan 3 : Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Siswa	378	378	385	395	400	400	848,232,000.00	APBD	Dinas Dikbud
Kegiatan 4 : Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	Orang	42	42	48	55	65	75	105,298,200.00	APBD	Dinas Dukcapil
Kegiatan 5 : Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi monitoring pelayanan dan pelaporan administrasi kependudukan (SIMPEL-Adminduk)	Dokumen	1	1	2	2	3	4	126,565,000.00	APBD	Dinas Dukcapil
Kegiatan 6 : Pencanangan Gerakan Orang Tua Peduli Identitas Anak (GO-PINDA) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pencanangan GOPINDA di Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	98,528,800.00	APBD	Dinas Dukcapil
Kegiatan 7 : Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik	Jumlah RT miskin belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis	Rumah Tangga	96	96	120	150	175	200	388,628,300.00	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
1.5 Pada Tahun 2030 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan											
Program Meningkatkan Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana											
Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di Daerah yang Terkena Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana (Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan) Bencana	kali	14	14	14	14	14	14	176,632,500.00	APBD	Badan Penggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Lokasi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	450,000,000.00	APBD	Badan Penggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya Persediaan Logistik Bencana Berikut Pendistribusiannya	Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	333,445,400.00	APBD	Badan Penggulangan Bencana Daerah
Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan	4 kali / triwulan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	195,178,800.00	APBD	Badan Penggulangan Bencana Daerah
Mobilisasi peralatan dari BNPB	Tersedianya Mobilisasi Peralatan Bencana dari BNPB	Kab/Kota	1.00	Jakarta dan Pontianak	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	25,000,000.00	APBD	Badan Penggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan											
INDIKATOR SDGs : 2.1.1 Prevalensi konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)											
2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan											
2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1.400 kkal/kapita/hari											
PROGRAM 1 : Peningkatan produksi dan agribisnis tanaman pangan											
Kegiatan 1 : pengelolaan produksi Seleria	1.1 Produksi Padi	Ton	1,397,953	1,450,000	1,493,500	1,568,000	1,569,000	1,616,100	215.760.00	APBN	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikola
	1.2 Produksi jagung	Ton	151,585.00	157,000.00	161,700.00	164,000.00	169,900.00	174,900.00	16.228.60		
Kegiatan 2 : pengelolaan produksi	1.3 Produksi kedele	Ton	451.00	700.00	720.00	735.00	757.00	780.00			
PROGRAM 2 : Peningkatan produksi dan agribisnis hortikultura											
Kegiatan 1: Peningkatan produksi buah dan florikultura	1.1 Produksi buah-buahan	Ton	331,692	341,640	351,890	362,450	373,320	384,520	66.527.89	APBN	Dinas pertanian tanaman pangan dan hortikola
	1.2 Produksi sayuran (Ton)	Ton	41,004	42,230	43,500	44,800	46,150	47,535			
Kegiatan 2 : Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat	1.3 Produksi Biofarmaka (Ton)	Ton	12,524	12,900	13,280	13,685	14,100	14,520	5.366.60	APBN	
	1.4 Produksi tanaman hias	Ton	540,834	567,875	596,269	607,920	620,078	632,479			
PROGRAM 3 : Peningkatan produksi perkebunan											
Kegiatan: 1. pengembangan kebun sawit	1.1 Produksi sawit	Ton	2,935,610	3,139,893	3,257,570	3,379,699	3,506,640	3,638,523	86.380.75	APBD	Dinas Perkebunan
2. pengembangan kebun karet	1.2 produksi karet	Ton	280,315	299,821	311,052	329,719	334,841	347,434	135.675.27	APBD	
3. pengembangan kebun (kelapa, kakao, lada, aren, kopi)	1.3 Produksi kebun lainnya	Ton	94,001	98,214	103,000	108,900	113,400	118,450			
PROGRAM 4 : Program Peningkatan Produksi Perkebunan											
Kegiatan 1 : Peningkatan Produksi Peternakan									3,942	APBD	
Kegiatan 2 : Pengembangan Ternak di daerah Pedesaan/perbatasan/pesisir/kepulauan									29,697		

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
			2019	2020	2021	2022	2023								
Kegiatan 3 : Pengembangan ternak							1,253								
PROGRAM 5 : Pemenuhan pangan asal ternak dan Agribisnis Peternakan															
Kegiatan 1: Peningkatan produksi pakan ternak	1. Populasi :	1.1	Ekor	173.566	117.250	122.034	127.013	132.195	137.589	3,750	APBN	Dinas pangan,peternakan dan kesehatan hewan			
	Sapi potong	1.2		544.058	550.208	555.710	561.267	566.879	572.548						
	Babi	1.3		6.139.850	6.210.821	6.272.829	6.335.659	6.399.015	6.463.006						
	Ayam Buras	1.4		2.376.995	2.389.691	2.413.588	2.437.724	2.462.101	2.486.722						
	Ayam Ras Bertelur			56.570.468	57.193.051	57.764.981	58.342.631	58.926.057	59.515.318						
	1.5 Ayam ras Pedaging			605.571	586.880	592.748	598.676	604.663	610.709						
Kegiatan 2 : Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	2. Produksi Daging		Ton	5.475	5.750	5.808	5.866	5.924	6.254	75,000					
	2.1 Sapi Potong			11.548	12.128	12.250	12.372	12.496	13.192						
	2.2 Babi	2.3		3.905	4.101	4.142	4.184	4.226	4.481						
	Ayam Buras			51.245	296	53.820	311	54.359	314				54.903	55.541	58.540
	2.4 Ayam ras pedaging							317	320				338		
2.5 Itik															
Kegiatan 3 : Peningkatan pemenuhan persyaratan produk (Hewan yang ASUH Aman, sehat, utuh, dan halal	3. Produksi Telur	3.1	Ton	3.823	3.899	3.977	4.057	3.138	4.213	15,000	APBN				
	Ayam Buras			27.971	28.531	29.101	29.683	30.277	30.825						
	3.2 Ayam Ras Telur			2.895	2.953	3.012	3.072	3.135	3.191						
	3.3 Itik														
PROGRAM 6 : Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat															
Kegiatan 1 : Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga	1.1 Jumlah kawasan		lokasi/tahun	13	13	14	14	15	15	6,610	APBD	Dinas pangan,peternakan dan kesehatan hewan			
Kegiatan 2 : pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1.2 Jumlah Toko Tani Indonesia		Unit/Tahun	10	16	16	16	16	16	400	APBD				
PROGRAM 7 : Peningkatan peningkatan ketahanan pangan															
Kegiatan 1: Kampanye Gerakan percepatan Diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan							3,096	APBD							
Kegiatan 2: Pemberdayaan pekarangan							1,320	APBD							
Kegiatan 3: Pengembangan Kawasan Diversifikasi pangan							400	APBD							
Kegiatan 1: Pengembangan Panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	1.1 Konsumsi Energi		kal/kap/ha	1.833.00	1.857.00	1.896.00	1.917.00	1.938.00	1.958.00	27,902	APBD	Dinas pangan, peternakan dan keschatan Hewan			
	1.2 Konsumsi Protein		kal/kap/ha	55.60	56.10	56.30	56.50	56.80	57.00						
	1.3 Jumlah Protein pemberdayaan lahan perkarangan		kelompok	56	56	56	56	56	56						
PROGRAM 8 : Pengembangan Perikanan Tangkap															
Kegiatan 1 : Penyediaan Sarana Pendukung perlindungan dan pengkayaan sumber daya ikan perikanan tangkap	1.1 Produksi ikan tangkap		Ton	165,445.27	165614.34	168,926.63	172,305.16	175,751.26	179,266.20	3,905,574.00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan			
PROGRAM 9 : Pengembangan Perikanan Budidaya															
Kegiatan 1 : Pengembangan kawasan budidaya Payau/laut	1.1 Produksi ikan Budidaya		Ton	83,227.39	84,000.00	85,680.00	87,393.60	89,141.47	90,924.30	2,969.00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan			
PROGRAM 10 : Pengelolaan, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil Perikanan															
	1.1 Konsumsi makan ikan		kg/kap/tahun	38.91	39.05	39.1	39.15	39.2	39.25	2,813.00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan			
TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera															
INDIKATOR SDGs : 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)															
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih															
3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan															
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup															
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup															
3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup															
3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi															
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK															
Kegiatan 1: Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi	1.1 Jumlah Peserta Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi		Orang	28 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	APBD	Dinkes				

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 2: Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	2.1 Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	Orang		270 Orang	-	-	-	-	APBD	Dinkes	
Kegiatan 3: Workshop / Pertemuan Audit Maternal Perinatal/ AMP	3.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang		76 Orang	-	76 Orang	76 Orang	76 Orang	APBD	Dinkes	
Kegiatan 4: Orientasi/ Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada Petugas Puskesmas	4.1 Jumlah Peserta Orientasi/Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada Petugas Puskesmas	Orang	-	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	APBD	Dinkes	
PROGRAM 2: PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											
Kegiatan 1: Penguatan pada Imunisasi Rutin melalui pelaksanaan DQS ,EVM dan SS	1.1 Kab/kota yang melaksanakan DQS, EVM dan SS	Kab/kota	-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	90,000,000	DEKON / APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Persiapan pelaksanaan follow up Campaign Campak Rubella melalui kegiatan sosialisasi dan mobilisasi serta edukasi	2.1 Jumlah Kampanye MR dan 95% anak terimunisasi DI Kabupaten/kota	kab/kota	-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	120,000,000	APBN/ APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Pelaksanaan Follow Up Campaign Campak Rubella untuk usia 9 bulan hingga 15 tahun.	3.1 Jumlah kab/kota yang di Follow Up Campaign Campak Rubella untuk usia 9 bulan hingga 15 tahun.	kab/kota	-	14 kab/kota	-	14 kab/kota	-	-	APBD	Dinkes	
Kegiatan 4: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Imunisasi terintegrasi	4.1 Kab/kota yang melaksanakan program Imunisasi terintegrasi	orang	-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	90,000,000	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa											
INDIKATOR SDGs: 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang											
INDIKATOR SDGs: 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria											
INDIKATOR SDGs: 3.3.4(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B											
INDIKATOR SDGs: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)											
INDIKATOR SDGs: 3.3.5(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta											
INDIKATOR SDGs: 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)											
PROGRAM 1 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											
Kegiatan 1: Workshop integrasi Tripel eliminasi (HIV, syphilis dan hepatitis B)	1.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang	28 orang	28 orang	56 orang	84 orang	84 orang	84 orang	150,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas petugas pengelola program HIV / AIDS di kabupaten kota	2.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang	0	7 kab	7 kab	7 kab	7 kab	7 kab	100,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Pertemuan Validasi data TB	3.1 Jumlah Petugas pemegang Program TB di kabupaten/kota dan layanan kesehatan lainnya	Orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	300,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 4: Peningkatan kapasitas petugas pengelola program TBC di kabupaten kota	4.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang	0	7 kab	7 kab	7 kab	7 kab	7 kab	100,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 5: Pertemuan koordinasi lintas sektoral dan lintas program terkait Penanggulangan TBC	5.1 Terlaksananya Pertemuan koordinasi lintas sektoral dan lintas program terkait penanggulangan TBC	kegiatan	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	240,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 6: Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di kabupaten/kota	6.1 Terlaksananya pertemuan pendampingan Pre assesment malaria	Orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	250,000,000		Dinkes
Kegiatan 7: Peningkatan kapasitas petugas pengelola program hepatitis dan Infeksi saluran pencernaan (ISP)	7.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang	0	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	150,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 8: Pertemuan koordinasi pelaksanaan POPM Filariasis	8.1 Terlaksananya Pertemuan koordinasi pelaksanaan POPM Filariasis	Orang	0	0	28 orang	56 orang	56 orang	56 orang	150,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 9: Peningkatan kapasitas pemegang program kusta	9.1 Jumlah Peserta yang mendapatkan nilai Post Tes ≥ 80	Orang	0	20 orang	20 orang	40 orang	40 orang	60 orang	200,000,000	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun											
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(b) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi											
INDIKATOR SDGs: 3.4.1(c) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun											
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun											

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											
Kegiatan 1: Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit tidak Menular /PTM	1.1 Jenis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jenis Pemeriksaan	7	-	-	8	9	9		APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	2.1 Jumlah peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang	32	-	-	-	-	-		APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Workshop dan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks	3.1 Jumlah peserta Workshop dan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks	Orang	-	-	100	-	100	-		APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Focus Group Discussion Review Implementasi KTR	3.1 Hasil review implementasi yang mendukung kegiatan Perda KTR	Dokumen	-	-	1	1	1	1		APBD	Dinkes
Kegiatan 4: Penyusunan Perda KTR	4.1 Raperda/Perda KTR	Dokumen	1	1	-	-	-	-		APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri											
INDIKATOR SDGs: 3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa											
PROGRAM 5: PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN											
Kegiatan 1: Investigasi Kasus Dugaan Masalah Kesehatan Jiwa	1.1 Jumlah kasus yang ditemukan	Orang	0	-	10	12	14	16	160,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Pertemuan Koordinasi Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa dan Napza	2.1 Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	Orang	0	-	28	28	28	28	220,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Masalah Kesehatan Jiwa di FKTP	3.1 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	0	-	-	42	-	42	160,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 4: Workshop kesehatan jiwa remaja tingkat provinsi	4.1 Jumlah peserta workshop	Orang	0	-	-	150	150	150	250,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 5: Workshop dan seminar sehat jiwa bersama orang dengan gangguan jiwa	5.1 Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	Orang	0	-	-	60	-	60	190,000,000	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.8.1(a) Unmet need pelayanan kesehatan											
INDIKATOR SDGs: 3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) i											
INDIKATOR SDGs: 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk											
PROGRAM : UPAYA PELAYANAN KESEHATAN											
Kegiatan 1: Advokasi/ Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor	1.1 Jumlah peserta Advokasi/ Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor	Orang	-	-	450	450	450	450		APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.b.1(a) Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di puskesmas											
PROGRAM : PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN											
Kegiatan 1: Pengadaan Obat Vaksin dan Perbekes	1.1 Ketersediaan minimal 150 indikator obat	Jenis	0	150	150	150	150	150	8,000,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Pembekalan tenaga farmasi di puskesmas dalam perencanaan kebutuhan obat	2.1 Jumlah tenaga farmasi yang mampu membuat Rencana Kebutuhan Obat sesuai pedoman	Orang	0	0	40	42	64	70	600,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Meningkatkan Kapasitas SDM dalam penereapan aplikasi E logistik	3.1 Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah yang menerapkan E Logistik	Orang	0	0	14	14	14	14	300,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 4: Workshop E Monev Katalog dalam mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat Pada Unit Layanan Yang melayani JKN	4.1 Jumlah Sarana Yankes yang menggunakan E Monev Katalog	Sarana	0	0	28	32	36	40	360,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 5: Workshop Pengelolaan Obat Program Di Puskesmas	5.1 Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan obat program nasional sesuai pedoman	Puskesmas	0	0	40	42	64	70	600,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 6: Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat di Puskesmas	6.1 Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 20 indikator obat yang harus ada	Puskesmas	0	30	40	42	64	70	600,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 7: Membiayai Pendistribusian Obat Program Nasional/Buffer	7.1 Jumlah sarana yankes yang mendapatkan obat sesuai kebutuhan	Puskesmas	0	14	14	14	14	14	1,120,000,000	APBD	Dinkes

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 8: Pembekalan tenaga farmasi di puskesmas dalam pengelolaan vaksin sesuai standar	8.1 Jumlah puskesmas yang mengelola vaksin sesuai standar	Puskesmas	0	28	40	42	64	70	600,000,000	APBD	Dinkes
Kegiatan 9: Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Obat, Vaksin Di Puskesmas	9.1 Jumlah Puskesmas yang sudah melakukan tata kelola Obat dan Vaksin	Puskesmas	0	0	40	42	64	70	600,000,000	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.c.1 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan											
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN											
Kegiatan 1: Fasilitasi Penggalangan Tenaga Kesehatan Pada Institusi	Jumlah Universitas yang terjaring dalam pemetaan Recana Kebutuhan (RENBUT) Sumber Daya Manusia Kesehatan	Universitas	-	-	5	5	5			APBD	Dinkes
Kegiatan 2: Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dokumen data Sumber Daya Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1			APBD	Dinkes
Kegiatan 3: Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Jumlah jenis tenaga kesehatan yang dinilai	Jenis Tenaga Kesehatan	-	6	6	6	6	6		APBD	Dinkes
Kegiatan 4: Pertemuan Perencanaan Recana Kebutuhan (RENBUT) Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Kab/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1			APBD	Dinkes
Kegiatan 5: Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Orang	-	180.000	210.000	240.000	270.000	300		APBD	Dinkes
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS, PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
PROGRAM 1 : PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK)											
Kegiatan 1 : Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA SMA	Mendukung proses belajar mengajar SMA	jenis	1 Jenis	1 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Rp 30,525,500,000	APBD, APBN	DIKBUD
Kegiatan 2 : Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Mendukung kelancaran proses belajar mengajar	ruang	1 ruang	1 ruang	22 ruang	22 ruang	22 ruang	22 ruang	Rp 220,440,915,000		
Kegiatan 3 : Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Mendukung kelancaran proses belajar mengajar	ruang	1 ruang	1 ruang	22 ruang	22 ruang	22 ruang	22 ruang	Rp 16,021,466,000		
Kegiatan 4 : Program Retrieval dan Transisi Bagi anak putus/nyaris putus sekolah SMK	Mengurangi Angka Anak Putus Sekolah jenjang SMK di Kalimantan Barat	anak	-	-	1617 anak	1617 anak	1617 anak	1617 anak	Rp 1,821,495,200		
Kegiatan 5 : Program Retrieval dan Transisi Bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SMA	Mengurangi Angka Anak Putus Sekolah jenjang SMA di Kalimantan Barat	anak	-	-	1637 anak	1637 anak	1637 anak	1637 anak	Rp 1,820,875,200		
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).											
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL											
Kegiatan 1 : Penilaian gugus paud dan bunda paud berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Barat	Rekomendasi Bunda PAUD dan apresiasi Gugus PAUD	dokumen	1 dokumen	14 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 766,233,000	APBD, APBN	DIKBUD
4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.											
Kegiatan 1 : Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar	Peningkatan kualitas guru	orang	14 kab/kota	56 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	Rp 1,181,162,000	APBD, APBN	DIKBUD
Kegiatan 2 : Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya program peningkatan profesi guru dalam jabatan	guru	-	1 kegiatan	174 guru	174 guru	174 guru	174 guru	Rp 8,224,445,000		
Kegiatan 3 : Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	Meningkatnya kualitas guru calon peserta PPG	orang	-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Rp 13,362,130,000		
Kegiatan 4 : Penilaian Angka kredit jabatan fungsional	Penetapan kenaikan pangkat guru dan pengawas	orang	80 orang	1500 orang	1550 orang	1550 orang	1550 orang	1550 orang	Rp 1,801,227,000		
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN											
INDIKATOR SDGs : 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun											
PROGRAM 1 : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan											
Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen		68.5	68.5	70	70.5	80	80.5			

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	65	65	75	85	90	100				
Kegiatan 1 : Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada lembaga pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Peserta	-	-	60	60	60	60	800,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Koordinasi/Monitoring pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah Kalimantan Barat	DPPPA Kab/Kota dan OPD Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	535,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 3 : Peningkatan kapasitas tentang PUG-PPRG bagi SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat	Peserta	-	-	-	50	-	50	225,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 4 : Evaluasi Pengarusutamaan Gender untuk Anugerah Parahita Ekapraya	Jumlah Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya	Penghargaan	2	-	15	-	15	-	610,000,000	DAU / APBD	
Persentase perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persen	-	-	20	25	30	35				
Kegiatan 5 : Seminar Parenting Education dengan tema mendidik anak di era digital	Jumlah peserta Seminar Parenting Education dengan tema mendidik anak di era digital	Peserta	-	120	100	100	100	100	735,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 6 : Workshop pendidikan kesetaraan gender untuk remaja	Jumlah peserta Workshop pendidikan kesetaraan gender untuk remaja	Peserta	-	60	60	60	60	60	500,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 7 : Pendampingan pemberdayaan perempuan bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah kader perempuan yang didampingi dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Kader Perempuan	-	-	50	50	50	50	630,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 8 : Pelatihan pendidikan kesetaraan gender bagi orang tua (ayah/ibu)	Jumlah orang tua (ayah/ibu) yang diberikan pelatihan pendidikan kesetaraan gender	orang tua (ayah/ibu)	-	-	50	50	50	50	630,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 9 : Seminar peran laki-laki dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah laki-laki yang berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	Peserta	100	100	100	100	100	100	550,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 10 : Penilaian Kecamatan Sayang Ibu	Jumlah kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Sayang Ibu	Kab/Kota	-	-	14	14	14	14	630,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 11 : Seminar Parenting dengan tema Menjadi Orang Tua Hebat Idola Anak	Jumlah PNS/Orang Tua	PNS/Orang Tua	-	-	80	-	80	-	380,000,000	DAU / APBD	
Persentase jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan pemb. ketahan	Persen	45	45	65	75	85	100				
Kegiatan 12 : Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV	1.12 Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV	Peserta	80	80	80	80	80	80	427,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 13 : Penyusunan Pergub tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	1.13 Jumlah Peraturan Gubernur	Dokumen	-	-	1	-	-	-	150,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 14 : Bimtek Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas melalui pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme	1.14 Jumlah peserta Bimtek Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas melalui pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme	Peserta	100	100	100	100	-	-	284,000,000	DAU / APBD	
Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	65.46	65.46	65.96	66.46	66.96	67.46				
Persentase Perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan	Persen	-	-	20	25	30	35				
Kegiatan 15 : Pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum bagi kader perempuan di Kalimantan Barat	1.15 Jumlah peserta Pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum bagi kader perempuan di Kalimantan Barat	Peserta	-	-	75	-	75	-	200,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 16 : Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi bagi kader perempuan di Kalimantan Barat	1.16 Jumlah peserta Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi bagi kader perempuan di Kalimantan Barat	Peserta	-	-	75	-	75	-	200,000,000	DAU / APBD	
Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor	Persen	-	10	20	25	30	35				

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 17 : Partisipasi Organisasi Perempuan	1.17 Jumlah Organisasi Perempuan yang mengikuti kegiatan Partisipasi Organisasi Perempuan	Organisasi	45	45	45	45	45	45	551,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 18 : Seminar Kepemimpinan (leadership) perempuan Kalbar	1.18 Jumlah peserta Seminar Kepemimpinan (leadership) perempuan Kalbar	Peserta	-	-	100	100	100	100	460,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 19 : Pertanian Organik yang ramah lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalbar	1.19 Jumlah peserta Pertanian Organik yang ramah lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalbar	Peserta	75	75	-	75	-	-	196,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 20 : Pengembangan usaha produktif PPSW dan PEKKA Kalbar	1.20 Jumlah peserta Pengembangan usaha produktif PPSW dan PEKKA Kalbar	Peserta	75	75	75	75	75	75	640,000,000	DAU / APBD	
PROGRAM 2: Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan											
Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan											
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			Rasio	0.00007	0.00007	0.00007	0.00006	0.00006	0.00005		
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki			Persen	100	100	100	100	100	100		
Kegiatan 1 : Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan termasuk TPPO	1.1 Jumlah lembaga yang telah terakreditasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Lembaga	6	6	8	10	12	14	625,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Peningkatan kapasitas SDM pada penyedia layanan P2TP2A	1.2 Jumlah SDM yang terampil menangani kasus kekerasan	SDM Terampil	10	10	12	15	18	21	885,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 3 : Rapat Kerja Penguatan Jejaring Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.3 Jumlah peserta Rapat Kerja Penguatan Jejaring Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peserta	50	50	50	50	50	50	475,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 4 : Fasilitasi penguatan Tim Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	1.4 Jumlah peserta Fasilitasi penguatan Tim Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS)	Peserta	40	40	45	50	55	60	600,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 5 : Fasilitasi penguatan Tim RAD dalam penanganan TPPO di Kalimantan Barat	1.5 Jumlah peserta Fasilitasi penguatan Tim RAD dalam penanganan TPPO di Kalimantan Barat	Peserta	40	40	45	50	55	60	600,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 6 : Rapat Koordinasi Gugus Tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Prov. Kalbar	1.6 Jumlah peserta Rapat Koordinasi Gugus Tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Prov. Kalbar	Peserta	55	55	55	55	55	55	380,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 7 : Peningkatan Koordinasi Gugus Tugas TPPO	1.7 Jumlah peserta Peningkatan Koordinasi Gugus Tugas TPPO	Peserta	50	50	-	-	60	-	153,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 8 : Rapat Koordinasi penguatan Kelompok Kerja Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Prov. Kalbar	1.8 Jumlah peserta Rapat Koordinasi penguatan Kelompok Kerja Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Prov. Kalbar	Peserta	45	45	50	60	70	75	575,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 9 : Peningkatan kapasitas perempuan dalam melaporkan kasus korban bencana dan konflik sosial	1.9 Jumlah laporan perempuan yang ditindak lanjuti	Laporan	-	-	-	40	45	50	205,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 10 : Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.10 Jumlah laporan masyarakat yang ditindak lanjuti	Laporan	10	10	15	20	25	30	355,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 11 : Advokasi dan sosialisasi pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan konflik sosial	1.11 Jumlah peserta Advokasi dan sosialisasi pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan konflik sosial	Peserta	75	75	75	50	55	60	600,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 12 : Pelatihan untuk perempuan penggiat perdamaian	1.12 Jumlah perempuan penggiat perdamaian	Perempuan Penggiat Perdamaian	40	40	45	50	55	60	600,000,000	DAU / APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 13 : Peningkatan kapasitas kinerja satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan penjangkauan serta pendampingan korban kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak	1.13 Jumlah Satgas PPPA yang terampil	Satgas PPPA yang terampil	-	-	35	35	35	-	460,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 14 : Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar	1.14 Jumlah korban yang ditangani di P2TP2A	Jumlah Korban	30	30	35	37	38	40	990,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 15 : Kampanye Three Ends	1.15 Jumlah peserta Kampanye Three Ends	Peserta	200	200	200	200	250	275	839,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 16 : Penguatan Kinerja Jejaring P2TP2A se-Kalbar	1.16 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penguatan kinerja jejaring P2TP2A se-Kalbar	Peserta	35	35	40	45	50	60	381,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 17 : Pelatihan bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan untuk lansia korban bencana dan konflik sosial	1.17 Jumlah kabupaten Peserta Pelatihan bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan untuk lansia korban bencana dan konflik sosial	Kabupaten Kota	-	-	-	-	14	14	150,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 18 : Pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	1.18 Jumlah peserta pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	Peserta	-	-	45.00	50	55	-	240,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 19 : Evaluasi Kinerja Operator Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan (SIMFONI-PPA) Provinsi, Kab/Kota se- Kalimantan Barat	1.19 Jumlah Peserta Evaluasi Kinerja Operator Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan (SIMFONI-PPA) Provinsi, Kab/Kota se- Kalimantan Barat	Peserta	-	-	-	65	70	80	515,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 20 : Pelatihan bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan Kekerasan Perempuan dan TPPO Tingkat Provinsi, Kab/Kota	1.20 Jumlah Lembaga yang menjadi peserta pelatihan	Lembaga	-	-	-	26	30	35	265,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 21 : Focus Group Discussion tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1.21 Jumlah peserta Focus Group Discussion tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Peserta	-	-	55	55	55	55	430,000,000	DAU / APBD	
PROGRAM 3 : Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak											
Meningkatnya pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak											
Persentase Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai											
	Persen		100	100	100	100	100	100	100		
Kegiatan 1 : Perumusan kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1.1 Jumlah dokumen kebijakan	Dokumen	2	2	3	4	5	6	475,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	1.2 Jumlah peserta	Peserta	200	200	200	200	200	200	1,350,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 3 : Pelatihan Kepemimpinan bagi pengurus forum anak Kalimantan Barat	1.3 Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan bagi pengurus forum anak Kalimantan Barat	Peserta	50	50	50	50	50	50	850,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 4 : Penguatan Kelembagaan anak	1.4 Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kelembagaan pemenuhan hak anak	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 5 : Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kab/kota Layak Anak	1.5 Jumlah peserta anggota gugus tugas yang memiliki kegiatan dalam pemenuhan hak anak	Peserta	112	112	112	112	112	112	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 6 : Pelatihan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak bagi SDM perencana pada lembaga pemerintah	1.6 Jumlah SDM perencana yang mengikuti pelatihan	Peserta	70	70	70	70	70	70	660,000,000	DAU / APBD	
Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh											
Kegiatan 7 : Pelatihan peningkatan pelayanan anak korban kekerasan	1.7 Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	Korban (anak)	45	45	45	45	45	45	915,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 8 : Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	1.8 Jumlah anak dalam program sebagai teman anak di kabupaten/kota	Peserta	84	84	84	84	84	84	1,160,000,000	DAU / APBD	Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 9 : Perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	1.9 Jumlah kab/kota (stakeholder yang menangani kekerasan terhadap anak)	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	882,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 10 : Pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	1.10 Jumlah kab/kota (stakeholder yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak)	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	1,010,000,000	DAU / APBD	
Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan		Persen	75	75	80	80	85	85			
Kegiatan 11 : Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota	1.11 Jumlah Kab/Kota (stakeholder yang bekerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak)	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Bara
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana		Persen	50	50	55	55	60	60			
Kegiatan 12 : Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di lingkup daerah kabupaten/kota bagi SDM perencana	1.12 Jumlah SDM peserta yang meningkat keterampilannya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Peserta	112	112	112	112	112	112	660,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Bara
Kegiatan 13 : TOT pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di lingkup daerah kabupaten/kota bagi fasilitator/champion	1.13 Jumlah fasilitator terlatih dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Fasilitator	70	70	70	70	70	70	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 14 : Pengembangan KIE pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1.14 Jumlah kab/kota tempat sebaran media KIE pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 15 : Bimbingan teknis, workshop dan/atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	1.15 Jumlah peserta / SDM yang meningkat keterampilannya dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan)	Peserta	120	120	120	120	120	120	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 16 : Pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)	1.16 Jumlah peserta kegiatan Pembentukan dan Penguatan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) di Kabupaten/Kota Prov. Kalbar	Peserta	70	70	70	70	70	70	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 17 : Pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah di Tingkat Nasional	1.17 Jumlah Anak yang mewakili Prov Kalbar ke Tingkat Nasional	Anak	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 18 : Penguatan jejaring pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	1.18 Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan)	Lembaga	7	7	7	7	7	7	660,000,000	DAU / APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 19 : Koordinasi antar kabupaten/kota dan provinsi dalam pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	Lembaga	7	7	7	7	7	7	661,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 20 : Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 21 : Pemetaan potensi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	Kabupaten Kota	14	14	14	14	14	14	660,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 22 : Bimbingan teknis, workshop dan/atau pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota	Peserta	112	112	112	112	112	112	661,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 23 : Pendampingan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Peserta	37	37	37	40	40	42	536,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 24 : Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional	Peserta	14	14	14	14	14	14	307,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 25 : Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Peserta	60	60	60	60	60	60	779,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 26 : Monitoring Perlindungan Anak diwilayah Daerah Prov. Kalbar	Kabupaten Kota	4	4	6	8	10	12	423,000,000	DAU / APBD	
PROGRAM 4 : Program Data dan Partisipasi Masyarakat										
Meningkatnya Ketersediaan Data dan Partisipasi Masyarakat										
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	65	65	75	85	95	100			
Kegiatan 1 : Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan penyediaan data gender	Peserta	50	50	50	50	50	50	850,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender bagi SDM pengelola data	Peserta	30	30	30	30	30	30	600,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 3 : Pengelolaan Data Gender	Set	42	42	45	50	55	60.00	775,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 4 : Rekonsiliasi Data Gender	Peserta	30	30	30	30	30	30	525,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 5 : Rapat Koordinasi Data Gender di Kalimantan Barat	Peserta	-	-	40	40	40	40	495,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 6 : Sosialisasi dan Fasilitasi kebijakan penyediaan data anak	Peserta	50	50	50	50	50	50	850,000,000	DAU / APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 7 : Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak bagi SDM pengelola data	1.7 Jumlah peserta Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak bagi SDM pengelola data	Peserta	30	30	30	30	30	30	600,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 8 : Pengelolaan Data Anak	1.8 Jumlah buku data anak poster	Set	40	40	45	50	55	60.00	775,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 9 : Rekonsiliasi Data Anak	1.9 Jumlah peserta rekonsiliasi data anak	Peserta	30	30	30	30	30	30	525,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 10 : Rapat koordinasi data anak di Kalimantan Barat	1.10 Jumlah peserta Rapat koordinasi data anak di Kalimantan Barat	Peserta	-	-	40	40	40	40	495,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 11 : Pembangunan dan pengembangan informasi	1.11 Aplikasi data	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	105,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 12 : Pengelolaan Informasi Online Berbasis Web untuk Data Gender dan Anak	1.12 Jumlah Pengelola	Pengelola	-	-	11	11	11	11	230,000,000	DAU / APBD	
Persentase Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan		Persen	25	25	3333	41.67	50	58.33	58.33		
Kegiatan 13 : Penyusunan data base lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.13 Jumlah Data Base lembaga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Data Base	1	1	1	1	1	1	750,000,000	DAU / APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 14 : Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah)	1.14 Jumlah peserta Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah)	Peserta	100	100	100	100	100	100	1,700,000,000	DAU / APBD	
Kegiatan 15 : Pelatihan PPPA bagi SDM Lembaga Masyarakat di Kalbar	1.15 Jumlah peserta Pelatihan PPPA bagi SDM Lembaga Masyarakat di Kalbar	Peserta	-	-	64	64	64	64	605,000,000	DAU / APBD	
TUJUAN 6 : MENJADIKAN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA											
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
INDIKATOR : 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.											
PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM											
Kegiatan 1 : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)	Jiwa	5,704	11,550	15,247	15,650	16,433	17,254	98.715	APBD I	PUPR
Kegiatan 2 : Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kab/kota	14	14	14	14	14	14	993	APBD I	PUPR
Kegiatan 3 : Inventarisasi dan Penyusunan Dataase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Tersedianya Iventarisasi dan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ,Terpencil / Rawan Air, Kawasan IKK, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Sistem Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.229	APBD I	PUPR
INDIKATOR : 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											
PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR											
Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah penyediaan sarana prasarana air baku	Unit	1	2	2	2	2	2	9628	APBD I	PUPR
INDIKATOR : 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.											
PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN											
Kegiatan 1 : Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Luasan / panjang Drainase Permukiman yang terbangun	Ha	12,429	1					6450	APBD I	PUPR
Kegiatan 2 : Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Luasan / panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun (Ha)	Ha	4,240	0					7358	APBD I	PUPR
Kegiatan 3 : Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar	Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lingkungan kalbar	Kab/kota	14	14					102	APBD I	PUPR
Kegiatan 4 : Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Pendataan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	l	1	1					494	APBD I	PUPR

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5 : Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah	Tersedianya Masterplan dan DED Air Limbah	1	1					288	APBD I	PUPR
Kegiatan 6 : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota dan skala kawasan perdesaan yang dibangun pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan			161,896	161,896	161,896	161,896	62.496	APBD I	PUPR
Kegiatan 7 : Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan Dan Perkotaan Permukiman	Pelaksanaan monitoring, identifikasi dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan penyehatan lingkungan	Kab/kota		14	14	14	14	465	APBD I	PUPR
Kegiatan 8 : Inventarisasi Dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Penyehatan Lingkungan			402	402	401	401	2.241	APBD I	PUPR
Kegiatan 9 : Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan			3,675	0	3,859	0	17.497	APBD I	PUPR
INDIKATOR : 6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
PROGRAM 1 : Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan										
Kegiatan 1 : Akselerasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Melaksanakan STBM	desa/kel						663	APBD I	Dinkes
Kegiatan 2 : Pertemuan Koordinasi Teknis Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Teknis Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	orang			30	30	30	370	APBD I	Dinkes
Kegiatan 3 : Fasilitasi Tenaga ke Kabupaten/ Kota Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Tenaga ke Kabupaten/Kota/Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa/kel	14					109	APBD I	Dinkes
Kegiatan 4 : Orientasi Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis WEB	Jumlah Peserta Orientasi Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis WEB	orang			32	32	32	725	APBD I	Dinkes
INDIKATOR : 6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).										
PROGRAM : Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan										
Kegiatan 1 : Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF)	Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free(ODF)	orang		30	30	30	30	482	APBD I	Dinkes
INDIKATOR : 6.2.1.(e). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.										
PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN										
Kegiatan 1 : Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan			3,67	3,85	4,05	4,25	15840	APBD I	PUPR
INDIKATOR : 6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku										
PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan										
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Air	Jumlah Dokumen hasil pemantauan	dokumen	1	1	1	1	1	1.025	APBD I	Perkim LH
Kegiatan 2 : Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	20 Perusahaan	Dokumen						128	APBD I	Perkim LH
INDIKATOR : 6.5.1.(e). Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS										
PROGRAM : PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN										

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Tertib pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HA	Unit Manajemen		9 Unit Manajemen	15 Unit Manajemen	16 Unit Manajemen	17 Unit Manajemen	17 Unit Manajemen	1361	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 2 : Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Tertib pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HTI	Unit Manajemen		12 Unit Manajemen	14 Unit Manajemen	15 Unit Manajemen	17 Unit Manajemen	17 Unit Manajemen	869	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 3 : Pengendalian Pengelolaan Perizinan HHHBK	Tertib pelaksanaan perizinan HHHBK	lokasi		3 lokasi	7 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	13 Lokasi	596	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 4 : Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Meningkatnya tertib pelaporan hasil produksi pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Unit			6 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	411	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 5 : Pengendalian Peredaran dan Iuran Kehutanan pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan kayu dan meningkatnya iuran dari bidang kehutanan pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak			15 IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	30 Orang	30 org	30 or	30 org	1435	APBD I	Kehutanan
PROGRAM : PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM											
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada IUPHHK (DBHDR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pamhut pd IUPHHK	Kab		12 Kab		12 Kab	12 Kab	12 Kab	850	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan (DBHDR)	Tersedianya Sarpras Pamhut	Unit		1 Unit		4 Unit			853	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 3 : Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan	tersedianya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan			5 Kab	17 kph	2000 Ha	2000 Ha	2000 Ha	1675	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 4 : Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	tersedianya kawasan ekosistem esensial	Kab				2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	455	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 5 : Kampanye Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (DBHDR)	Tersedianya Bahan Informasi Kampanye Dalkarhutla	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1813	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 6 : Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Meningkatnya Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api	Orang		255 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	5979	APBD I	Kehutanan
PROGRAM : PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL											
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan dalam pembangunan kehutanan, pengembangan usaha produktif dan pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan.	PK, KTH		30 PK, 2 KTH	24 PK dan 20 KTH	25 Penyuluh Kehutanan dan 10 Kelompok Tani Hutan	26 Penyuluh Kehutanan dan 10 Kelompok Tani Hutan	27 Penyuluh Kehutanan dan 10 Kelompok Tani Hutan	1308	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 2 : Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBHDR)	Tersusunnya program penyuluh kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat			10 Buku	24 Penyuluh Kehutanan	Prov. Kalbar (22 Penyuluh Kehutanan)	Prov. Kalbar (22 Penyuluh Kehutanan)	Prov. Kalbar (22 Penyuluh Kehutanan)	946	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 3 : Pendampingan kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dan Penghijauan melalui pembangunan Demplot Pembuatan Bibit RHL dan penanaman oleh Penyuluh Kehutanan, serta lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari			1 Prov	30 KTH	Hutan Rakyat seluas 10 Ha dan pemenang lomba penghijauan/wana lestari	Hutan Rakyat seluas 10 Ha dan pemenang lomba penghijauan/wana lestari	Hutan Rakyat seluas 10 Ha dan pemenang lomba penghijauan/wana lestari	3615	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 4 : Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di Bidang Kehutanan	Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	1754	APBD I	Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5 : Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di Bidang Kehutanan	Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	850	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 6 : Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (DAK)	Meningkatkan kualitas produksi usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan	Kelompok		0	15 Kelompok	17 Kelompok	20 Kelompok	23 Kelompok	5801	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 7 : Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBHDR)	Terbangunnya pemahaman masyarakat dan berkembangnya peluang usaha berbasis Perhutanan Sosial (HD/HKM/HTR/ Kemitraan)	Kelompok		20 KTH	19 KTH	30 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	5873	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 8 : Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak			2 Kab	7 MHA	5.100 Ha	6.800 Ha	8.500 Ha	1335	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 9 : Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat			1 Prov	1 Prov.				845	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 10 : Penguatan Kelembagaan MHA Pengeola Hutan Adat (DBHDR)	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA dengan Pengelolaan Hutan Adat			5 Kab	7 MHA				784	APBD I	Kehutanan
Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Terdatanya Kasus Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Kasus		0	0	3 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	827	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 11 : Peningkatan Kapasitas Kelola Hutan Adat dan Hutan Hak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Hutan Adat dan Hutan Hak	Unit		0	0	5 Unit	6 Unit	7 Unit	827	APBD I	Kehutanan
INDIKATOR : 6.6.1.(d). Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi											
PROGRAM : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN											
Kegiatan 1 : Pembangunan Hutan Rakyat	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan anggota Kelompok tani dalam pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat	KTH		2	2	2	2	2	657	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 2 : Penghijauan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan	Kecamatan		0	5	5	5	5	881	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)	Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian kelompok tani melalui pembangunan hutan rakyat	Ha		165 Ha	60	60	60	60	3520	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 4 : Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tertanamnya bibit kayu-kayuan dan MPTS kegiatan penghijauan lingkungan	Kab/lokasi		2 Kab	5 lok	6 lok	7 lok	8 lok	5391	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 5 : Penyusunan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Prov. Kalbar 2021 / 2022 / 2023 / 2024	Tersedianya Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Prov. Kalbar Untuk Tahun 2021, 2022, 2023, 2024	Buku		0	1	1	1	1	510	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 6 : Pemeliharaan Tanaman Hasil Rehabilitasi Lahan Pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat (DBHDR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I dan II Rehabilitasi Lahan Pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat			0	2 KTH	4 KTH	2 KTH	4 KTH	1289	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 7 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RHL yang dilaksanakan oleh KPH			0		17 KPH	17 KPH	17 KPH	527	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 8 : Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RHL yang dilaksanakan oleh KPH	Unit		0	2 lokasi				145	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 9 : Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh IPPKH	jumlah		0	1	1	1	1	464	APBD I	Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 10 : Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS	Terlaksananya Rakor RHL Tingkat Provinsi dalam rangka updating data dan informasi serta evaluasi keberhasilan pelaksanaan RHL oleh semua stake holder Rehabilitasi	orang		1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	967	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 11 : Pembangunan Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Tahun		3 Kab.		60 ha		60 ha	2100	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 12 : Pengembangan Model DAS Mikro Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terealisasinya Rancangan Kegiatan Dalam Dokumen RPDAST di Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Tahun			2 Kab		2kab/30 ha	35 ha	2317	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 13 : Gerakan Menanam Bagi Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat (APBD)	Terlaksananya Gerakan Menanam Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	Kab			1 kom/1 ha	1 kom/1 ha	1 kom/1 ha	1 kom/1 ha	603	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 14 : Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat				2 kab/4 ha	2 kab/4 ha	2 kab/4 ha	2 kab/4 ha	1392	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 15 : Pembuatan Buku Rencana Makro Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Tersusunnya Buku Rencana Makro Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Barat	Buku			1 buku				500	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 16 : Rehabilitasi Lahan Melalui Kegiatan Sipil Teknis di Areal Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) di Areal Model DAS Mikro	unit			12		12	12	9930	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 17 : Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Kab			12				500	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 18 : Penyusunan Peraturan Gubernur dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Tersusunnya Peraturan Gubernur dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Dok				1			500	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 19 : Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat				12 kab/1 aplikasi		12 kab/1 aplikasi	12 kab/1 aplikasi	3310	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 20 : Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalimantan Barat	Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalimantan Barat	Dok			1		1	1	1655	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 21 : Fasilitasi Pengelolaan Hutan Kota	Peningkatan Pengembangan Hutan Kota	Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	530	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 22 : Peningkatan Sarana Prasarana Hutan Kota	Meningkatnya Sarana Prasarana Hutan Kota			1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1021	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 23 : Sosialisasi Pengelolaan Hutan Kota	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Kota di 13 Kabupaten/Kota	Kab			4 kab		4 kab	5 kab	993	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 24 : Rehabilitasi Lahan pada Hutan Kota (DBH DR)	Tertanamnya Bibit Tanaman Hutan			1 lok/5 ha	1 lok/5 ha				630	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 25 : Penyusun Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota (DBH DR)	Tersedianya Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota	buku			1		1		600	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 26 : Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun 1 Rehabilitasi Lahan Melalui Penanaman Hutan Kota (DBH DR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun 1				1 lok		1 Lokasi		315	APBD I	Kehutanan
Kegiatan 27 : Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun 2 Rehabilitasi Lahan Melalui Penanaman Hutan Kota (DBH DR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun 2						1 Lokasi	1 Lokasi	315	APBD I	Kehutanan

TUJUAN : 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

INDIKATOR SDGs: Rasio elektrifikasi.

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. (a) Konsumsi Listrik per Kapita											
PROGRAM 1: Program Pengebangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan											
Kegiatan 1 : Pendataan infrastuktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/ Non PLN	Jumlah data infrastuktur ketenagalistrikan wilayah Kalbar	Lap	1	1	1	1	1	1	1	APBD	Dinas ESDM
Kegiatan 2 : Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik	Jumlah RT miskin belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis	RT	-	100	100	100	100	100	2,000,000,000	APBD	
Kegiatan 3 : Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Jumlah data laporan desa belum berlistrik di	Lap	-	1	1	1	1	1	499,340,000	APBD	
Kegiatan 4 : Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengaduan	Jumlah RT yang mendapat subsidi listrik tepat sasaran	Lap	1	1	1	1	1	1	482,350,000	APBD	
Kegiatan 5: Inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN	Jumlah lokasi penyedia tenaga listrik non PLN	Lap	1	1	1	1	1	1	478,030,000	APBD	
Kegiatan 6: Fasilitasi penerbitan rekomtek ketenagalistrikan	Jumlah rekomtek ketenagalistrikan	Rekomtek	-	-	75	75	75	75	1,997,350,000	APBD	
Kegiatan 7: Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Laporan pengawasan ketenagalistrikan Kalbar	Lap	1	1	1	1	1	1	484,910,000	APBD	
Kegiatan: 8 Sosialisasi Usaha di bidang ketenagalistrikan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi	Lap	-	0	1	1	1	1	499,340,000	APBD	
Kegiatan 9 : Pengawasan teknis pelaksanaan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	Lap	-	0	1	1	1	1	499,340,000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 7.1.2. (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga											
PROGRAM 1: Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi											
Kegiatan :1 Pembinaan dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kg	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	Lap		1	1	1	1	1	331,000,000	APBD	Dinas ESDM
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan											
PROGRAM 1: Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi											
Kegiatan 1: Pembangunan PLTS	1.1 Indikator Output : Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun	unit		2	3	3	3	3	43,300,000,000	APBD	Dinas ESDM
Kegiatan 2: Pembangunan PLTMH	2.1 Indikator Output : Jumlah PLTMH yang dibangun	unit	0	1	1	1	1	1	11,500,000,000	APBD	
Kegiatan 3: Kajian Pengembangan EBT di Kalimantan Barat	3.1 Indikator Output Jumlah dokumen kajian pengembangan EBT di Kalbar	dokume	0	0	1	1	1	1	180,000,000	APBD	
Kegiatan 4: Sosialisasi Hemat Energi dan air di Instansi Pemerintahan	4.1 Indikator Output Jumlah Laporan peserta sosialisasi	org	50	50	50	50	50	50	300,000,000	APBD	
Kegiatan : 5 Audit Energi di Perusahaan	5.1 Indikator Output : Jumlah Laporan Perusahaan yang dilakukan Audit	Perusahaan	2	2	2	2	2	2	380,000,000	APBD	
Kegiatan : 6 Pengembangan dan Pengelolaan SIG Potensi EBT	6.1 Indikator Output : Database EBT (Energi Baru dan terbarukan)	SIG	1	1	1	1	1	1	350,000,000	APBD	
Kegiatan; 7 Survey dan Evaluasi Pembangunan LTSHE	7.1 Indikator Output : Jumlah LTSHE yang dibangun	Lap	1	1	1	1	1	1	789,260,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan: 8 Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan	8.1 Indikator Output Jumlah Studi Kelayakan dan DED untuk pengembangan	Lap		1	1	1	1	1	850,000,000	APBD	
Kegiatan : 9 Revitalisasi Pembangunan PLTS	9.1 Indikator Output : Jumlah perbaikan PLTS yang rusak	Lap		3	1	1	1	1	4,920,000,000	APBD	
Kegiatan: 10 Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat	10.1 Indikator Output Jumlah penyerahan asset ke kelompok	Lap	1	1	1	1	1	1	660,450,000	APBD	
Kegiatan: 11 Pendataan Penggunaan Biofuel di bawah 10.000 ton/ tahun di kabupaten Kota se- Kalbar	11.1 Indikator Output Jumlah pengguna biofuel di kab/kota	Lap		1	1	1	1	1	473,480,000	APBD	
Kegiatan: 12 Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	12.1 Indikator Output Jumlah data dan informasi mengenai penurunan gas rumah kaca	Lap	1	1	1	1	1	1	523,950,000	APBD	

TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

INDIKATOR SDGs: 8.3.1 (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.

PROGRAM 1: Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Kegiatan 1 : Penguatan dan Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang memenuhi standar Minimal Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			60	65	70	75	600,000,000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat	
Kegiatan 2 : Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Jmlah Koperas Aktif/binaan Provinsi			60	60	60	60	284,863,000	APBD		
Kegiatan 3 : Penyelesaian Pembubaran Koperasi Tidak Aktif	Penyelesaian pembubaran koperasi tidak aktif				56	56	56	454,500,000	APBD		
Kegiatan 4 : Forum Group Discussion Potensi dan Kontribusi Koperasi Lintas Sektor Pemerintah Tingkat Provinsi, Kab./Kota, Kelurahan/Pedesaan Bersama Entitas Perkoperasian di Wilayah Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti FGD				100	100	100	350,200,000	APBD		
Kegiatan 5 : Literasi Perkoperasian Bagi Komunitas Pelajar/Akademisi, Enterpreneur Lokal dan Perangkat Desa di Kalbar	Jumlah peserta yg mengikuti literasi perkoperasian	Org			200 org	200 Org	200 Org	944,428,000	APBD		
Kegiatan 6 : Penilaian Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Berprestasi	Kop			56 Kop	56 Kop	56 Kop	56 Kop	532,931,000	APBD	
Kegiatan 7 : Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti kampanye aktifitas lembaga koperasi	Kop			60 Kop	60 Kop	60 Kop	60 Kop	2,008,456,000	APBD	
Kegiatan 8 : Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi dan Online Data System	Jumlah pengelola data koperasi yang mengikuti kapasitas	Org			60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	464,100,000	APBD	
Kegiatan 9 : Workshop Sertifikasi Nomor Induk Koperasi	Jumlah Koperasi Mengikuti Workshop	Kop			60	60	60	60	418,715,000	APBD	
Kegiatan 10 : Monitoring Evaluasi Data Koperasi Se-Kalbar	Jumlah Dokumen Hasil Monev Data Koperasi Se-Kalbar	Dokumen			1	1	1	1	460,000,000	APBD	
Kegiatan 11 : Rapat Koordinasi Data Koperasi Se-Kalbar	Jumlah Pembina Koperasi Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Data Koperasi Se-Kalbar				60	60	60	60	464,100,000	APBD	
Kegiatan 12 : Penyusunan Databased Koperasi Aktif Terintegrasi Se-Kalbar	Jumlah Database Koperasi Aktif Terintegrasi Se-Kalbar				1	1	1	1	580,650,000	APBD	
Kegiatan 13 : Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	Jumlah Pengawas Pembina Koperasi Kabupaten/Kota yang Mengikuti Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	Org	30	35	35	35	35	35	5,460,246,000	APBD	
Kegiatan 14 : Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	368,291,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 15 : Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Badan Hukum Provinsi Yang di Nilai	Kop	50	50	50	50	50	50	870,111,000	APBD	
Kegiatan 16 : Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum provinsi	Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi Yang di Periksa	Kop	10	10	10	10	10	10	528,451,000	APBD	
Kegiatan 17 : Tamu Aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Yang Mengikuti Tamu Aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota		196	196	196	196	196	196	1,163,955,000	APBD	
Kegiatan 18 : Bimtek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Penilai Usaha Simpan Pinjam Koperasi Yang Mengikuti Bimtek	Org	35	35	35	35	35	35	434,402,000	APBD	
Kegiatan 19 : Workshop Peningkatan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Peningkatan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Kop		30	30	30	30	30	487,305,000	APBD	
Kegiatan 20 : Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi			30	30	30	30	30	490,510,000	APBD	
Kegiatan 21 : Peningkatan Kompetensi Pengawas Koperasi	Jumlah Pengawas Koperasi Yang Mengikuti Kompetensi Pengawas Koperasi			100	100	100	100	100	655,000,000	APBD	
Kegiatan 22 : Forum Group Discussion (FGD) Pengawas Koperasi	Jumlah Pengawas Koperasi Yang Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Pengawas Koperasi			75	75	75	75	75	450,000,000	APBD	
Kegiatan 23 : Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Jumlah SDM Pembina Koperasi yang Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi		30	30	30	30	30	30	439,849,000	APBD	
Kegiatan 24 : Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	Jumlah Koperasi Perkebunan Yang Mengikuti Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan		90	80	80	80	80	80	1,647,661,000	APBD	
Kegiatan 25 : Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)		15	15	15	15	15	15	463,005,000	APBD	
Kegiatan 26 : Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Jumlah Pembina Koperasi Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Pembina Koperasi Berkualitas		28	28	28	28	28	28	435,293,000	APBD	
Kegiatan 27 : Pengembangan Pembiayaan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pengembangan Pembiayaan Usaha Koperasi			30	30	30	30	30	649,740,000	APBD	
Kegiatan 28 : Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Riil	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi SEKTOR Riil			15	15	15	15	15	301,665,000	APBD	
Kegiatan 29 : Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pengembangan Koperasi Pertanian			20	20	20	20	20	696,150,000	APBD	
Kegiatan 30 : Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pengembangan Koperasi Nelayan			30	30	30	30	30	974,610,000	APBD	
PROGRAM 2: Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UKM											
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah Pameran/Promosi Produk UKM yang di Ikuti	Pameran/ Promosi	6	5	5	5	5	5	3,795,358,000	DAU/ APBD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Bimtek Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemula Yang Mengikuti Bimtek	Wirausaha Pemula		100	100	100	100	100	398,248,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 3 : Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM Se-Kalbar	Jumlah Pembina UKM yang Mengikuti Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM Se-Kalbar	Pembina UKM		60	60	60	60	60	277,941,000	DAU/ APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 4 : Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Jumlah Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Katalog	1	1	1	1	1	442,651,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 5 : Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	Jumlah UKM yang Mengikuti Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	UKM	50	50	50	50	50	127,291,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 6 : Penyusunan Data Base UMKM Se-Kalbar	Jumlah Dokumen Data UMKM Se-Kalbar	Dokumen		1	1	1	1	510,510,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 7 : Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Pelaku usaha yang Mengikuti Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi UMKM	Pelaku usaha		50	50	50	50	371,280,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 8 : Bimtek ODS Data UMKM	Jumlah Operator Data yang Menguasai ODS 14 Kab/Kota dan Provinsi	Operator		30	30	30	30	605,125,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 9 :Workshop Pengembangan Kualitas Produksi UMKM	Jumlah UKM yang Mengikuti Workshop Pengembangan Kualitas Produksi UMKM	UKM		50	50	50	50	208,845,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 10 : Monitoring Evaluasi Data Koperasi Se-Kalbar	Jumlah Dokumen Hasil Monev Data UMKM Se-Kalbar	Dokumen		1	1	1	1	464,100,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 11 : Penyusunan Data Base Wirausaha Pemula	Jumlah Dokumen Wirausaha Pemula			1	1	1	1	580,125,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 12 : Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Melalui Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)	Jumlah UKM yang di Bina	UKM		120	120	120	120	2,784,600,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 12 : Pemetaan Keragaan Koperasi Berbadan Hukum Koperasi	Tersusunnya Profil Koperasi Berbadan Hukum Provinsi	Buku	15	15	14	14	-	131,235,826	DAU/ APBD		
Kegiatan 13 : Monitoring Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil	Tersedianya Data Pelaku Usaha Mikro Kecil	Kab/Kota	14	14	14	14	-	163,695,026	DAU/ APBD		
Kegiatan 14 : Kajian Peran Koperasi dan UMKM dalam Perencanaan Kalbar	Tersedianya Hasil kajian Peran Koperasi dan UMKM	Paket	1	1	-	-	-	218,460,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 15 : Penyuluhan/ Sosialisasi Koperasi Perkebunaan	Meningkatnya Jumlah kader Koperasi dan Pemahaman Aparatur terhadap Perkoperasian	Orang	-	-	90	90	-	131,647,600	DAU/ APBD		
Kegiatan 16 : Workshop Aktifasi Koperasi Tidak Aktif	Meningkatnya Koperasi Aktif	Paket	-	-	4	4	-	299,995,000	DAU/ APBD		
Kegiatan 17 : Diklat Kewirausahaan	Meningkatnya SDM UKM	Orang	-	-	-	-	210	472,288,600	DAK/APBD	UPT. Pelatihan Koperasi	
Kegiatan 18 : Diklat Penunjang Lanjutan	Meningkatnya SDM UKM	Orang	-	-	-	-	180	404,818,800	DAK/APBD	Provinsi Kalimantan Barat	
PROGRAM 3 : Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM											
Kegiatan 1 : Diklat Kewirausahaan	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	270	270	270	150	150	-	1,974,735,720	DAU/ APBD	UPT. Pelatihan Koperasi
Kegiatan 2 : Diklat Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	270	270	270	150	150	-	1,976,340,720	DAU/ APBD	Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 3 : Diklat Penunjang Lanjutan Manajemen Berbasis Informasi	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	180	180	180	150	150	180	1,772,055,150	DAU/ APBD	
Kegiatan 4 : Rapat Koordinasi Kebutuhan Diklat	Meningkatnya Kualitas Pembina KUMKM	Orang	30	30	30	-	-	-	155,290,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 5 : Pelatihan KJKS/UJKS Koperasi pola Syariah	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	120	120	120	-	-	-	761,714,500	DAU/ APBD	
Kegiatan 6 : Monev Pasca Pelatihan	Terwujudnya Monev Pasca Pelatihan	Kab/Kota	14	14	14	14	14	14	545,239,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 7 : Pelatihan Perkoperasian Tentang manajemen keuangan dan Akuntansi	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang	210	210	150	150	180	-	1,316,949,300	DAK/APBD	
Kegiatan 8 : Pelatihan Perkoperasian Berbasis Syariah	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang		180	180	-	-	-	436,833,800	DAK/APBD	
Kegiatan 9 : Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	210	210	-	-	-	-	508,449,300	DAK/APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 10 : Pelatihan Kewirausahaan Tentang Manajemen Usaha Kecil	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	180	180	-	-	-	436,833,800	DAK/APBD	
Kegiatan 11 : Pelatihan Kewirausahaan Tentang Strategi Pengembangan Jaringan Bisnis	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	180	180	-	-	-	436,833,800	DAK/APBD	
Kegiatan 12 : Pendampingan	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang	38	38	-	-	-	672,600,000	DAK/APBD	
Kegiatan 13 : Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan dan Akuntansi Bagi Gerakan koperasi dan UMKM di daerah Perbatasan	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang	-	-	60	60	-	180,887,000	DAK/APBD	
Kegiatan 14 : Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan koperasi dan UMKM Di Daerah Perbatasan	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang	-	-	30	30	-	90,458,000	DAK/APBD	
Kegiatan 15 : Pelatihan Kewirausahaan Tentang Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM Di Daerah Perbatasan	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	-	-	30	30	-	90,440,000	DAK/APBD	
Kegiatan 16 : Pelatihan Membangkitkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Gerakan Koperasi dan UKM di Daerah Perbatasan	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	-	-	60	60	-	180,887,000	DAK/APBD	
Kegiatan 17. Pelatihan Wirusaha Pemula Se Kalimantan Barat	Meningkatnya Jumlah Wirusaha Pemula	Orang	-	-	150	150	-	367,500,000	DAK/APBD	
Kegiatan 18 : Pelatihan Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/ Kota Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	-	-	150	150	150	367,500,000	DAK/APBD	
Kegiatan 19 : Pelatihan Kewirausahaan Bidang Produk Hasil Laut Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabuapten/Kota Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	-	-	150	150	-	367,500,000	DAK/APBD	
Kegiatan 20 : Pelatihan Kewirausahaan Bidang Pemasaran Berbasis Teknologi Informatika Bagi Gerakan koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang	-	-	180	180	120	735,000,000	DAK/APBD	
Kegiatan 21 : Pelatihan Pengelola Koperasi Sekolah Bagi Pengurus Koperasi Sekolah Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang	-	-	120	120	-	294,000,000	DAK/APBD	
Kegiatan 22 : Peningkatan Kapasitas SDM UMKM	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendamping	Orang	-	-	54	54	-	752,328,000	DAK/APBD	
Kegiatan 23 : Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Se Kalimantan Barat	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Orang	-	-	-	-	150	367,500,000	DAK/APBD	
Kegiatan 24 : Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Orang	-	-	-	-	30	175,304,000	DAK/APBD	
Kegiatan 25 : Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Orang	-	-	-	-	30	173,604,000	DAK/APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 26 : Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Di Daerah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Orang		-	-	-	-	30	193,764,000	DAK/APBD	
Kegiatan 27 : Pelatihan Manajemen Permodalan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM Se Kalimantan Barat	Meningkatnya Kualitas SDM KUMKM	Orang		-	-	-	-	120	294,000,000	DAK/APBD	
Kegiatan 28 : Pelatihan Kewirausahaan Tentang Produk Unggulan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM 14 Kabuapten/Kota Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang		-	-	-	-	120	294,000,000	DAK/APBD	
Kegiatan 29 : Pelatihan Pengembangan Usaha Berbasis Gender Bagi Gerakan koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota Se Kalbar	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	Orang		-	-	-	-	60	147,000,000	DAK/APBD	
Kegiatan 30 : Peningkatan Kapasitas SDM dan UMKM	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendamping	Orang		-	-	-	-	54	752,328,000	DAK/APBD	
PROGRAM 4 : Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)											
Kegiatan 1 : Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan KUMKM	Tersedianya Laporan Pembiayaan KUMKM	Laporan	2	2	2	1	1	-	660,753,200	DAU/ APBD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Bimtek Petugas Penilai Kesehatan KSP/KJKS	Tersedianya Petugas Penilai Kesehatan KSP/KJKS bersertifikat	Orang	30	62	62	-	-	-	254,201,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 3 : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam KJKS	Tercapainya Koperasi simpan Pinjam/KJKS yang Mampu melayani anggota dan masyarakat	Unit	48	48	48	48	48	-	600,593,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 4 : Verifikasi Usulan Permohonan Pembiayaan KUMKM	Tersedianya Data Usulan Pembiayaan KUMKM	Kab/Kota		14	14	-	-	-	79,798,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 5 : Workshop fasilitasi bantuan pembiayaan KUMKM	Terlaksananya kegiatan workshop fasilitasi bansos	Orang		60	60	60	60	-	217,961,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 6 : Diversifikasi Pembiayaan KUMKM	Terlatihnya Wirausaha Pemula	Orang		70	70	-	-	-	151,159,000	DAU/ APBD	
PROGRAM 5 : Program Peningkatan Kualitas Koperasi											
Kegiatan 1 : Penguatan kelembagaan koperasi	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Koperasi	Koperasi		-	-	-	-	55	143,550,000	DAU/ APBD	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi	Terlaksananya Penilaian Koperasi berprestasi di tingkat Provinsi	Koperasi		-	-	-	-	56	196,051,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 3 : Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di Kalimantan Barat	Terlaksananya Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalbar	Orang		-	-	-	-	120	221,900,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 4 : Workshop Pemeringkatan Koperasi	Terlaksananya Workshop Peningkatan Koperasi	Orang		-	-	-	-	40	41,062,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 5 : Workshop Koperasi Sekolah	Terlaksananya Workshop Koperasi Sekolah	Orang		-	-	-	-	90	83,760,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 6 : Rapat Konsolidasi Pemutahiran Data Koperasi	Terlaksananya Rapat Konsolidasi Pemutahiran Data koperasi	Orang		-	-	-	-	30	51,250,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 7 : Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi	Meningkatnya Keterampilan Petugas Data Kab/Kota/Prov khususnya dalam Rangka Mengantisipasi Mutasi Petugas data	Orang		-	-	-	-	30	66,900,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 8 : Rapat konsolidasi pengawasan koperasi	Meningkatnya Pemahaman Koperasi terhadap aturan Perundang-Undangan	Orang		-	-	-	-	120	135,561,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 9 : Rapat teknis pengawasan koperasi	Meningkatnya Pemahaman Pejabat Pembina Koperasi	Orang		-	-	-	-	30	53,548,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 10 : Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	Tersedianya Laporan hasil Monev Koperasi berbadan Hukum Koperasi	Laporan		-	-	-	-	1	152,218,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 11 : Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Penilaian Kesehatan simpan pinjam Koperasi badan Hukum Provinsi yang mendapatkan sertifikat penilaian	Koperasi		-	-	-	-	50	149,147,000	DAU/ APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 12 : Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Koperasi badan hukum Provinsi yang Berkualitas	Koperasi		-	-	-	-	10	116,039,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 13 : Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Penilaian USP Koperasi Kab/Kota	USP		-	-	-	-	196	153,217,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 14 : Bimtek Penilai kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petugas Penilai Usaha Simpan Pinjam	Orang		-	-	-	-	35	72,620,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 15 : Bimtek Penyusunan Proposal usaha Koperasi	Terlatihnya Tenaga Terampil Penyusun Proposal Pembiayaan Koperasi	Orang		-	-	-	-	60	75,994,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 16 : Advokasi kemitraan Koperasi Perkebunan	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Perkebunan Tentang Perkoperasian Perkebunan	Orang		-	-	-	-	270	330,524,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 17 : Pengembangan Koperasi nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Pemberdayaan Usaha Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Orang		-	-	-	-	150	190,460,000	DAU/ APBD	
Kegiatan 18 : Workshop Pembiayaan Koperasi	Meningkatnya Sumber-Sumber Pembiayaan Koperasi	Orang		-	-	-	-	100	143,152,000	DAU/ APBD	
PROGRAM 6 : Program Peningkatan Daya Saing KUMKM											
Kegiatan 1 : Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Fasilitasi Promosi	Event	7	5	5	3	3	1	2,657,593,000	APBN	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat
INDIKATOR SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. (Upah Minimum Provinsi (UMP & UMK)											
PROGRAM 1: Pembinaan Hubungan Industrial											
Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi	Terlaksananya penetapan upah minimum Provinsi (UMP) dan Kab/Kota (UMK)	Rupiah	1,560,000	1,739,400	1,739,400	1,882,900	1,882,900	2,046,900	700,000,000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan 2 : Focus Group Discussions (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Orang	170,063.0	221,709.00		245,294.00		223,453	105,000,000	APBD	
PROGRAM 2: Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja											
Kegiatan 1 : Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Sektor Formal & Informal	Terwujudnya pekerja sektor informal / pekerja bukan penerima upah yang mendapatkan diseminasi SJSN sehingga meningkatkan pemahaman mengenai programjaminan sosial	orang	0.0	0.00	0.00	200	200	100		APBN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
PROGRAM 1: Petatihan Kerja											
Kegiatan 1 : Pelatihan dan Pemagangan dalam Negeri Berbasis Pengguna	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang terampil	Orang	0	45	45	30	30	-	925,000,000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs: 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											
PROGRAM 1: Perlindungan, Pengawasan, dan Kesejahteraan Tenaga Kerja											
Kegiatan 1 : Sosialisasi Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya sosialisasi sistem manajemen	Perusahaan		50	50	50	50	50	370,000,000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan 2 : Peningkatan Wawasan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan penerapan Norma K3	Perusahaan		50	50	50	50	50	250,000,000	APBD	
Kegiatan 3 : Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya sosialisasi norma K3	Orang		300	300	300	300	300	950,000,000	APBD	
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											
INDIKATOR SDGs: 9.1.1 (a) Kondisi mantap jalan nasional.											
PROGRAM 1: Penvelenggaraan Jalan											
Kegiatan 1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Meningkatkan Pelayanan Jalan Nasional : 1.1 Panjang jalan yang mendapat (pemeliharaan rutin)	Km	365.07	17.98	17.98	576.22	575.86	613.44		APBN	Satker PJN Wilayah 2 Prov. Kalbar
	1.2 Panjang jalan yang mendapat (pemeliharaan rutin) Kondisi	Km		310.34	310.34	0	0	0			

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
1.3 Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin Presentif	Km		313.08	313.08	0	0	0			
1.4 Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin	M	4,840.05	5,669.65	7,094.05	6,835.35	6,835.96	5,781.15			
1.5 Panjang jalan yang mendapat pel. Berkala / rehabilitasi	Km	7.00	4.00	4.00	7.50	7.50	31.00			
1.6 Panjang jembatan yang mendapat pel. Berkala / rehabilitasi	M	572.63	308.90	308.90	0	0	1,333.00			
1.7 Panjang jalan yang mendapat rekonstruksi / Peningkatan struktur jalan 1	Km	27.52	5.88	5.88	10.94	10.94	39.42			
Menurunkan Waktu Tempuh pada koridor utama : 2.1 Panjang jembatan yang mendapat penggantian	M	95.00	170.00	170.00	40.00	40.00	128.00			
2.2 Panjang jalan yang mendapat pelebaran	Km	13.12	8.20	6.20	0	0	3.50			
2.3 Panjang jalan baru yang dibangun	Km	2.50	2.00	0.00	0	0	27.64			
2.4 Panjang jembatan yang mendapat pelebaran	M	0	0	0	0	0	73.80			
INDIKATOR SDGs: 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.										
PROGRAM 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri										
Kegiatan 1 : Pengembangan Industri Agro Kimia Tekstil dan kimia	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Ungulan Kalbar	Komoditi	4.00	4.00		4.00	4.00	10,008,000,000	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 2 : Pengembangan Industri Logam Mesin Alat Transportasi	2.1 Pengembangan Industri berbasis IT	Lokasi	1.00	1.00		1.00	1.00	5,527,000,000	APBD	
	2.2 Peningkatan Alsintan Center	Lokasi	1.00	1.00		1	1			
Kegiatan 3 : Pengembangan Perwilayahan Industri Daerah	3.1 Jumlah Kawasan Industri	Kawasan	3.00	4.00		4	3		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.2 Jumlah Sentra IKM	Sentra		4.00		4				
Kegiatan 4 : Pengembangan Sumber Daya Industri	4.1 Jumlah SDM Sertifikasi Kompetensi	Orang	0.00	0.00		0	20		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4.2 Peningkatan SDM IKM	Orang				T:80 R:100	80			
Kegiatan 5 : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5.1 Operasional UPT Pembina IKM	UPT	1	1	1	1	1	10,125,000,000	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5.2 Jumlah IKM yang dibina	IKM	70.00	75.00		80	90			
INDIKATOR SDGs: 9.4.1*										
PROGRAM 1: Pengembangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan										
Program Pengembangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan	1. Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan.		23.7	32	41.2					
	Persentase desa berlistrik									
PROGRAM 2 : Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi										
Kegiatan 1: Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca		Ton CO2 eq	2.012	0.2175		0.2175		0.2175	APBD	Dinas Perumahan Rayat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Kegiatan 2. : program Kampung Iklim		Jumlah Daerah	2,012	28 daerah		28 daerah		28 daerah	APBD	
INDIKATOR SDGs: 9.5 Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB										
PROGRAM 1: Pengembangan										
Kegiatan 1. Lomba Karya Ilmiah	Jumlah dokumen lomba karya ilmiah	Rupiah (juta)	202,525,600	213,250,000		141,928,500		215,000,000	215,000,000	APBD
Kegiatan 2. Lomba Karya Perencanaan	Jumlah dokumen Lomba Karya Perencanaan	Rupiah (juta)	121,235,000	101,270,000		114,850,000		204,665,000	204,665,000	APBD
Kegiatan 3. Riset Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perencanaan	Jumlah dokumen Riset Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perencanaan	Rupiah (juta)	75,000,000	80,000,000		30,000,000		50,626,000	0.00	APBD
Kegiatan 4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah dokumen Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Rupiah (juta)	34,457,000	0.00		0.00		109,327,000	0.00	APBD
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara										
INDIKATOR SDGs: 10 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik										
Kegiatan 1. Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Masyarakat yang mendapatkan pelatihan	org	1446	100	93.6	100	94.7	100	100	6,891,173
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Desa	42	100	95	100	98	100	100	3,653,469
	Meningkatnya keaktifan kelompok masyarakat	peserta	160	100	96.7	100	98.2	100	100	6,717,779

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	desa/kel	28	100	86.8	100	97.9	100	100	7,105,386		
TUJUAN 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
Indikator SDGs 11.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar atau rumah yang tidak layak											
11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
11.1.1(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpeuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)											
11.1.1(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpeuhi SPP											
PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum											
Kegiatan 1 : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)	Jiwa	11550	11550	15247	15650	16432.5	17254.15	84,540	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kali	14	14	14	14	14	14	993	APBD	
Kegiatan 3 : Inventarisasi dan Penyusunan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Tersedianya Inventarisasi dan DataBase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Terpentil/Rawan Air, Kawasan IKK Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Sistem Penyediaan Air Minum Pada Kawasan permukiman	Dokumen	1	1	1	1	1	1	229	APBD	
PROGRAM 2 : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan											
Kegiatan 1 : Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Luasan / Panjang Drainase Permukiman yang terbangun	meter	0.8	0.8					6,450	APBD	
Kegiatan 2 : Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Luasan/ panjang drainase perkotaan yang terbangun (ha)	Ha	0.3	0.3					7359	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 3 : Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kalbar	Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan kesehatan lingkungan kalbar	kali	14	14					102	APBD	
Kegiatan 4 : Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan	Pendataan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1					495	APBD	
Kegiatan 5 : Penyusunan Masterplan dan Detail Engineer Design (DED) Air Limbah	Tersedianya Masterplan dan DED Air Limbah	dokumen	1	1							
Kegiatan 6 : Pengembangan dan pengelolaan Sistem Drainase Kawasan Pedesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota dan skala kawasan pedesaan yang dibangun pada kawasan pedesaan dan permukiman perkotaan	jiwa	0		161896	161896	161896	161896	62496	APBD	
Kegiatan 7 : Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyedia Kesehatan Lingkungan Kawasan Pedesaan dan Perkotaan Permukiman	Pelaksanaan monitoring, identifikasi dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan kesehatan lingkungan	kali	0		14	14	14	14	465	APBD	
Kegiatan 8 : Inventarisasi dan Database Pengembangan sitem Penyediaan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan		0		402	402	401	401	2,241	APBD	
Kegiatan 9 : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Kawasan Pedesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada kawasan pedesaan dan permukiman Perkotaan	Jiwa	0		3675	3858.75	4051.6875	4254.271875	15,435	APBD	
Kegiatan 10 : Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Kawasan Pedesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan pada kawasan pedesaan dan permukiman perkotaan	Jiwa	0		3675	3858.75	4051.6875	4254.271875	17,497	APBD	
PROGRAM 3 : Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Pedesaan											

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1 : Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Perkotaan	Meter	55,068.00	55,068.00	66,068.00	8,116.00	83,366.00	9,632.00	269,442.67	APBD	
Kegiatan 2 : Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Pedesaan dan PPIP	Monitoring Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	Kab/Kota	14	14	14	14	14	14	2,355.98	APBD	
PROGRAM 4 : Penyelenggaraan Penataan Ruang											
Kegiatan 1 : Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi	Kab/Kota	3	3	5	3	3	3	1401.6	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
PROGRAM 5 : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah											
Kegiatan 1 : Koordinasi Penataan Ruang Wilayah	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	persen	100	100	100	100	100	100	870.57	APBD	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	persen	-	-	100	100	100	100	400	APBD	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan											
Indikator SDGs : 11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas											
11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan											
11.2.1 (b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar											
PROGRAM 1 : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum											
Kegiatan 1 : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan Permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)	Jiwa	11550	15247	15650	16432.5	17254.15	84,540	84,540	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Kali		14	14	14	14	14	993	APBD	
Kegiatan 3 : Inventarisasi dan Penyusunan Dataase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ,Terpencil / Rawan Air, Kawasan IKK, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Sistem Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Permukiman	Dokumen		1	1	1	1	1	2,229	APBD	
Target 11.2 Pada tahun 2030, Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara											
Indikator SDGs : 11.3.1 Proporsi Populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.											
11.3.1 (a) Jumlah kota sedang di luar Jawa yang darahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.											
11.3.1 (b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).											
PROGRAM 1 : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah											
Kegiatan 1 : Koordinasi Penataan Ruang Wilayah	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	870.57	APBD	Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	persen	-	-	100	100	100	100	400	APBD	
PROGRAM 2 : Penyelenggaraan Penataan Ruang											
Kegiatan 1 : Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang didampingi	Kab/Kota	3	3	5	3	3	3	1401.6	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen-dokumen Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen	0		1	1	1		2850	APBD	
Kegiatan 3 : Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen	0		1	1	1	1	1350	APBD	
Target 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia											
Indikator SDGs : 11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat											
PROGRAM 1 : Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem											

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya penyelenggaraan Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan	orang	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	845.82	APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pelaksanaan tugas SDM Pamhut lebih optimal	UPTD	0	18 UPTD	18 UPTD	18 UPTD	18 UPTD	18 UPTD	1081.5	APBD	
Kegiatan 3 : Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pamhut di 13 Wilayah	kabupaten	0	1 Prov	13 Kab	0	0	0	250	APBD	
Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada areal IUPHHK (DBHDR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pamhut pd IUPHHK	kabupaten	0	12 Kab	12 Kab	12 Kab	12 Kab	12 Kab	1095.55	APBD	
Kegiatan 5 : Bimbingan Teknis PPNS Dinas Kehutanan Prov Kalbar (DBHDR)	Terlaksananya Bimbingan Teknis PPNS di Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	kali	0		2 Kabupaten	12 Kab	12 Kab	12 Kab	935.31	APBD	
Kegiatan 6 : Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		0	1 Prov	17 KPH + 1 Tahura	1 Prov	1 Prov	1 Prov	390.29	APBD	
Kegiatan 7 : Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hutan		0	1 Prov	17 KPH + 1 Tahura	1 Prov	1 Prov	1 Prov	1397.2	APBD	
Kegiatan 8 : Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Tersedianya kawasan ekosistem esensial	kabupaten	0			2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	455.13	APBD	
Kegiatan 9 : Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Tersedianya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	Hektar	0			2000 Ha	2000 Ha	2000 Ha	0	APBD	
Kegiatan 10 : Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan	Tersedianya kawaan konservasi dan poteni jasa lingkungan	kabupaten	0	5 Kab					129.78	APBD	
Kegiatan 11 : Forum Kawasan Ekosistem Esensial	Terlaksananya Forum Kawasan Ekosistem Esensial	kali	0		1 Kegiatan	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	481.49	APBD	
Kegiatan 12 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	Terlaksananya Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	Lokasi	0		1 Lokasi	2 kabupaten	2 kabupaten	2 kabupaten	810.73	APBD	
Kegiatan 13 : Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	Terlaksananya Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	kabupaten	0		2 Kabupaten				90	APBD	
Kegiatan 14 : Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	kabupaten	0		2 Kabupaten				230.75	APBD	
Kegiatan 15 : Sosialisasi Pencegahan Karhutla (DBHDR)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Karhutla	durasi (tahun)	0	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1513.39	APBD	
Kegiatan 16 : Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	durasi (tahun)	0		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1501.53	APBD	
Kegiatan 17 : Pemantauan dan Updating Data Kerusakan Hutan	Terlaksananya Pemutahiran Data Kerusakan Hutan	durasi (tahun)	0	1 Tahun					233.86	APBD	
Kegiatan 18 : Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	kabupaten	0	5 Kab	4 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	715.5	APBD	
Kegiatan 19 : Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	630.45	APBD	
Kegiatan 20 : Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	Terlaksannanya pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	unit	0	1 Unit		4 Unit	0	0	853.93	APBD	
Kegiatan 21 : Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Peduli Api	durasi (tahun)	0	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	892.77	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 22 : Posko DALKARHUTLA (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT	orang	0	255 Orang	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	6429.56	APBD	
Kegiatan 23 : Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar (DBHDR)	Terlaksananya Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar	durasi (tahun)	0			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	300	APBD	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus Indikator SDGs : 11.5.1 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)											
PROGRAM 1 : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Kab / Kota	14	14	14	14	14	14	880.67	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Terselenggaranya koordinasi pengurangan risiko bencana dan peringatan hari PRB Nasional	Kab / Kota	12	12	14	14	14	14	622.74	APBD	
Kegiatan 3 : Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun	1	1	1	1	1	1	2,356.78	APBD	
Kegiatan 4 : Rapat Koordinasi Pecegahan dan Kesiapsiagaan Bencana asap Akibat Karhutla, Batingsor, dan Konflik Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Batingsor, dan Konflik Sosial	orang	70	70	70	70	70	70	935.8	APBD	
Kegiatan 5 : Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana	Pokmas	3	3	5	5	5	5	1,471.21	APBD	
Kegiatan 6 : Bimbingan Teknis Mitigasi Bencana	Terlaksananya Bimbingan teknis Mitigasi Bencana	orang	0	0	100	100	100	100	1,230.19	APBD	
Kegiatan 7 : Penyuluhan Kebencanaan di daerah rawan bencana	Terlaksananya Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	orang	60	60	120	120	120	120	567.91	APBD	
Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla	Terlaksananya Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla	orang	210	210	280	280	280	280	1,501.17	APBD	
PROGRAM 2 : Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan											
Kegiatan 1 : Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya persediaan logistik bencana berikut pendistribusiannya	jenis logistik	4	4	7	7	7	7	1336,745,8	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Pengecekan dan evaluasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Tersedianya persediaan logistik dan peralatan di BPBD Kab/Kota	Kab / Kota	14	14	14	14	14	14	698,347,6	APBD	
Kegiatan 3 : Simulasi peralatan penanggulangan bencana	Terlatihnya anggota Pokmas/Relawan bencana dalam penggunaan peralatan bencana	orang	90	90	90	90	90	90	1,101.54	APBD	
Kegiatan 4 : Mobilisasi sumberdaya dan peralatan di daerah yang terkena bencana	Terlaksananya penanganan bencana (mobilisasi sumberdaya dan peralatan)	kali	14	14	14	14	14	14	923.65	APBD	
Kegiatan 5 : Aktivasi posko kedaruratan bencana	Terlaksananya aktivasi posko kedaruratan bencana	tahun	1	1	1	1	1	1	1,174.06	APBD	
Kegiatan 6 : Monitoring dan Evaluasi Penanganan darurat bencana serta koordinasi bantuan darurat bencana	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana serta koordinasi bantuan darurat bencana	lokasi	14 kab/kota dan Jakarta	15 kab/kota dan Jakarta	16 kab/kota dan Jakarta	17 kab/kota dan Jakarta	18 kab/kota dan Jakarta	19 kab/kota dan Jakarta	967.34	APBD	
Kegiatan 7 : Mobilisasi sumberdaya da peralatan di daerah yang terkena bencana (kebakaran hutan dan lahan)	Terlaksananya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (mobilisasi sumberdaya dan peralatan)	kali	14	14	14	14	14	14	842.03	APBD	
Kegiatan 8 : Pembinaan Aparatur dalam rangka penanganan darurat bencana	Terlaksananya Pembinaan Aparatur dalam rangka penanganan darurat bencana	orang	140	140	140	140	140	140	1,810.07	APBD	
Kegiatan 9 : Penataan dan pemeliharaan gudang logistik dan peralatan	Terlaksananya Penataan dan pemeliharaan gudang logistik dan peralatan	kali/triwulan	4	4	4	4	4	4	341.57	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 10 : Mobilisasi peralatan dari BNPB	Tersedianya biaya pengambilan peralatan penanggulangan bencana dari BNPB	unit	3	3	3	3	3	3	255.67	APBD	
Kegiatan 11 : Kaji cepat penanganan bencana	Terlaksananya Kaji cepat penanganan bencana	kali	0	0	14	14	14	14	657.93	APBD	
Kegiatan 12 : Pengumpulan data bencana	Tersedianya data bencana	dokumen	0	0	14	14	14	14	431.01	APBD	
Kegiatan 13 : Belanja Tak Terduga penanganan darurat banjir, angin puting beliung dan tanah longsor	Terlaksananya penanggulangan bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor	hari	0	0	14	14	14	14	4,000.00	APBD	
Kegiatan 14 : Belanja Tak Terduga penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	hari	0	0	14	14	14	14	4,000.00	APBD	
Kegiatan 15 : Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Terlaksananya peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	orang	0	0	40	40	40	40	1,088.28	APBD	
PROGRAM 3 : Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan											
Kegiatan 1 : Pendataan Kerusakan/kerugian Masyarakat di daerah Pasca Bencana	Persentase Data Kerusakan/kerugian masyarakat di daerah pasca bencana	persen	0	0	0	0	0	0	800	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan 2 : Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Daerah Pasca Bencana	Persentase daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	0	0	0	0	0	0	2,500.00	APBD	
Kegiatan 3 : Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase SDM	persen	0	0	0	0	0	0	800	APBD	
Kegiatan 4 : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah Pasca Bencana	Persentase daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	0	0	0	0	0	0	600	APBD	
TARGET 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
Indikator SDGs : 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah pada perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.											
PROGRAM 1 : Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3											
Kegiatan 1 : Fasilitas Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	ibu kota Kabupaten/kota yang mendapatkan Fasilitas Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	ibu kota kabupaten/kota	3	3	3	3	3	3	148.11	APBD	
Kegiatan 2 : Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Laporan Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	laporan	1	1	1	1	1	1	62.13	APBD	
Kegiatan 3 : Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Laporan Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	laporan	1	1	1	1	1	1	67.1	APBD	
Indikator SDGs : 11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).											
PROGRAM 1 : PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI											
Kegiatan 1 : Pemantauan Indeks Kualitas Udara	Laporan pemantauan Indeks Kualitas Udara	laporan	1	1	1	1	1	1	540.15	APBD	
TARGET 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap											
Indikator SDGs : 11.b. 1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.											
11.b.2 Dokumen strateg pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah											
PROGRAM 1 : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA											
Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Kab / Kota	14	14	14	14	14	14	880.67	APBD	
Kegiatan 2 : Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Terselenggaranya koordinasi pengurangan risiko bencana dan peringatan hari PRB Nasional	Kab / Kota	12	12	12	12	12	12	622.74	APBD	
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan											
Indikator : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.											
Program	Pengendalian Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim										
Kegiatan 1 : Proper Daerah (Tingkat	Indikator 1 : Taatnya perusahaan terhadap	%	82	82	88	94	100	100	500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2 : Pemantauan RKL/ RPL	Indikator 1 : Taatnya perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan	%	82	82	88	94	100	100	735	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator : Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)											
Program : Pengelolaan Sampah dan Limbah B3											
Kegiatan 1 : Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Indikator : Persentase limbah B3 yang terkelola sesuai aturan oleh pengumpul limbah B3 skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	400	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program : Pengendalian Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim											
Kegiatan 2 : Proper Daerah (Tingkat Provinsi)	Indikator 1 : Taatnya perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan	%	82	82	88	94	100	100	500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Tujuan : Jumlah timbulan sampah yang terkelola											
Indikator : Jumlah timbulan sampah terkelola											
Program : Pengelolaan Sampah dan Limbah B3											
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan melaui Sistem 3R	Indikator : Presentase Kabupaten Kota yang memiliki Bank sampah	Laporan	1	1	1	1	1	1	350	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program : Program Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim											
Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Kota Bersih dan Teduh	Indikator : Presentase Kabupaten Kota yang memiliki Bank sampah	Laporan	1	1	1	1	1	1	400	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program : Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3											
Kegiatan : Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Indikator : Persentase Limbah B3 yang terkelola sesuai aturan oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	250	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Indikator : Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah	%	42.58	57.14	64.29	71.43	78.57	78.57	300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya											
Indikator : Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional Dan Daerah											
PROGRAM 1 : Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan	%	30-45	30-45	45-60	60-75	90-100	90-100	327.19	APBD	BPBD
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir	%	30-45	30-45	45-60	60-75	90-100	90-100	634.41	APBD	BPBD
	Terlaksana nya Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit	%	30-45	30-45	45-60	60-75	90-100	90-100	226.06	APBD	BPBD
Indikator : Jumlah Korban Meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
PROGRAM : Kedaruratan dan logistik dalam kebencanaan											
Kegiatan 1 : Mobilisasi sumber daya peralatan di daerah yang terkena bencana	Terlaksana nya mobilisasi sumber daya peralatan di daerah yang terkena bencana	Kabupaten / Kota	14	14	14	14	14	14		APBD	BPBD
Kegiatan 2 : Fasilitas koordinasi dan konsultasi penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penanganan darurat bencana	Kabupaten / Kota	14	14	14	14	14	14		APBD	BPBD
Kegiatan 3 : Tanggap darurat penanganan bencana	Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian sembako dan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana	Kabupaten / Kota	14	14	14	14	14	14		APBD	BPBD
Sub Tujuan : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
Indikator : Dokumen laporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
PROGRAM 1 : Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah											
Kegiatan 1 : Koordinasi perencanaan pembangunan rendah karbon	Indikator : Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan rendah karbon Kalbar	Dokumen	0	0	1	1	1	1	800	APBD	BAPPEDA
PROGRAM 2 : Pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim											

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Pembinaan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi gas, rumah kaca	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca Kalbar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	450	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
Kegiatan 2 : Fasilitasi Pemulihan lahan akses terbuka	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani	%	57.26	67.26	77.26	87.26	97.26	100	765	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
PROGRAM 3 : Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3											
Kegiatan 1 : Pembinaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Persentase limbah B3 yang dikelola sesuai aturan oleh pengumpul limbah B3 skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	250	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
Kegiatan 2 : Pembinaan pengelolaan sampah perkotaan melalui sistem 3R	Persentase Kab/Kota yang memiliki bak sampah	%	42.68	57.14	64.29	71.43	78.57	78.57	300	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
Kegiatan 3 : Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Tersusunnya kebijakan dan strategis daerah pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen Kebijakan	-	1	-	1	-	1	325	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
PROGRAM 4 : Penatausahaan dan pengelola hutan											
Kegiatan 1 : Pengendalian pengelolaan Hutan Alam	Pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HA secara lestari	Unit	-	9	15	16	17	17	364	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 2 : Pengendalian pengelolaan hutan tanaman	Pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HA secara lestari	Unit	-	12	14	15	17	17	232	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 3 : Evaluasi izin pemanfaatan kayu dalam areal perkebunan	Terkendalanya Izin Pemanfaatan kayu di dalam areal perkebunan	Kabupaten / Kota	3	3	3	3	3	3	500	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM 5 : Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
Kegiatan 1 : Patroli pengamanan hutan	Prosentase lokasi/target pengamanan hutan/hasil hutan	HL/HP/HPK	350	350	350	350	350	350	1,725	APBD/APBN/DBH DR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 2 : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengamanan hutan pada IUPHHK	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pamhut pada IUPHHK	Kab/Kota	12	12	12	12	12	12	850	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 3 : Pengelolaan pengawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	Terkelolanya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	KPH	17	17	17	17	17	17	443	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 4 : Pembinaan dan penetapan kawasan ekosistem Esensial	Terbinanya pengelolaan KEE di KalBar	Kab/Kota	-	-	2	2	2	2	481	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 5 : Pembinaan dan monitoring pengendalian kerusakan lingkungan pada unit manajemen	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan pada unit manajemen	Unit Manajemen	-	8	9	10	10	10	700	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM : Pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan											
Kegiatan 1 : Pembangunan hutan rakyat	Jumlah kelompok dan luas pengelolaan hutan rakyat	Kelompok tani hutan	-	4	2	2	2	2	800	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 2 : penghijauan lingkungan dan rehabilitasi lahan	Luas tanam bibit kayu-kayuan dan MPTS kegiatan penghijauan Lingkungan	Ha	225	225	225	225	225	225	2,200	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 3 : pemeliharaan hasil kegiatan penanaman pada HTR/RHL/Hutan kota	Luas tanaman yang terpelihara	Lokasi Ha	-	-	4	5	4	5	2,065	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 4 : pembangunan model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya pembangunan areal model DAS Mikro di KalBar	Ha	-	60	-	60	-	60	2,100	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 5 : pengembangan model DAS Mikro Provinsi KalBar (DBH-DR)	Terealisasinya rancangan kegiatan Dalam Dokumen RPDAST di areal Moodel Das Mikro di Kalimantan Barat	Ha	-	30	-	30	-	35	2,300	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 6 : Rehabilitasi lahan melalui kegiatan sipil teknis diareal model DAS Mikro (DBH DR)	Terlaksannya Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) di areal Model DAS Mikro	Unit	-	-	-	12	12	12	9,930	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 7 : Gerakan menanam bagi forum DAS provinsi KalBar (APBD)	Terlaksananya gerakan menanam forum DAS provinsi kalbar	Komunitas	0	0	1	1	1	1	600	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM : Penyuluhan dan pengembangan perhutanan sosial											

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 1 : penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan dalam pembangunan kehutanan, pengembangan usaha produktif dan pengembangan kelembagaan kelompok Tani Hutan	Kelompok tani hutan	30 PH, 2 KTH	24 PH, 20 KTH	20 PH, 2KTH	25 PH, 10 KTH	26 PH, 10 KTH	27 PH, 10 KTH	1,300	APBD	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 2 : Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBHDR)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dan penghijauan melalui pembangunan demplot pembuatan bibit RHL dan penanaman oleh penyuluh kehutanan, serta lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,615	APBD	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 3 : Pengembangan perhutanan sosial	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di bidang kehutanan	KTH	2	2	4	4	5	6	1,754	APBD	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan : Kegiatan fasilitasi peningkatan sarana prasarana usaha ekonomi produktif kelompok tani hutan (DAK)	Meningkatkan kualitas produksi usaha ekonomi produktif kelompok tani hutan	KTH	-	-	15	17	20	23	5,801	APBD/DAK	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 4 : Pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial (DBHDR)	Terbangunnya pemahaman masyarakat dan berkembangnya peluang usaha berbasis perhutanan sosial (HD/HKM/HTR/kemitraan)	KTH	-	20	19	30	35	40	5,873	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 5 : Pengelolaan hutan adat dan hutan hak	Optimalnya proses penetapan hutan adat dan hutan hak	Ha/MHA	-	5,100	5,100	5,100	6,800	8,500	1,335	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 6 : Fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat (DBHDR)	Optimalnya proses penetapan hutan adat	MHA	-	7	7	-	-	-	845	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 7 : Penguatan kelembagaan MHA pengelola hutan adat (DBHDR)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MHA dengan pengelolaan hutan adat	MHA	-	7	7	-	-	-	784	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN	
Kegiatan 8 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola hutan adat dan hutan hak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MHA dengan pengelolaan hutan adat	MHA	-	-	-	5	6	7	827	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN	
PROGRAM : Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan												
Kegiatan 1 : Pengembangan kebun karet rakyat, kopi rakyat, aren rakyat	Terbangun dan meningkatnya kebun rakyat	Ha	380	190	300	475	750	950	8,150	APBD	DINAS PERKEBUNAN	
Kegiatan 2 : Pencegahan kebakaran pada kebun rakyat	Tercegahnya kebakaran lahan pada perkebunan rakyat	Ha	380	190	300	475	750	950	500	APBD	DINAS PERKEBUNAN	
Kegiatan 3 : Pengawasan dan pembinaan perkembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Persentase pengelolaan sawit yang memperoleh sertifikat RSPO-pengelolaan sawit berkelanjutan	%	-	60	70	80	90	100	350	APBD	DINAS PERKEBUNAN	
Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan samudera untuk pembangunan berkelanjutan												
Sub tujuan : 14.2. pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya , dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat												
Indikator : Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruan laut nasional												
PROGRAM 1 : pengolahan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil												
Kegiatan : Penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	629	APBD	DKP
Indikator : Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan												
PROGRAM 2 : pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan tangkap												
Kegiatan 1 : Penyediaan sarana pendukung perlindungan dan pengkayaan sumber daya ikan perikanan tangkap	Jumlah apartemen ikan/rumah ikan/rumpon yang diberikan ke KUB	Unit	1	1	1	1	1	1	1	356	APBD	DKP
Kegiatan 2 : Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan	Jumlah alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan ke KUB	Unit	3	3	2	3	3	3	514	APBD	DKP	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3 : Penyediaan alat bantu penangkapan ikan	Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang diberikan KUB	Unit	0	20	10	20	20	20	316	APBD	DKP
Kegiatan 4 : Penyediaan mesin kapal perikanan	Jumlah mesin perikanan yang diberikan ke KUB	Unit	0	20	10	20	20	20	335	APBD	DKP
Sub tujuan : 14.2. pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan peraktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu											
Indikator : proporsi tangkapan jenis ikan yang berbeda dalam batasan biologis yang aman											
PROGRAM : pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
Kegiatan 1 : Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dipantau dan diawasi perijinannya	Unit	0	140	145	150	160	170	66	APBD	DKP
Sub tujuan : 14.5. pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah yang tersedia											
Indikator : jumlah luas kawasan konservasi perairan											
PROGRAM : Pengolahan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil											
Kegiatan 1: Jejaring kawasan konservasi	Jumlah peserta pertemuan jejaring konservasi	orang	0	30	30	30	30	30	25	APBD	DKP
Kegiatan 2 : Rehabilitasi kawasan konservasi di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah kawasan konservasi di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rehabilitasi	kawasan	2	2	2	2	2	2	90	APBD	DKP
Kegiatan 3: Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif	kawasan dan	0	1	1	1	1	5	298	APBD	DKP
Kegiatan 4: Perlindungan keanekaragaman hayati laut	Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan atau dilestarikan (jenis)	jenis	0	0	4	4	4	4	120	APBD	DKP
Sub tujuan : 14.6. pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal yang tidak											
Indikator : Persentase kepatuhan pelaku usaha											
PROGRAM : pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
Kegiatan 1: Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dipantau dan diawasi perijinannya	Unit	0	140	145	150	160	170	66	APBD	DKP
Kegiatan 2: Gelar operasi kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kalbar	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa fisik dan dokumen kapalnya	Unit	0	140	145	150	160	170	66	APBD	DKP
Kegiatan 3: Bimtek kelompok masyarakat pengawas SDI Kalbar	Jumlah pokmaswas yang ikut dimtek	orang	0	30	30	30	30	30	23	APBD	DKP
Kegiatan 4: Pengembangan sistem pengawasan masyarakat sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah pokmaswas yang aktif	orang	0	0	40	43	46	48	65	APBD	DKP
Sub tujuan : 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.											
Indikator : Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
PROGRAM : : Pengolahan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil											
Penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	629	APBD	DKP
Indikator : jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
PROGRAM : : pengembangan perikanan tangkap											
Kegiatan 1: Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dikabupaten Mempawah	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Kegiatan 2: Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dikota Singkawang	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Kegiatan 3 : Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Bengkayang	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Kegiatan 4: Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Sambas	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Kegiatan 5: penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Kegiatan 6: penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dikabupaten Ketapang	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 7: penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dikabupaten Kubu Raya	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diberikan KUB	Unit	0	0	1	1	1	1	30	APBD	DKP
Indikator : jumlah nelayan yang terlindungi.											
PROGRAM : Pengembangan perikanan tangkap											
Kegiatan 1: Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang dilatih manajemen usaha, pengoperasian alat tangkap, permesinan, cuaca maritim, dan keselamatan kerja dilaut	orang	0	0	30	30	30	30	53	APBD	DKP
Sub tujuan : 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the united nations convention on the law of the sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk											
Indikator : tersedianya kerangka dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the united nations convention on the law of the sea)											
PROGRAM : Pengolahan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil											
Penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	629	APBD	DKP
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati											
Sub tujuan : pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban											
Indikator : proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan											
PROGRAM 1 : Pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim											
Kegiatan : Fasilitas pemulihan lahan akses terbuka	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani	%	57.26	67.26	77.26	87.26	97.26	100	765	APBD	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan LH
PROGRAM 2 : Penatausahaan dan pengelolaan hutan											
Kegiatan 1: Pengendalian pengelolaan hutan alam	Pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HTI secara lestari	Unit	-	9	15	16	17	17	364	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 2 : Pengendalian pengelolaan hutan tanaman	Pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HTI secara lestari	Unit	-	12	14	15	17	17	232	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan 3 : Evaluasi ijin pemanfaatan kayu dalam areal perkebunan	Terkendalnya ijin pemanfaatan kayu didalam areal perkebunan	kabupaten/kota	3	3	3	3	3	3	500	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM 3 : Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
Kegiatan : Patroli pengamanan hutan	Persentase lokasi atau target pengamanan hutan/hasil hutan	HL/HP/HPK	350	350	350	350	350	350	1,725	APBD/APBN-DNHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan pengamanan hutan pada IUPHHK	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pamhut pada IUPHHK	kab/kota	12	12	12	12	12	12	850	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pengelolaan kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	Terkelolanya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	KPH	17	17	17	17	17	17	443	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembinaan dan penetapan kawasan ekosistem esensial	Terbinanya pengelolaan KEE di Kalimantan Barat	kab/kota	-	-	2	2	2	2	481	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembinaan dan monitoring pengendalian kerusakan lingkungan pada unit manajemen	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan pada unit manajemen	unit manajemen	-	8	9	10	10	10	700	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM 4 : Pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan											
Kegiatan : Pembangunan hutan rakyat	Jumlah kelompok dan luas pengelolaan hutan rakyat	kelompok tani hutan	-	4	2	2	2	2	800	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Penghijauan lingkungan dan rehabilitasi lahan	Luas tanam bibit kayu-kayuan dan MPTS kegiatan penghijauan lingkungan	Ha	225	225	225	225	225	225	2,200	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pemeliharaan hasil kegiatan penanaman pada HTR/RH/Hutan kota	Luas tanaman yang terpelihara	Lokasi-Ha	-	-	4	5	4	5	2,065	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembangunan model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya pembangunan areal model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Ha	-	60	-	60	-	60	2,100	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pengembangan model DAS Mikro provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terealisasinya rancangan kegiatan dalam dokumen RPDAST di areal model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Ha	-	30	-	30	-	35	2,300	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Rehabilitasi lahan melalui kegiatan sipil teknis di areal Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya pembangunan konservasi tanah dan air (KTA) di areal model DAS Mikro	unit	-	-	-	12	12	12	9,930	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan : gerakan menanam bagi forum DAS provinsi Kalimantan Barat (APBD)	Terlaksananya gerakan menanam forum DAS provinsi Kalimantan Barat	komunitas	0	0	1	1	1	1	600	APBD	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM 5 : penulhan dan pengembangan perhutanan sosial											
Kegiatan : Penyelenggaraan penulhan kehutanan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan dalam pembangunan kehutanan, pengembangan usaha produktif dan pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan	kelompok tani hutan	30 PH,2 KTH	24 PH, 20 KTH	20 PH, 2 KTH	25 PH, 10 KTH	26 PH, 10 KTH	27 PH, 10 KTH	1,300	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBHDR)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dan penghijauan melalui pembangunan demplot pembuatan bibit RHL dan penanaman oleh penyuluh kehutanan, serta lomba penghijauan dan konservasi alam warna lestari	KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	30 KTH	3,615	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pengembangan perhutanan sosial	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha dibidang kehutanan	KTH	2	2	4	4	5	6	1,754	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Fasilitasi peningkatan sarana Prasarana usaha ekonomi produktif kelompok tani hutan (DAK)	Meningkatnya kualitas produksi usaha ekonomi produktif kelompok tani hutan	KTH	-	-	15	17	20	23	5,801	APBD/DAK	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial (DBHDR)	Terbangunnya pemahaman masyarakat dan perkembangannya peluang usaha berbasis perhutanan sosial (HD/HKM/HTR/Kementrian)	KTH	-	20	19	30	35	40	5,873	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pengelolaan hutan adat dan hutan hak	Optimalnya proses penetapan hutan adat dan hutan hak	Ha/MHA	-	5,100	5,100	5,100	6,800	8,500	1,335	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Fasilitasi percepatan pengakuan hutan adat (DBHDR)	Optimalnya proses penetapan hutan adat	MHA	-	7	7	-	-	-	845	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Penguatan kelembagaan MHA pengelola hutan adat (DBHDR)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MHA dengan pengelolaan hutan adat	MHA	-	7	7	-	-	-	784	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola hutan adat dan hutan hak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MHA dengan pengelolaan hutan adat	MHA	-	-	-	5	6	7	827	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM : Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan											
Kegiatan : Pengembangan kebun karet rakyat, kopi rakyat, aren rakyat	Terbangun dan meningkatnya kebun rakyat	Ha	380	190	300	475	750	950	8,150	APBD	Dinas Perkebunan
Kegiatan : Pencegahan kebakaran perkebunan rakyat	Tercegahnya kebakaran lahan pada perkebunan rakyat	Ha	380	190	300	475	750	950	500	APBD	Dinas Perkebunan
Kegiatan : Pengawasan dan pembinaan perkembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Presentase pengelolaan sawit yang memperoleh sertifikat RSPO - pengelolaan sawit berkelanjutan	%	-	60	70	80	90	100	350	APBD	Dinas Perkebunan
Sub Tujuan : Pada tahun 2020, meningkatnya pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merehabilitasi hutan yang terdegradasi dan meningkatnya secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global											
Indikator : Jumlah kesatuan pemangku hutan											
Sub Tujuan : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi											
Indikator : Proporsi luar lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan											
PROGRAM : pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim											
Kegiatan : Fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka	Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani	%	57.26	67.26	77.26	87.26	97.26	100	765	APBD	Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan LH
PROGRAM : Pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan											
Kegiatan : Pembangunan hutan rakyat	Jumlah kelompok dan luas pengelolaan hutan rakyat	kelompok tani hutan	-	4	2	2	2	2	800	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Penghijauan lingkungan dan rehabilitasi lahan	Luas tanam bibit kayu-kayuan dan kegiatan penghijauan lingkungan	Ha	225	225	225	225	225	225	2,200	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Pemeliharaan hasil kegiatan penanaman pada HTR/RH/Hutan kota	Luas tanaman yang terpelihara	Lokasi-Ha	-	-	4	5	4	5	2,065	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembangunan model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya pembangunan areal model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Ha	-	60	-	60	-	60	2,100	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pengembangan model DAS Mikro provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terealisasinya rancangan kegiatan dalam dokumen RPDAST di areal model DAS Mikro di Kalimantan Barat	Ha	-	30	-	30	-	35	2,300	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Rehabilitasi lahan melalui kegiatan sipil teknis di areal Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya pembangunan bangunan konverensi tanah dan air (KTA) diareal model DAS Mikro	Unit	-	-	-	12	12	12	9,930	APBD/DBHDR	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Gerakan menanam bagi forum DAS provinsi Kalimantan Barat (APBD)	Terlaksananya gerakan menanam forum DAS Provinsi KalBar	komunitas	0	0	1	1	1	1	600	APBD	DINAS KEHUTANAN
Sub Tujuan : pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekonomi pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan											
Indikator : persentase populasi 25 jenis satwa terancam											
PROGRAM : pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim											
Kegiatan : Pengelolaan kehati	Persentase jenis prioritas yang terlindungi	%	57.26	67.26	77.26	87.26	97.26	100	765	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH
PROGRAM : Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
Kegiatan : Pengelolaan kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	Terkelolanya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	KPH	17	17	17	17	17	17	443	APBD	DINAS KEHUTANAN
Kegiatan : Pembinaan dan penetapan kawasan ekosistem esensial	Terbinanya pengelolaan KEE di Kalimantan Barat	kab/kota	-	-	2	2	2	2	481	APBD	DINAS KEHUTANAN
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL,											
INDIKATOR SDGs: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun											
PROGRAM 1 : Penciptaan, pemeliharaan serta pengendalian kondusifitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat di KalBar dan pengamanan objek vital daerah											
Kegiatan 1 : Peningkatan kantibinas kepada masyarakat baik yang dilakukan aparat keamanan dan masyarakat	Rata-rata pelanggaran trantibmas di Kalbar	Kejadian	150	150	130	130	130	130	3,284,930	APBD	Satpol PP Prov.kalbar
Program 2 : Lidik sidik tindak pidana umum											
Kegiatan 1 : Lidik sidik	Jumlah kasus kegiatan pembunuhan	kasus	27	12	-	-	-	-	25,735,666	APBN	Polda kalbar Biro pengendalian Polda Kalbar
INDIKATOR SDGs: menghentikan perlakuan kejam, eksplorasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak											
PROGRAM 1: Peningkatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak											
Kegiatan 1 : Peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	kasus	452	233	213	203	200	150	2,170,000	APBD	Dinas pemberdayaan perempuan dan anak Prov.Kalbar
INDIKATOR SDGs: secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya											
PROGRAM 1 : Penyusunan indeks perilaku anti korupsi											
Kegiatan 1 : Indeks perilaku anti korupsi	Indeks anti perilaku korupsi (IPAK) BPS Indeks	Indeks	3.66	3.7	-	-	-	-	N.A	APBN	Bidan Pusat Statistik Prov.kalbar
PROGRAM 2 : Program penegakan integritas											
Kegiatan 1 : Penegakan integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	5	5	5	5	3,287,890	APBD	Inspektorat Prov.kalbar
INDIKATOR SDGs : Mengalahkan negara berdasarkan hukum ditingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua											
PROGRAM : Bantuan hukum non litigasi dan litigasi											
Kegiatan 1 : Bantuan hukum kepada masyarakat	Jumlah orang kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	orang	9	13	13	13	13	13	N.A	APBD	Biro hukum Setda Prov.Kalbar
INDIKATOR SDGs: mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan disemua tingkat											
PROGRAM 1: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah											
Kegiatan 1: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Proposi Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persentase	97.27	100	100	100	100	100	23,363,770	APBD	Badan pengelolaan keuangan daerah Prov. Kalbar

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Pencapaian					Akumulasi indikasi alokasi anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023			
Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase	71.43	85.71	92.86	92.86	100	100		APBD	Badan pengelolaan keuangan daerah Prov. Kalbar
PROGRAM 1 : Program pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan										
Kegiatan 1 : Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase	23.08	30.77	38.46	46.15	53.85	61.45	29,563,900	APBD	Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar
PROGRAM 1 : Program pengembangan unit kerja pengadaan barang/jasa2										
Kegiatan 1 : Pengelolaan pengadaan barang dan jasa elektronik	Persentase	100	100	100	100	100	100	94,024,500	APBD	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov.Kalbar
Kegiatan 2 : Peningkatan pembinaan aparatur sipil negara	Persentase	18.37	20.4	-	-	-	-	N.A		Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar
PROGRAM 1 : Penyelenggaraan survei Indek Demokrasi Indonesia										
Kegiatan 1 : Penyusunan IDI	Indeks	73.08	74.16	75.37	76.72	77.14	79.45	89,274,000	APBD	BPSRI
	Indeks	93.87	94.12	94.59	95.45	96.25	96.95		APBD	BPS Prov.kalbar
	Indeks	64.01	65.43	66.24	67.84	68.19	70.12		APBD	BPS Prov.kalbar
INDIKATOR SDGs: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatat kelahiran										
PROGRAM : Program fasilitas Pemilihan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk										
Kegiatan 1 : Pencatatan akte kelahiran	Indeks	82.02	85.62	89.51	92.81	96.4	100	N.A	APBD	BPS Prov.kalbar
TUJUAN SDGs : Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan										
PROGRAM :										
Kegiatan 3:	Lembaga	1	1	1	1	1	1	N.A		Komnas HAM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)
TUJUAN SDGs		
INDIKATOR SDGs:		
PROGRAM 1:		
Kegiatan 1:		
Kegiatan 2:		
PROGRAM 2:		
Kegiatan 1:		
Kegiatan 2:		
INDIKATOR SDGs:		
PROGRAM 1:		
Kegiatan 1:		
Kegiatan 2:		
Kegiatan 3:		

I NON PEMERINTAH

	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)
2023		

Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)